

Mahdi Augustinus PTIK
Tel

PERSETUJUAN PEMBIMBING MATERI

Telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan pada sidang ujian thesis Program Mas Business Administration pada Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta di Jakarta.



INSTITUT BISNIS DAN MANAJEMEN JAYAKARTA

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

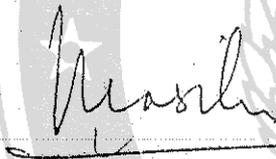
Telah diperiksa dan telah disetujui oleh Dewan Penguji untuk dijadikan Thesis.

Dewan Penguji

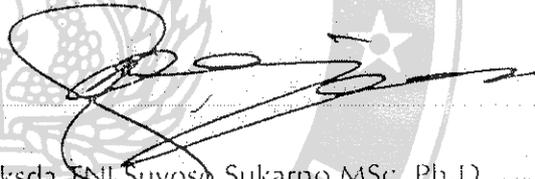


DR. Ahmad S. Adnanputra MA, MS.

John Ihalauw, SE, Ph.D



DR. Laode M. Kamaluddin MSc, M.Eng.



Laksda TNI Suyoso Sukarno MSc, Ph.D



Marsma TNI DRS. Billy Tunas M.Sc.

INSTITUT BISNIS DAN MANAJEMEN JAYAKARTA

"SEMAKIN DIMINUM SEMAKIN HAUS
DALAM KEHAUSAN ITU TERPENDAM KEBERLIMPAHAN
DAN DALAM KEBERLIMPAHAN ITU MENGALIR RAHMAT-NYA
YANG PATUT DISYUKURI"





terima kasih yang tercinta
faridah, fatimah, laela, dan alhamdi,
istri dan anak-anakku

KATA PENGANTAR

Keberhasilan menyelesaikan sesuatu program -lebih-lebih pendidikan- merupakan kebanggaan tersendiri. Tetapi nyatanya "semakin banyak yang diminum terasa semakin menghauskan". Rupa- rupanya di balik "minuman" yang tercicipi terbentang tantangan yang semakin besar : "mencari - mencari lagi" dan "mengamal - mengamal lagi". Karena itu, di samping rasa syukur yang tak terhingga, kiranya Dia masih berkenan menganugerahi kemampuan yang diridhoi untuk menjadikan diri ini sebagai "insan pembawa rahmat bagi kehidupan".

Berkenaan dengan itu pula, ungkapan terima kasih patut dihaturkan kepada semua pihak yang memungkinkan terselenggaranya segala proses belajar sampai persembahan karya ini. Kepada Bapak Ahmad S. Adnanputra M.A., M.S., D.B.A., yang secara khusus memberikan bimbingan dan dorongan moril rasanya tidak berarti apa-apa dengan hanya ungkapan terima kasih; juga kepada Bapak Billy Tunas M.Sc., Bapak John Ihalauw Ph.D., Bapak Laode Kamaludin M.Sc., M. Eng., Ph.D., dan Bapak Sjamsul Bachrie M.Sc. yang arahan dan ilmunya banyak mewarnai tulisan ini, serta kepada Pimpinan Lembaga, para pengajar/perangkat akademik dan staf IBMJ. Dari lubuk hati yang dalam hanya kepadaNya-lah dikembalikan segala urusan; kiranya segala kebaikan dimaksud diterima sebagai amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda.

Sebagai suatu pekerjaan besar, karya tulis ini terasa masih belum sempurna. Koreksi dan saran akan sangat berguna bagi pengembangannya di masa-masa mendatang. Tetapi walau hanya setitik air, semoga bermanfaat adanya.

Jakarta, Januari 1993.

Peneliti

SARIPATI

Acapkali pemikiran kita hanya tertuju pada badan-badan formal jika membicarakan keamanan; dalam tulisan ini, istilah tersebut banyak ditampilkan dengan sebutan sekuriti karena juga mencakup "safety and fire" dalam kerangka "crime prevention" maupun "loss prevention". Padahal, baik dari segi formal-yuridis maupun historis-filosofis, negara kita mengenal kebersamaan -pemerintah dan masyarakat- dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban. Yang pertama disebut "public security" dan yang lainnya disebut "privat security" atau pembina Kamtibmas (Keamanan dan Keterliban Masyarakat) swakarsa.

Walaupun sekuriti bukanlah suatu komoditi yang diperdagangkan, tetapi berbagai aspek yang berkaitan dengannya bukan tidak mungkin untuk dikelola secara "komersial" sebagai suatu bidang usaha. Misalnya pelayanan jasa sekuriti dalam arti penyiapan tenaga, perdagangan peralatan (security devices), atau jasa konsultasi dan pengembangan sistem. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan prospek usaha dimaksud.

Kepedulian untuk melakukan penelitian ini semakin penting mengingat aktivitas dan hasil-hasil pembangunan ekonomi khususnya industri dewasa ini dengan segala dampak sekuritinya. Kepentingan tersebut semakin mendesak karena kehadiran AFTA (ASEAN Free Trade Area - Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN) yang diduga akan semakin mendorong pertumbuhan industri dan kemajuan ekonomi pada umumnya. Sampai di mana korelasi ketiga unsur tersebut, -kejahatan, industri, dan AFTA- akan diungkapkan melalui penelitian ini. Penelitian lebih difokuskan pada masalah pendidikan dengan memilih kasus kelaikan pembentukan suatu lembaga pendidikan manajemen sekuriti.

Setelah melakukan studi kepustakaan atas beberapa acuan yang penad, serta menyebarkan angket kepada dan mewawancarai sejumlah responden, seluruh data dicoba dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan mengacu pada berbagai pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah "bisnis dan sekuriti". Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program studi MBA pada IBMJ khususnya mengenai korporasi, strategi, bisnis, "marketing", statistik, dan akuntansi

serta metode penelitian sangat membantu dalam pemecahan masalah, di samping pengetahuan kriminologi yang telah ditekuni sebelumnya.

Ternyata benar. Usaha pelayanan jasa sekuriti akan merupakan lahan baru yang menjanjikan berbagai manfaat. Bukan saja karena perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan khususnya mengenai bisnis yang terus meningkat tetapi juga ternyata, secara statistik, mencerminkan gerak yang searah dengan pertumbuhan industri; walaupun tidak harus disimpulkan bahwa industrialisasi merupakan kausa kejahatan. Kehadiran AFTA yang ternyata secara teoritis juga akan semakin mendorong percepatan pertumbuhan industri sudah barang tentu pula akan membawa serta berbagai dampak sekuriti. Oleh karena itu, ancaman sekuriti terhadap dunia bisnis diperkirakan akan terus meningkat sehingga merupakan peluang bagi pengembangan usaha pelayanan jasa sekuriti.

Khusus mengenai gagasan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti ternyata mendapat sambutan positif dari "pasar" baik dari sudut "demand" maupun "supply". Sebagian besar responden menyatakan berminat mengikuti atau mempertimbangkan merekrut lulusan pendidikan dimaksud. Dari aspek legalitas, gagasan ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan terdukung oleh kebijakan dan strategi pengembangan Siskamtibmas swakarsa sebagaimana ditetapkan oleh MPR dalam GBHN (terakhir 1988).

Dari sudut keuangan, investasi dalam "usaha" pendidikan ini -walaupun bukan merupakan korporasi ekonomi, tetapi nyatanya bahwa suatu lembaga pendidikan tetap harus mempertimbangkan "profitabilitas" untuk menjamin eksistensi dan kelancaran operasinya- cukup menjanjikan "laba" yang menggembirakan. Kesimpulan tersebut didasarkan atas perkiraan aliran kas, laporan "rugi/laba", tingkat pengembalian modal dan nilai waktu uang.

Dari sudut sosial - ekonomi, "usaha" ini membawa manfaat dalam membantu memecahkan masalah nasional di bidang pendidikan dan ketenaga-kerjaan. Di samping itu, manfaat lain yang bisa diperoleh adalah semakin bertebarannya tenaga-tenaga terdidik sekuriti atau karyawan berwawasan sekuriti, sehingga semakin melicinkan jalan bagi upaya pengembangan Siskamtibmas, menuju masyarakat yang "tata tentram kerta raharja".

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Persetujuan Dewan Penguji	ii
Kata Pengantar	v
Saripati	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar Tabel dan Gambar	xi
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Permasalahan	2
3. Hipotesa	3
4. Asumsi	4
5. Manfaat Penelitian	4
6. Ruang Lingkup	5
7. Definisi	6
II. TINJAUAN LITERATUR	
1. Perkembangan Kejahatan dan Gangguan Keamanan dalam Dunia Bisnis	7
2. Pertumbuhan Industri Dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi	13
3. Kehadiran AFTA	15
4. Kebutuhan Sekuriti	25
5. Tinjauan Aspek Legalitas	29
III. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN KONSEP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
1. Metode Penelitian	33
2. Pelaksanaan dan Hasil Penelitian	37
3. Konsep Kelembagaan	38
4. Konsep Program dan Operasi Pendidikan	41

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kehadiran AFTA dan Pertumbuhan Industri	45
2. Pertumbuhan Industri dan Perkembangan Kejahatan	49
3. Prospek Usaha Pelayanan Jasa Sekuriti	53
4. Kelaikan Pembentukan Lembaga Pendidikan Sekuriti	63
5. Sinergi	64
6. Telaahan Aspek Keuangan	67
7. Telaahan Aspek Sosial - Ekonomi	76

V. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan	78
2. Saran	80

Daftar Kepustakaan	82
Lampiran - lampiran	86
Daftar Kiwayat Hidup	124



DAFTAR LAMPIRAN

I.	Batasan Pengertian	86
II.	Konsep Perdagangan Bebas	89
III.	Petikan dari Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang Berkenaan dengan Pembentukan Lembaga Pendidikan	95
IV.	Model Angket	101
V.	Rekapitulasi Jawaban Angket	113
VI.	Konsep Struktur Organisasi	114
VII.	Daftar Kebutuhan Sarana Jangka Panjang	115
VIII.	Daftar Kebutuhan Sarana Jangka Pendek	116
IX.	Daftar Kebutuhan Tenaga	117
X.	Daftar Rincian Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)	118
XI.	Perhitungan Titik Impas (Break Event Point)	119
XII.	Perkiraan Aliran Kas (Cash Flow) Dalam Lima Tahun Pertama	121
XIII.	Perkiraan Laporan Rugi/Laba Dalam Lima Tahun Pertama	122
XIV.	Perhitungan Nilai Waktu Uang (Time Value of Money)	123

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

1.	Data "Crime Total" di Indonesia Tahun 1987 - 1991	9
2.	Jumlah Tindak Pidana di bidang Ekonomi di Indonesia yang dilaporkan kepada Polisi Tahun 1983 - 1991	10
3.	Tindak Pidana Tertentu di bidang Ekonomi (Perusahaan Sebagai Korban) di Jakarta dan sekitarnya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri 1988 - 1992	11
4.	Jumlah orang asing yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia 1988 - 1990	11
5.	Jumlah kasus pemogokan di Tangerang, Jakarta Barat dan Bekasi Tahun 1990 - 1992	12
6.	Jumlah kasus kebakaran Tempat usaha di Wilayah Polda Metro Jaya tahun 1987 - 1992	12
7.	Efek Ekonomi Pengenaan Tarif	20
8.	Perkembangan Jumlah Anggota Satpam di Seluruh Indonesia tahun 1988 - 1991	27
9.	Estimated Costs of 'ordinary Crime by sector of Business 1971, 1973 & 1974	28
10.	Korelasi Antara Perkembangan Kejahatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi/ Industri, Tahun 1987 - 1991	51
11.	Kecenderungan Perkembangan Kejahatan/ Gangguan Lain	55

DAFTAR GAMBAR

1.	Efek Ekonomi Pengenaan Tarif Pada Suatu Negara	19
2.	Ekuilibrium Sebelum Pengenaan Kuota	21
3.	Efek Ekonomi Pengenaan Kuota	21

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.

Kehidupan masyarakat lazimnya menampilkan diri dalam dua sisi yang berlawanan, assosiatif -dissosiatif, konstruktif- destruktif. Manusia hidup berkelompok karena kebutuhannya akan kerja sama; mahluk sosial. Tetapi manusia juga hidup dalam suasana antagonistik karena fasilitas yang tersedia terbatas sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Kehidupan damai dan tenteram akan terwujud jika orang-orang mematuhi sepenuhnya pihak yang diberinya kewenangan (teori kontrak sosial, Thomas Hobes)⁶¹. Jika tidak, akan terjadi pertentangan yang terus menerus di antara sesama manusia, "bellum omnium contra omnes".

Dewasa ini, kita telah ada pada posisi penghujung era pembangunan jangka panjang pertama. Dari hasil pembangunan tersebut berbagai kemajuan telah dicapai pada hampir segala aspek kehidupan, terutama yang menyangkut pertumbuhan ekonomi khususnya industri. Di lain pihak, kemajuan masyarakat yang ditopang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arus globalisasi, menghadirkan pula berbagai dampak negatif dalam aneka ragam dan modus gangguan dan kejahatan, baik yang bersifat menyeluruh maupun bagi kelancaran bidang usaha bisnis. Perkembangan kejahatan dan gangguan pada umumnya ternyata melaju dengan cepat, setidaknya dalam aspek kualitasnya. Berbagai kasus terjadi dalam tahun-tahun terakhir, seperti pembobolan bank melalui sarana komputer, persaingan curang, pemalsuan merk, "credit card", dan lain lain.

Secara teoritis, pemberlakuan kebijakan AFTA (Asean Free Trade Area - Kawasan Perdagangan Bebas Asean) yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1993 yang lalu, akan semakin mempercepat pertumbuhan industri dalam konteks pertumbuhan ekonomi khususnya dunia usaha, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan tersebut memungkinkan pemasaran produk

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi - Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman 33

tertentu- dengan harga yang relatif lebih murah, di antara negara anggota Asean karena penghapusan atau pengurangan bea masuk. Dalam konteks yang lebih luas, intensitas saling keterpengaruhan sosial yang bersifat regional bahkan global sudah barang tentu akan semakin meningkat dengan segala konsekuensinya terhadap perubahan nilai. Persaingan dalam bidang industri maupun bisnis juga akan sukar dihindari. Keadaan demikian diperkirakan akan ikut membawa-serta dampak sekuriti.

Pada titik ketiga, pihak yang diberi kewenangan dalam pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penegakan hukum -Polri- dihadapkan pada berbagai kendala khususnya sumber daya sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara untuk pembangunannya. Dalam hal ini MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) menetapkan pengembangan Sistem Kamtibmas Swakarsa, sebagai arah dan strategi pembangunan jangka sedang.²

Pertemuan ketiga titik tersebut menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi diri peneliti. Di tengah-tengah upaya besar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin didorong dengan pemberlakuan AFTA, gangguan dan kejahatan dalam bidang bisnis dikhawatirkan akan semakin melaju mendahului kemampuan Polri dengan segala keterbatasannya. Untuk mengantisipasi keadaan demikian, sebagai salah satu konsep dalam konteks Siskamtibas Swakarsa, ditawarkan suatu konsepsi penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan calon- calon pelaku sekuriti yang profesional dan pelaku-pelaku bisnis yang berwawasan sekuriti dengan menjajagi kemungkinan membentuk suatu lembaga pendidikan manajemen sekuriti.

2. PERMASALAHAN.

Pokok permasalahan yang diteliti adalah "bagaimana prospek 'usaha' pelayanan jasa sekuriti khususnya kelayakan pembentukan suatu lembaga pendidikan sekuriti, berkenaan dengan pertumbuhan industri di Indonesia dalam kerangka pemberlakuan AFTA". Sangat disadari bahwa suatu lembaga pendidikan apalagi mengenai sekuriti bukan merupakan korporasi ekonomi, melainkan sosial. Tetapi bagaimanapun,

² Ketetapan MPR no : II/ MPR/ 1988 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV D - Pertahanan Keamanan, Butir 12

dalam banyak hal, suatu lembaga pendidikan tidak mungkin bisa "exist" tanpa perhitungan ekonomi khususnya aspek keuangan.

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, timbul berbagai persoalan yang perlu diteliti. Pertama, berbicara mengenai usaha berarti harus berbicara mengenai "supply" dan "demand". Dari sudut "demand" : apakah benar manusia membutuhkan sekuriti dan apakah para pengusaha khususnya membutuhkan jasa sekuriti, baik dalam bentuk tenaga manajemen maupun pemikiran manajerial? Dari sudut "supply" : apakah cukup tersedia "bahan mentah" dalam arti ada minat dari calon peserta didik ? Dengan demikian penelitian ini akan menyangkut masalah "marketing", yaitu mengenai "want", "need", produk, dan tingkat daya beli dalam pasar.

Persoalan kedua adalah persoalan prospek, atau dengan perkataan lain, gambaran "marketing" di masa mendatang. Sebagaimana disinggung di atas bahwa yang melatar belakangi penawaran konsepsi ini adalah kekhawatiran perkembangan gangguan dan kejahatan khususnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Karenanya perlu dikaji, pengaruh pemberlakuan kebijakan AFTA bagi pertumbuhan industri dalam konteks perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha secara keseluruhan. Selanjutnya perlu diteliti pula pengaruh pertumbuhan industri terhadap perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lain khususnya yang berkaitan dengan bidang bisnis. Dari hasil penelitian itulah baru dapat diperoleh gambaran mengenai prospek "usaha" pelayanan jasa sekuriti.

Dengan memperoleh jawaban atas persoalan tersebut, pokok permasalahan yang hendak diteliti belum terjawab secara tuntas. Karena itu, persoalan berikutnya yang harus diteliti adalah "kelaikan pembentukan suatu lembaga pendidikan manajemen sekuriti". Dalam hal ini terutama ditinjau dari aspek keuangan serta tinjauan dari sudut sosial - ekonomi.

3. HIPOTESA

Dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan kejahatan/ gangguan khususnya dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, dikaitkan dengan laju pertumbuhan industri, di satu pihak, dan keterbatasan kemampuan Polri di lain pihak, maka

sebagai hipotesa mayor dapat dikemukakan bahwa "usaha pelayanan jasa sekuriti cenderung mempunyai prospek yang cukup cerah berkenaan dengan pertumbuhan industri di Indonesia termasuk dengan diberlakukannya AFTA".

Untuk keperluan pembuktian hipotesa tersebut maka dirumuskan beberapa hipotesa kerja sebagai berikut :

- 1) kebijakan AFTA akan semakin meningkatkan pertumbuhan industri dalam konteks perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha di Indonesia;
- 2) laju pertumbuhan industri ikut berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan/gangguan keamanan lain khususnya dalam dunia bisnis;
- 3) pelayanan jasa sekuriti semakin dibutuhkan oleh para pengusaha;
- 4) lembaga pendidikan manajemen sekuriti cukup laik untuk dibentuk.

4. ASUMSI

Untuk menjamin kesahihan hasil penelitian ini maka perlu digaris bawahi adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diletakkan sebagai asumsi.

- 1) Tidak terjadi gejolak politik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi khususnya pertumbuhan industri.
- 2) Situasi moneter relatif tetap terjamin stabil.
- 3) Kebijakan pembangunan nasional tetap diarahkan pada pencapaian struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung oleh bidang pertanian yang tangguh.
- 4) Kebijakan deregulasi termasuk bagi Penanaman Modal Asing (PMA) akan terus dilakukan, minimal dipertahankan sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi pertumbuhan industri di Indonesia.
- 5) Arah dan kebijakan pengembangan Siskamtibmas swakarsa tetap dipertahankan.

5. MANFAAT PENELITIAN.

Berbagai pihak akan memetik manfaat dari hasil penelitian ini. Pertama, Polri

akan merupakan pihak utama yang paling berkepentingan atas hasil penelitian ini karena dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan Siskamtibmas swakarsa. Dengan mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh pertumbuhan industri dan kehadiran AFTA terhadap perkembangan kejahatan/gangguan keamanan lainnya, Polri dapat menyesuaikan kebijakan. Pengetahuan mengenai prospek usaha pelayanan jasa sekuriti dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk, sesuai tugasnya, menyusun kiat-kiat pembinaan Siskamtibmas swakarsa dalam lingkungan kerja/usaha. Di samping itu, hasil penelitian mengenai kelayakan pembentukan lembaga pendidikan bila perlu dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk mengadakan sinergi.

Bagi para pemilik modal, informasi ini merupakan masukan untuk dipertimbangkan apakah penanaman modal dalam bidang usaha ini "profitable" atau tidak. Dan kalau ya, sampai berapa tinggi tingkat pengembalian modalnya, di samping "profit" dari aspek sosial - ekonomi lainnya. Informasi lain yang juga bisa diperoleh adalah mengenai kemungkinan risiko dan kiat mengatasinya. Bagi pemilik modal, informasi ini bukan saja berkenaan dengan jasa, khususnya pendidikan tetapi juga bagi semuanya mengenai sekuriti; misalnya perdagangan peralatan sekuriti (Security Devices).

Walau hanya setitik air di padang pasir, bagi dunia ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan terutama mengenai hubungan antara pekerjaan sekuriti dengan dunia bisnis.

6. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

- 1) jasa sekuriti, khususnya lembaga pendidikan manajemen sekuriti; dalam hal ini tidak mungkin terlepas dari pembicaraan mengenai gangguan sekuriti khususnya kejahatan yang berkaitan dengan bidang usaha bisnis;
- 2) pertumbuhan industri; tidak hanya sekadar sektor industri saja tetapi, mencakup lingkup peranannya dalam proses industrialisasi, di mana industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang antara lain mencakup dunia usaha;

- 3) kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA); tanpa membatasi diri pada kerja sama perdagangan saja, melainkan juga berkaitan dengan kerja sama secara keseluruhan khususnya dalam bidang ekonomi.

7. DEFINISI

Untuk keperluan penyamaan persepsi maka atas penggunaan beberapa istilah dalam penelitian perlu diberikan penjelasan. Tetapi agar tidak menimbulkan kesan yang kaku, maka sejauh mungkin dihindari penggunaan definisi. Seperti dikemukakan Fennelly³ bahwa di antara 10 orang akan dihasilkan lima definisi yang berbeda mengenai pengertian yang berkaitan dengan sekuriti. Karena itu, untuk kesamaan persepsi mengenai penggunaan beberapa istilah dalam penelitian ini akan disajikan semacam pembatasan pengertian. Istilah-istilah tersebut meliputi : sekuriti dan jasa sekuriti, industri dan industrialisasi, perdagangan bebas, manajemen, pendidikan, dan lain lain. Uraian dimaksud disajikan dalam *Lampiran 1*. Batasan pengertian untuk istilah lain akan langsung diuraikan dalam teks.

³ Lawrence J. Fennelly, *Handbook Of Loss Prevention and Crime Prevention*, Butterworths Publishers, Stoneham, 1989, halaman. 3.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

1. PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM DUNIA BISNIS.

Berbicara mengenai sekuriti adalah berbicara tentang gangguan dan bahaya yang dapat merugikan kehidupan manusia. Gangguan dan bahaya dapat bersumber dari manusia, alam atau sumber daya buatan. Dalam paragraf ini hanya diulas masalah kejahatan dan gangguan keamanan -lainnya- sebagai salah satu bentuk gangguan -fisik- yang sangat mengancam kehidupan. Kejahatan adalah gangguan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan gangguan lainnya adalah gangguan yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi secara fisik mengganggu keamanan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat perkembangan kejahatan dalam dunia bisnis yang meningkat secara cepat. Berbagai kejahatan berdimensi baru (new dimension of crime) maupun kejahatan baru (new crimes) mewarnai perkembangan aktivitas bisnis akhir-akhir ini di Indonesia. Kejahatan dalam dunia bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan -disebut kejahatan korporasi- tetapi juga dapat mengenai perusahaan. Paragraf ini terutama membahas kejahatan dan gangguan di mana perusahaan menjadi korbannya.

Jenis kejahatan dan gangguan keamanan yang berkenaan dengan dunia bisnis adalah penipuan dan penggelapan terutama berkenaan dengan kertas berharga, asuransi, "credit card", kredit "white collar crime", dan kejahatan lain dalam bidang keuangan/perbankan, pencurian dalam segala bentuknya termasuk "pembobolan" bank, pemalsuan dokumen, pemalsuan merk, kebakaran/pembakaran, hak cipta, pemogokan, dan lain-lain. Untuk keperluan penelitian ini -terutama karena faktor ketersediaan data- maka tidak semua jenis kejahatan tersebut ditelaah.

Statistik Kriminal. Perkembangan kejahatan dapat dipelajari dari statistik kriminal, walaupun disadari akan ketidak mampuannya untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Sutherland dan Cressy mengemukakan bahwa statistik kriminal merupakan salah satu statistik yang paling tidak dapat

dipercaya dan paling sulit. Akan tetapi mereka menyadari juga sulitnya memperoleh statistik kriminal yang sungguh-sungguh akurat karena adanya berbagai faktor yang menyebabkan munculnya "the dark figures of crime".⁴

Terhadap angka gelap ini, Robin mengemukakan adanya beberapa penyebab yaitu :

- 1) tidak ada yang mengetahui terjadinya kejahatan tersebut;
- 2) kejahatan tersebut diketahui tetapi tidak dilaporkan pada lembaga-lembaga yang berwenang;
- 3) kejahatan tersebut dilaporkan akan tetapi tidak direkam secara resmi.⁵

Berdasarkan pengalaman, keengganan warga masyarakat melaporkan sesuatu kejahatan kepada Polri disebabkan antara lain:

- 1) jika kerugian yang dialami relatif kecil;
- 2) cukup dapat diselesaikan RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) atau pemerintah desa/kelurahan;
- 3) letak kantor polisi jauh;
- 4) "image" terhadap polisi;
- 5) berbelit-belit/merepotkan atau birokratis.

Belum lagi -seperti juga disinyalir Robin kelemahan dalam sistem pengumpulan data Polri yang membuat besarnya perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan data statistik. Dalam praktek masih seringkali dihadapi kurang-cermatan pencatatan, masih bersifat global, sehingga kesemuanya dapat mempengaruhi sesuatu penelitian. Bahkan kebijakan pimpinan Polri ikut mempengaruhi naik turunnya angka kejahatan. Misalnya jika ada penekanan untuk menurunkan "Crime Total" maka terdapat kecenderungan para pejabat di lapangan untuk "merendahkan" angka agar dianggap berhasil.

Walaupun demikian, statistik kriminal Polri dipandang masih lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Pertama, perkara yang diteruskan kepada penuntut

⁴ Harkristuti, Indikator-indikator Pengukuran Perkembangan Kejahatan di Indonesia, Makalah pada Seminar Kriminologi VI, Universitas Diponegoro Semarang, 16-18 September 1991, halaman 8.

⁵ Ibid, halaman. 9

umum/pengadilan telah melalui proses "seleksi" oleh Polri antara lain berupa "deponering" atau pengenyampingan perkara (berdasarkan UU No. 13/1961), bukan tindak pidana, kadaluarsa, tersangka meninggal, tidak cukup bukti dan lain lain yang dihentikan penyidikannya (berdasarkan UU No.: 8/1981). Kedua, seperti dikemukakan Manheim, statistik kriminal penelitian masih jarang dilakukan dan mengandung kelemahan dari segi akses terhadap data karena berkaitan dengan sifat "pemidanaan"nya sehingga membuat orang takut berterus terang.⁶

Tabel 1.
Data "Crime Total" di Indonesia
Tahun 1987-1991

No	Tahun	Jumlah	% Peningkatan
1	1987	186506	0
2	1988	199253	+ 6,8 %
3	1989	215660	+ 8,2 %
4	1990	202660	- 6 %
5	1991	204446	+ 1,3 %

SUMBER : PUSKODALOPS POLRI

Perkembangan Kejahatan. Secara keseluruhan perkembangan kejahatan (crime total) dapat dilihat pada (Tabel 1). Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan sekitar 26,5 % atau rata-rata meningkat 6,6 % setiap tahun. Khusus dalam bidang ekonomi (Tabel 2) terjadi peningkatan sekitar 250,3 % selama 9 tahun atau rata-rata sekitar 31,3 % setiap tahun. Sedangkan tindak pidana tertentu dalam bidang ekonomi -setelah dikurangi penyelundupan, pelanggaran ketentuan peridzinan/perikanan/ perpajakan/tera, korupsi, dan lain lain- meningkat sekitar 170,2 % atau 21,3 % setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, tindak pidana dalam bidang ekonomi meningkat sekitar 113,4 % atau 28,35 % setiap tahun, sedangkan tindak pidana tertentu meningkat sekitar 171,8 % atau 42,95 % setiap tahun.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Metode Penelitian dalam Kriminologi*, Makalah pada Penataran Kriminologi, Universitas Andalas Padang, 30 Oktober 1989, hal 2.

Tindak pidana perbankan meningkat rata-rata 13,7 % setiap tahun dan tindak pidana pemalsuan merk rata-rata 24,3 %. Tindak pidana hak cipta yang pada tahun 1983 hanya tercatat satu kasus menjadi 70 kasus pada tahun 1991. Sedangkan tindak pidana lain yang menyangkut dunia bisnis meningkat rata-rata sekitar 36,7 % setiap tahun. Daftar tersebut juga memperlihatkan bahwa mulai tahun 1988 terjadi perubahan yang sangat besar dari setiap jenis tindak pidana, yaitu yang berkaitan dengan keuangan/perbankan, merk, hak cipta, penipuan/ penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Tabel 2.
Jumlah Tindak Pidana di bidang Ekonomi di Indonesia
yang dilaporkan kepada Polisi Tahun 1983 - 1991

No	Jenis/Tahun	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1	Tindak Pidana (TP) di bidang Ekonomi	66	91	127	210	198	356	470	458	477*
2	TP tertentu di bidang Ekonomi									
	a. Perbankan	27	39	48	42	38	77	66	50	50
	b. Pemalsuan	5	7	12	17	21	58	45	49	56
	c. Hak Cipta	1	10	3	3	1	19	44	88	70
	d. Dan lain-lain	15	13	7	10	15	24	74	58	66
	JUMLAH	48	69	70	72	75	178	230	245	242

- Keterangan :
1. Sumber : Subditserseke Polri
 2. TP di bidang ekonomi sebagian dari kejahatan ekonomi (Economic Crimes).
 3. * Data hasil operasi tera di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur sebanyak 600 kasus telah dikeluarkan.
 4. Perbankan : juga meliputi kejahatan yang dilakukan bank.

Pada tabel 3 secara lebih khusus diusahakan data kejahatan yang menggambarkan perusahaan sebagai korban. Dalam lima tahun terakhir kejahatan perbankan meningkat rata-rata 24,5 % dan penipuan/ penggelapan 16,25 % setiap tahun di Jakarta. Kejahatan "Credit Card" meningkat tajam sedangkan dokumen palsu justru menurun. Berkenaan dengan kejahatan perbankan diperoleh data kerugian berturut-turut (1986-1991) : Rp 12,9 milyar, Rp 7 milyar, Rp 30 milyar, Rp 81,5 milyar, Rp 842,2 milyar dan Rp 289 milyar atau rata-rata Rp 210 milyar setahun.

Ditinjau dari sudut asal kebangsaan pelaku terjadi peningkatan jumlah orang asing yang diduga melakukan kejahatan sebagaimana terlihat pada *tabel 4*. Sementara itu jumlah orang asing pemegang Visa Kunjungan Usaha pada periode yang sama : 51.571 orang, 62.356 orang dan 67.001 orang.

Tabel 3.

Tindak Pidana Tertentu di bidang Ekonomi (Perusahaan Sebagai Korban) di Jakarta dan sekitarnya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri 1988 - 1992

No	Jenis\Tahun	1988			1989			1990			1991			1992		
		PMJ	MBS	JML												
1	Perbankan/ Keuangan	30	3	33	26	3	29	11	7	18	33	12	45	29	15	44
2	Penipuan/ Penggelapan	34	38	72	68	45	113	42	35	77	87	37	124	68	30	98
3	Dokumen Palsu	22	10	32	18	8	26	4	3	7	3	1	4	11	3	14
4	"Credit Card"	2	0	2	1	1	2	4	0	4	12	3	15	9	2	11
		88	51	139	113	57	170	61	45	106	135	53	188	117	50	167

Sumber : 1. Satserscek Polda Metro Jaya (PMJ)
2. Subditserscek Polri (MBS)

Tabel 4.

Jumlah orang asing yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia 1988-1990

No	Jenis\Tahun	1988	1989	1990
1	TP Umum	385	354	398
2	Penipuan/ Penggelapan	10	11	23
3	Pencurian/ Pemerasan	3	6	13

Sumber : Dispullanta Polri (Polri dalam angka 1990/1991)

Perkembangan Gangguan Keamanan Lain. Jumlah kasus pemogokan meningkat secara tajam pada tahun 1992 di tiga wilayah Polda Metro Jaya, *tabel 5*. Dengan sampel ketiga wilayah tersebut dipandang cukup mewakili keadaan di seluruh wilayah Polda Metro Jaya bahkan perkembangannya dapat disejajarkan dengan

perkembangan keadaan di seluruh Indonesia. Kasus ini sangat erat korelasinya dengan pertumbuhan industri khususnya pembangunan pabrik. Sebagai contoh, sebelum tahun 1990 hampir tidak pernah terjadi kasus pemogokan di wilayah Bekasi karena pada umumnya pabrik mulai beroperasi pada tahun 1989. Pemogokan pada umumnya dialami industri padat karya. Di wilayah Tangerang terjadi 6 (enam) kasus pemogokan yang diikuti pengrusakan dengan total kerugian sekitar Rp. 3 Milyar.

Tabel 5.

Jumlah kasus pemogokan di Tangerang, Jakarta Barat dan Bekasi Tahun 1990-1992

No	Wilayah\Tahun	1990	1991	1992
1	Tangerang	7	34	119
2	Bekasi	8	12	28
3	Jakarta Barat	3	8	27
	Jumlah	18	54	174

Sumber : masing-masing Polres yang bersangkutan

Kasus kebakaran, sebagaimana datanya tertera pada *tabel 6* menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kesemuanya yang menyangkut tempat usaha khususnya pabrik, pusat pertokoan, gudang, dan lain lain.

Tabel 6.

Jumlah kasus kebakaran Tempat usaha di Wilayah Polda Metro Jaya tahun 1987-1992

No	Tahun	Jumlah
1	1987	33
2	1988	27
3	1989	10
4	1990	67
5	1991	82
6	1992	76

Sumber : Unit Kebakaran Ditserse Polda Metro Jaya

2. PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN EKONOMI.

Dewasa ini, pada tahun-tahun terakhir pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui program Pelita demi Pelita telah membawa berbagai kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, mulai tahun 1987 sampai dengan 1991, pertumbuhan ekonomi berturut-turut adalah : 4,93 %, 5,78 %, 7,21 %, 7,29 % dan 6,57 %.⁷ Dengan demikian terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,36 % setahun.

Dari aspek sosial, peningkatan kesejahteraan juga terlihat pada beberapa indikator, seperti laju pertumbuhan penduduk, pendidikan, derajat kesehatan, pengeluaran (belanja) perkapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dari buku Indikator Kesejahteraan Rakyat 1991 terbitan Biro Pusat Statistik tergambar data sebagai berikut :

- 1) laju pertumbuhan penduduk menurun dari 2,32 % pada dekade 70-an menjadi 1,97 % pada 80-an;
- 2) penduduk melek huruf meningkat dari 71 % pada 1980 menjadi 84 % pada 1990, sementara penduduk tamatan sekolah lanjutan tingkat atas meningkat dari 6,7 % menjadi 13,7 %;
- 3) angka kematian bayi pada tahun 1985 menurun sebesar 37 % (pria) dan 39,5 % (wanita) dibandingkan dengan tahun 1980, sementara angka harapan hidup meningkat dari 50,9 (pria) dan 59,1 (wanita) menjadi 54 dan 62,7;
- 4) rata-rata pengeluaran perkapita selama sebulan dalam dasawarsa 1980 - 1990 meningkat sekitar 250 % yaitu Rp. 8.341,- menjadi Rp. 29.222,-;
- 5) jumlah angkatan kerja meningkat dari 70,2 juta (1986) menjadi 77,8 juta (1990) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpuncak (one peak pattern) pada usia 35 - 44 tahun sedangkan usia 10 - 14 tahun dan usia tua relatif kecil.

⁷ Menteri Perindustrian, RI., Kebijaksanaan dan Perkembangan Pembangunan Industri Nasional, Naskah Ceramah pada Kra XXV Lemhannas Jakarta, 28 Juli 1992, lampiran 2-a

Pertumbuhan Industri. Menteri Perindustrian mengemukakan bahwa :

*perkembangan industri nasional bergerak semakin cepat, dan kian meluas keterkaitannya dengan sektor ekonomi lainnya yaitu dengan sektor pertanian, kehutanan, pertambangan migas/ non migas, serta aspek kehidupan nasional baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun hankam. Apabila kita simak tampak jelas bahwa industri nasional pada tahun 1991 sudah mampu memenuhi amanat GBHN.*⁸

Dalam hal ini, terwujud struktur ekonomi yang seimbang yaitu industri maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Pada tahun 1991, sumbangan industri pada PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sekitar 22,22 % sedangkan pertanian 19,60 %; tahun 1990 masih menunjukkan perbandingan yang terbalik yaitu 20,32 % dan 21,52 % sedangkan tahun 1989 adalah 18,48 % dan 20,58 %.⁹

Pertumbuhan industri pengolahan mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1991 berturut-turut adalah : 10,61 %, 11,99 %, 9,20 %, 12,18 %, dan 11,01 %. Dengan demikian dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi pertumbuhan industri pengolahan rata-rata sekitar 11 % setahun.¹⁰

Jumlah industri kecil sebanyak kurang lebih 2 juta unit usaha yang tersebar di 7.117 sentra. Industri skala menengah yang pada umumnya tergolong industri hilir sebanyak kurang lebih 28.000 pabrik, kebanyakan menerapkan teknologi madya dan di antaranya berteknologi canggih. Industri dasar yang terdiri atas industri-industri mesin, logam dasar, elektronika dan kimia dasar, pada umumnya menerapkan teknologi canggih, yang berjumlah kurang lebih 2.000 unit.¹¹

Dalam sektor pariwisata, terlihat perkembangan yang demikian menakjubkan terutama selama Pelita V. Dengan posisi awal 86.100 orang wisatawan mancanegara pada tahun I Pelita I menjadi sekitar 3 juta pengunjung pada menjelang akhir Pelita V. Sementara penerimaan devisa dari US \$ 10,9 juta menjadi sekitar US \$

⁸ *ibid*, hal 18.

⁹ *ibid*, hal 19.

¹⁰ *ibid*, lampiran 2-a.

¹¹ *ibid*, hal 43.

3 milyar. Sampai dengan tahun 1990 terdapat 410 hotel berbintang dengan 34.971 kamar. Berkaitan dengan itu berkembang pula jumlah biro perjalanan umum dari 889 pada tahun 1989 menjadi 1.062 pada tahun 1990.¹²

Berkenaan dengan bisnis keuangan dan perbankan tergambar peningkatan yang cukup tajam, jumlah bank meningkat dari 110 (1986) menjadi 163 (1990) atau rata-rata 12 % setiap tahun. Jumlah investasi meningkat dari Rp 23,511 milyar menjadi Rp 79,630 milyar.¹³ Sementara itu tercatat sekitar 59 perusahaan asuransi dengan aset sekitar Rp 1,6 triliun.¹⁴

Jumlah investasi sektor industri meningkat dari Rp. 2.308,40 milyar dan \$ 1,111.90 juta pada tahun 1984 menjadi Rp. 19.388,89 milyar dan \$ 4,061.53 juta pada tahun 1991.¹⁵ Dari segi penanaman modal tercatat 7.501 proyek PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 2.171 PMA (Penanaman Modal Asing) selama tahun 1967/1968 sampai dengan 1991. Jumlah investasi masing-masing sebesar Rp 188,895.9 milyar dan US \$ 48,351.4 juta (di luar sektor minyak, perbankan, asuransi dan sewa beli).¹⁶

3. KEHADIRAN AFTA.

Kebijakan AFTA dicetuskan dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN keempat yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Januari 1992 di Singapura. KTT menghasilkan tiga dokumen yaitu "Singapore Declaration of 1992" dan "Frame Work Agreement On Enhancing Asean Economic Cooperation" yang ditanda tangani masing-masing kepala pemerintahan negara anggota, serta "Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The

¹² Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI., Globalisasi dan Prospek Pariwisata Indonesia dalam dasawarsa Mendatang, Naskah Ceramah pada Mahasiswa Program MBA - eksekutif IBMJ, Jakarta, 23 Oktober 1991, hal. 6-7.

¹³ Syarizal, Banking Frauds and Abuses (An Indonesian Perspective), Makalah pada seminar Kejahatan Ekonomi : Merusak Citra Bank & Lembaga Keuangan, Hotel Indonesia Jakarta 15-16 September 1992, halaman. 1.

¹⁴ Pria Takari Utama, Antara Premi, Laba dan Pasar, Majalah InfoBank nomor 155, Jakarta, Nopember 1992, hal. 64.

¹⁵ Menteri Perindustrian RI., Ibid, lampiran 2-e.

¹⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Statistik Penanaman Modal Indonesia, Halaman. 2.

Asean Free Trade Area (AFTA)" yang ditanda tangani oleh masing-masing menteri perdagangan/industri negara anggota.

Dengan demikian kebijakan AFTA hanya sebagian dari keseluruhan kesepakatan dalam bidang politik dan ekonomi termasuk keamanan yang dicetuskan dalam KTT keempat. Dengan dilatar belakangi perubahan politik dan ekonomi internasional yang sangat besar yang telah terjadi sejak berakhirnya perang dingin dan dengan mempertimbangkan implikasinya bagi ASEAN, maka para kepala pemerintahan negara anggota ASEAN, menyatakan -antara lain- bahwa :

ASEAN shall move towards a higher plan of political and economic cooperation to secure regional peace and prosperity;

*ASEAN shall constantly seek to safeguard its collective interest in response to formation of large and powerful economic groupings among the developed countries, in particular through the promotion of an open international economic regime and by stimulating economic cooperation in the region;*¹⁷

Selanjutnya dalam kerangka kerja sama ekonomi dikemukakan pula -antara lain- sebagai berikut :

- *Desiring to enhance intra-ASEAN economic cooperation to sustain the economic growth and development of all Member States which are essential to the stability and prosperity of the region;*
- *Reiterating their commitment to the principles of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as "GATT");*
- *Recognising that tariff and non-tariff barriers are impediments intra-ASEAN trade and investment flows, and the existing commitments to remove these trade barriers could be extensively improved upon;*¹⁸

Sehubungan dengan itu, Menteri Perindustrian menjelaskan :

Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 belum berhasil menciptakan suatu sistim perdagangan internasional yang bebas dari terlalu banyak hambatan

¹⁷ Singapore Declaration 1992

¹⁸ Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.

baik tarif maupun non tarif. Proteksionisme dalam berbagai bentuk masih banyak menghambat perdagangan internasional. Perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Rusia dan Eropah Timur pada umumnya, merosotnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah pengangguran di negara maju, serta perbedaan perkembangan ekonomi Utara - Selatan yang semakin besar, telah menambah rumitnya upaya penerapan sistim perdagangan internasional yang dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi dunia.¹⁹

Hal itu semua nampaknya telah semakin memberikan angin bagi tumbuhnya blok-blok perdagangan. Di samping EC (European of Community) yang masih dalam proses, telah lahir NAFTA (North America Free Trade Area) dan juga AFTA.

AFTA, sebenarnya, hanya merupakan bagian dari kerangka kerja sama ekonomi ASEAN. Sebagaimana dimaklumi bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang yaitu : perdagangan; industri, mineral dan energi; keuangan dan perbankan; pangan, pertanian dan kehutanan; perhubungan dan komunikasi; dan lain-lain. AFTA adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan, sebagaimana dinyatakan dalam Article 2 huruf A yang berbunyi : "Cooperation in Trade : 1. All Member States agree to establish and participate in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) within 15 years. A ministerial-level Council will be set up to supervise, coordinate and review the implementation of the AFTA ..."²⁰. Dengan demikian AFTA hanyalah salah satu sarana -yang tidak statis- dalam rangka mewujudkan kawasan ASEAN yang stabil, damai dan sejahtera.

Di samping terhembus oleh konsep regionalisasi dan kegagalan Putaran Uruguay serta perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia, kehadiran AFTA juga dilatar belakangi kurang-berhasilnya beberapa bentuk kerja sama ekonomi intra Asean sebelumnya. Skema yang sudah berjalan adalah melalui ASEAN-PTA (Preferential Trade Arrangement) dan ASEAN Industrial Joint Venture. Karena itu, Frame Work Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation merupakan perjanjian induk yang memayungi semua upaya peningkatan kerja sama ekonomi, baik intra-ASEAN maupun ekstra- ASEAN, termasuk terhadap skema-skema yang sudah

¹⁹ Menteri Perdagangan RI., Sambutan Pada Pemasarakatan Hasil KTT ASEAN IV Tingkat Eselon I Pusat, Jakarta, 17 Juni 1992.

²⁰ Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.

berjalan maupun yang akan datang.

Konsep Perdagangan Bebas. Kebijakan AFTA bertolak dari konsep perdagangan internasional -atau dengan sebutan lain : perdagangan antar bangsa, perdagangan luar negeri, dan lain lain. Dalam konsep perdagangan internasional dikenal adanya dua pendekatan yaitu merkantilis atau proteksi dan perdagangan bebas (Free Trade). Pendekatan Merkantilis atau proteksi juga disebut pendekatan dengan kebijakan komersil.

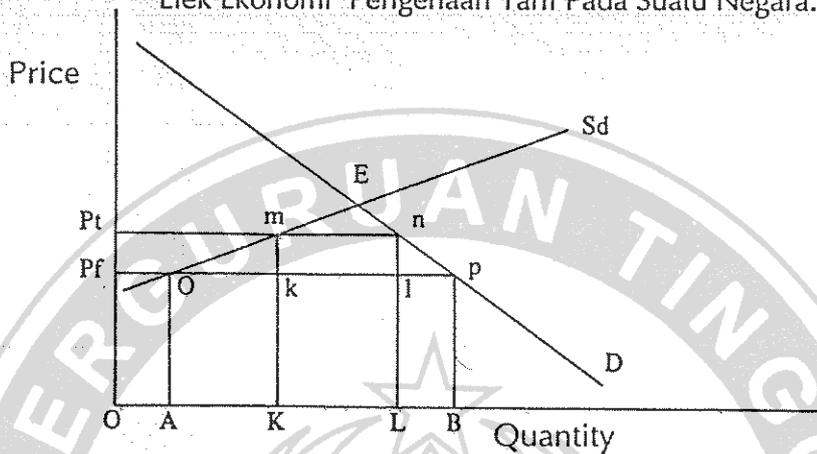
Alasan terjadinya perdagangan internasional, secara rasional, pertama kali dikemukakan Adam Smith (1776) dengan teori "absolute advantage" (keunggulan absolut/mutlak). Konsep tersebut dikoreksi oleh David Ricardo (1817) dengan teori "comparative advantage" (keunggulan komparatif/perbandingan). Teori Ricardo kemudian disempurnakan lagi oleh Eli Heckschler dan Bertil Ohlin yang mendasarkan pada perbandingan faktor produksi yang berlimpah dan yang langka. Tetapi karena pendekatannya yang hanya "two-ness analysis" (membandingkan dua negara saja) dan hanya memperhitungkan aspek "supply" dan faktor tenaga kerja dan modal saja, maka Leontief menyempurnakan preposisi Heckschler - Ohlin, antara lain dengan memperhitungkan faktor tanah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia (pengetahuan/ketrampilan) serta aspek "demand". Secara lebih rinci uraian mengenai konsep perdagangan bebas termasuk dalam kaitannya dengan konsep globalisasi dan regionalisasi dituangkan tersendiri pada *Lampiran II*.

Efek Ekonomi Pengenaan Tarif dan Kuota. Holley Ulbrich²¹ menjelaskan bahwa walaupun manfaat efisiensi dari perdagangan bebas dapat ditunjukkan, sebagian besar negara menggunakan tarif, kuota, dan/atau penghalang non- tarif lainnya untuk membatasi aliran barang dari satu negara ke negara lainnya. Tarif adalah sejenis pajak bea masuk atau pajak impor. Tarif dapat ditentukan secara spesifik (misalnya 50 sen perlusin, satu dolar perton) atau secara "ad valorem" (menurut perbandingan nilai barang, misalnya 10 % atas barang impor tertentu), atau bahkan berganda (angka spesifik di tambah angka advalorem). Tarif pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan pendapatan umum pemerintah, dengan sasaran

²¹ Holley Ulbrich, *International Trade & Finance : Theory and Policy*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1983, hal. 133.

untuk mengurangi kemampuan produsen luar negeri dalam bersaing secara efektif terhadap produk dalam negeri sejenis.

(Gambar 1)
Efek Ekonomi Pengenaan Tarif Pada Suatu Negara.



Sebelum pengenaan tarif, negara ini menghasilkan sejumlah OA pada kurva supply domestik S_d dan -dengan asumsi tidak ada biaya pengangkutan dan kompetisi sempurna- menjualnya seharga P_f, yaitu harga pasar dunia. Para konsumen membeli sejumlah OB barang di mana OA menggambarkan barang produksi domestik dan AB barang impor.

Bila kebijakan tarif diberlakukan maka harga barang di negara ini -price taker (tidak mampu mempengaruhi harga pasar dunia)- akan naik ke titik P_t sesuai besarnya tarif. Produksi domestik akan memperbesar supply ke OK, konsumsi akan merosot ke OL, dan impor menurun ke KL. Pemerintah menerima sejumlah klmn.

Keadaan tersebut dapat diringkas dengan *Tabel 7* berikut ini :

Tabel 7.
Efek Ekonomi Pengenaan Tarif

	Sebelum Tarif	Setelah Tarif
<i>Produksi Domestik</i>	OA	OK (meningkat)
<i>Konsumsi Domestik</i>	OB	OL (menurun)
<i>Harga</i>	Pf	PT (meningkat)
<i>Impor</i>	AB	KL (menurun)
<i>Pendapatan Tarif</i>	-	klmn (meningkat)
<i>Efficiency effect</i>	-	kmo
<i>Dead weight loss</i>	-	lnp
<i>Protective effect</i>	-	PtPf-om

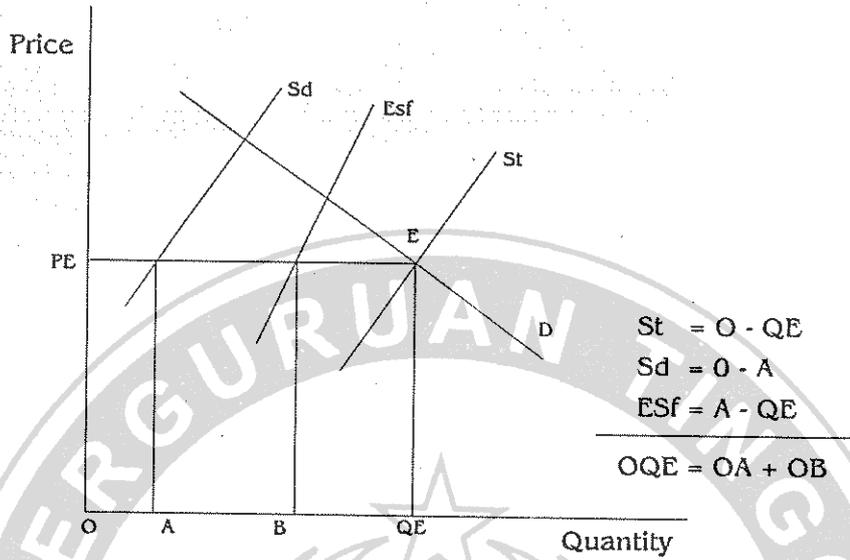
Dengan demikian keuntungan terbesar dari kebijakan tarif dinikmati oleh para pengusaha yang dilindungi (PtPf-om), sementara konsumen kehilangan peluang berbelanja sebesar lnp dan timbul gejala ketidak-efisienan sebesar kmo. Efek ekonomi dari pengenaan tarif juga berlaku dalam transaksi antar negara.²²

Oleh karena itu tarif mengurangi surplus konsumen; beberapa kerugiannya dibagikan kembali kepada industri yang sedang bersaing, atau kepada pemerintah dalam bentuk pendapatan tarif, sementara lainnya harus menanggung beban kerugian efisiensi dan bobot mati.

Kuota dimaksudkan untuk membatasi fisik atau nilai dolar terhadap volume impor komoditi tertentu. Kuota bahkan dapat digunakan secara bersama dengan tarif. Sementara tarif semakin jarang dipakai oleh negara-negara industri sejak tahun 1934, kuota menjadi pilihan favorit sebagai alat proteksi. Kuota lebih menawarkan kepastian kepada para produsen domestik yang sedang bersaing karena, tidak seperti tarif, hasilnya tidak tergantung pada tingkat elastisitas supply ekspor luar negeri.

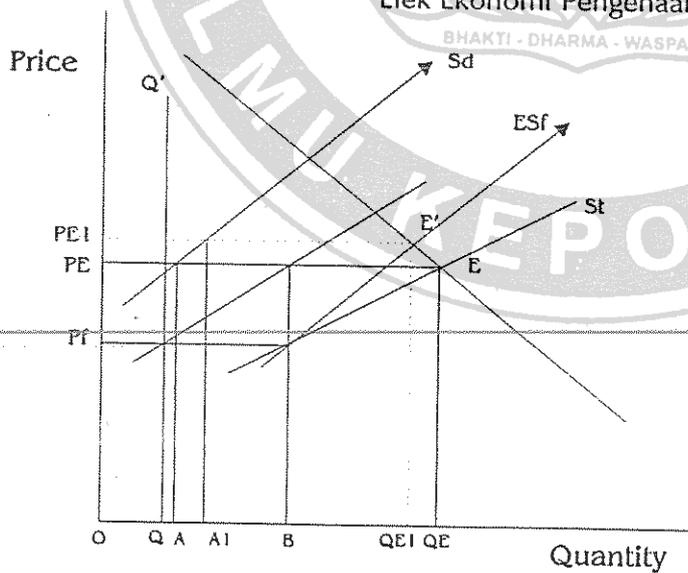
²² *Ibid*, hal 137

Gambar 2.
Ekuilibrium Sebelum Pengenaan Kuota



Sd adalah supply domestik, ESf adalah supply ekspor luar negeri, dan St adalah jumlah kuantitas yang tersedia pada berbagai pilihan harga melalui penjumlahan Sd dan ESf secara horisontal (berbeda dengan penggambaran tarif). Titik ekuilibriumnya ialah pada Pe_1, Qe , dengan produksi domestik OA dan impor OB (=AQe).

Gambar 3
Efek Ekonomi Pengenaan Kuota.



Sesudah ditentukan E' :

1. tercapai tingkat ekuilibrium baru yaitu pada tingkat harga yang lebih tinggi;
2. Tingkat domestic demand menyusut ($OQE - OQE_1$);
3. domestic supply meningkat ($OA - OA_1$)

Revenue effect tidak ada kecuali protective effect.

QQ' menggambarkan pengenaan kuota (supaya efektif harus lebih kecil dari OB). Kurva supply ekspor luar negeri sama (P_e) dan pada harga inilah kuotanya terpenuhi. Di atas harga P_e , pemasok luar negeri bersedia menawarkan lebih dari OQ, tapi mereka tidak mampu, sehingga supply ekspor luar negeri menjadi vertikal pada harga tersebut dan gabungan kurva supply (S_t) menjadi sejajar dengan S_d . Harga naik ke $P_{E'}$, konsumsi merosot dari OQ_e ke OQ_{E1} , dan produksi domestik naik ke $OA1$, sedangkan impor tetap ($OA = A1Q_{E1}$).

Dengan demikian efeknya pada kesejahteraan sama dengan yang ditimbulkan tarif kecuali keuntungan monopoli yang diraih oleh pemegang lisensi impor (menggantikan pendapatan pemerintah dari tarif dan justru menimbulkan masalah kebijakan pemberian lisensi impor). Di samping itu, kebijakan tarif akan merangsang tumbuhnya impor karena meningkatnya permintaan sedangkan kuota hanya menaikkan harga. Karena itu, para pakar ekonomi bersepakat bahwa tarif lebih baik dari kuota dalam kebanyakan kondisi. Kuota menimbulkan masalah-masalah politis/alokasi, mengundang praktek-praktek curang dalam berdagang, korupsi, pasar gelap, dan efek samping yang tidak disukai lainnya.

Kebijakan non tarif lainnya seperti pajak ekspor, pengendalian modal, pembatasan imigrasi, pembatasan pada alih teknologi, dan lain lain, pada dasarnya mengandung maksud yang sama dengan pengenaan tarif dan kuota. Karena itu, uraian mengenai perdagangan yang diproteksi dicukupkan pada penggambaran kedua alat utama tersebut. Kesemuanya hanya menimbulkan efek ekonomi yang merugikan bagi upaya perwujudan kesejahteraan. Bahkan dari segi politis kebijakan demikian hanya akan menghambat upaya perwujudan perdamaian dunia karena masing-masing negara senantiasa diliputi suasana persaingan yang tidak sehat.

Menjadi efek ekonomi juga efek politis dan lain lain- dari kebijakan komersial dalam perdagangan internasional maka negara-negara ASEAN pada dasarnya sepakat menghapuskan segala penghalang, baik tarif (tarif barrier) maupun non tarif (non tariff barriers) melalui pembentukan AFTA. Melalui kebijakan tersebut maka peranan AFTA adalah menjadikan ASEAN sebagai "regional

market" di samping -sudah barang tentu juga- sebagai "regional base" dalam rangka "global market" yang merupakan tujuan strategis. Sasaran pertama yang dituju adalah penghapusan atau pengurangan tarif yang dituangkan dalam konsep CEPT.

Konsep CEPT. Semua negara anggota ASEAN ikut serta dalam skema CEPT dengan sasaran penurunan tarif sampai 0 - 5 % dalam waktu 15 tahun terhadap produk-produk yang disepakati. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pembatasan lingkup produk (manufaktur, barang modal, hasil pertanian yang diolah, dan produk lain yang tidak termasuk definisi produk pertanian) dengan pendekatan sektoral pada tingkat 6 digit HS (Harmonized System) dan kandungan lokal 40 %. Penerapan kesepakatan tersebut dilakukan secara luwes, yaitu dengan ketentuan penurunan tarif secara bertahap, dan pemberian kesempatan kepada negara yang belum siap atas produk tertentu atau produk yang "sensitif".

CEPT secara resmi, sesuai kesepakatan, diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993 yang baru lalu.

Penanaman Modal Asing. Pada bulan Juli 1992, pemerintah menetapkan lagi kebijakan deregulasi yang dikenal dengan "Paket Deregulasi Juli 1992 (Pakjul 92)" sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17/1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Pakjul 92 meliputi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 32/1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal, Keppres nomor 33/1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal, dan Keppres nomor 34/1994 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Kelahiran Pakjul 92 dilatar-belakangi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1) upaya pencapaian sasaran investasi dalam Pelita V sebesar Rp. 231.9 triliun yang diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar 45 % dan swasta 55 %; 70 % dari swasta diharapkan bersumber dari PMA/PMDN sedangkan sisanya dari Non PMA/PMDN; dalam rangka pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % setahun;
- 2) walaupun laju pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir (1989 dan

1990) di atas 7 % setahun tetapi terjadi peningkatan impor yang cukup tajam dan yang dibayangi pula oleh perkembangan tingkat inflasi;

- 3) realisasi pertumbuhan tiap sektor ternyata tidak proporsional;
- 4) pertumbuhan industri tidak merata ke semua propinsi;
- 5) keterbatasan sumber dana dari dalam negeri yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran (1990/1991).²³

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)²⁴ menjelaskan bahwa kebijakan investasi ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa investasi harus dapat memberikan kontribusi untuk dapat memperkuat dan memperkokoh struktur industri. Karena itu, prioritas tinggi diberikan pada industri yang menghasilkan barang modal, barang setengah jadi, dan bahan baku, dengan memanfaatkan secara optimum sumber daya alam dan sumber daya manusia. Proyek-proyek yang berorientasi ekspor (Non Migas) harus didorong perkembangannya. Di samping itu, aktivitas investasi di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.

Sehubungan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi, maka pemerintah telah akan terus melakukan berbagai upaya antara lain melanjutkan deregulasi di bidang ekonomi khususnya penanaman modal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan formal/informal, mendorong pembangunan kawasan industri, pelayanan informasi pasar internasional, mendorong pendirian industri hulu, penunjang, dan penghasil barang setengah jadi, dan pengikut-sertaan swasta dalam negeri/asing dalam penyediaan prasarana.

²³ Soediono Basuki, Partisipasi Investor Asing dan Perusahaan PMA dalam Perusahaan PMDN dan Perusahaan Nasional lain, Makalah pada Seminar PP No. 17 th 1992, Keppres no 32, 33, 34 th 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19-20 Agustus 1992.

²⁴ Sanyoto Sastrowardoyo, Kepala BKPM, Deregulasi Penanaman Modal Asing Melalui PP No. 17 th 1992 dan Paket Deregulasi Juli (Pakjuli) 1992, Makalah pada seminar PP No. 17 th 1992, Keppres No 32, 33, 34 th 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19-20 Agustus 1992..

Selain mengatur penyederhanaan prosedur dan pengurangan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Pakjul 92 membuka peluang bagi 15 propinsi yang dipandang masih perlu dikembangkan terutama di kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT). Di samping itu juga diberikan berbagai keringanan pajak dan perpanjangan masa berlaku HGU dan HGB.

Oleh karena itu, walaupun bukan sebagai tindak lanjut kebijakan AFTA, Pakjul 92 khususnya penanaman modal asing, dapat merupakan langkah ekonomi yang akan mendorong keberhasilan Indonesia dalam kerangka AFTA. Dengan berdirinya fasilitas produksi barang modal, barang setengah jadi dan bahan baku (industri hulu), dari dalam negeri diharapkan sekaligus dapat menekan biaya produksi termasuk bagi industri hilir sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia baik dalam pasar domestik maupun regional bahkan global.

4. KEBUTUHAN SEKURITI.

Abraham Maslow, pakar psikologi yang banyak menulis tentang kebutuhan manusia, mengklasifikan kebutuhan manusia ke dalam lima hirarkhi.

- 1) Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang meliputi pangan, sandang dan papan (physiological needs).
 - 2) Kebutuhan akan jaminan sekuriti (security needs).
 - 3) Kebutuhan sosial, yaitu keinginan secara naruliah untuk hidup berkelompok (social needs).
 - 4) Kebutuhan yang bersifat pengakuan dan penghargaan (esteem needs).²⁵
 - 5) Kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri (actualization needs).
- Seringkali terjadi perbedaan persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekuriti. Biasanya hanya dikaitkan dengan keamanan yang bersifat fisik, yaitu jiwa, tubuh, kehormatan, dan harta benda. Lebih dari itu sekuriti

²⁵ Awaloedin, *Keterampilan Management dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bahan Kuliah "Organization Strategy & Human Resources Management", pada Batch IV-0 Program Studi MBA-IBMJ, Jakarta 1992, hal 5.

juga mencakup pengertian non-fisik. Misalnya, orang menabung guna meletakkan jaminan bagi kemungkinan kesengsaraan di waktu kemudian atau untuk jaminan hari tua. Program asuransi merupakan perwujudan dari kebutuhan kepastian pemulihan kerugian. Seorang pengusaha, misalnya, menginginkan kepastian dan ketenteraman berusaha dan jaminan tidak akan diganggu. Karena itu, -lihat definisi- sekuriti mengandung pengertian yang luas.

Kerugian timbul karena adanya gangguan yang sesungguhnya bersumber dari bahaya. baik dari alam termasuk sumber daya buatan, maupun dari manusia itu sendiri. Yang bersumber dari alam misalnya tanah longsor, banjir, gunung meletus, kebakaran karena proses kimiawi (alam mati) dan ledakan pabrik, gedung roboh (sumber daya buatan) serta binatang buas, wabah penyakit (alam hidup), dan lain lain. Bahaya yang bersumber dari alam biasanya disebut bencana alam atau wabah. Yang bersumber dari manusia, dapat berasal dari orang lain, baik perorangan maupun kelompok, tetapi juga dari dirinya sendiri.

Untuk mencegah bahaya -yang bersumber dari manusia- dan menjamin sekuriti diadakanlah norma dan peraturan-peraturan. Walau demikian tetap saja terjadi gangguan, karena manusia di samping hidup dalam suasana kerja sama juga antagonistik. "Dalam proses sosial dapatlah kita membedakan antara dua kekuatan dasar yang bertentangan, yang satu mendekatkan satu sama lain, dan yang kedua menjauhkan atau memisahkan satu sama lain. Yang satu bersifat sentrifugal dan yang lain bersifat sentripetal".²⁶ Bentrokan atau pertentangan terjadi karena perbedaan kepentingan atau keterbatasan fasilitas yang dihadapkan pada tuntutan kebutuhan yang tak terbatas.

Dalam keadaan demikian, negara, sebagai asosiasi atau organisasi pergaulan hidup yang tertinggi, pada umumnya mengadakan salah satu fungsi untuk mencegah/menolak bahaya dan menegakkan norma/aturan dalam rangka menjamin ketertiban, yaitu kepolisian. Kehadiran polisi tidak lalu berarti mengambil alih segenap lingkup fungsi tersebut melainkan terbatas pada kepentingan umum yang menyeluruh dan memerlukan tindakan yang bersifat memaksa. Yang

²⁶ J.B.A.F. Mayor Polak, Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta 1976, hal 185.



menyangkut kepentingan lokal atau suatu kelompok tertentu, kecuali upaya paksa, biasanya diserahkan kepada kelompok yang bersangkutan; bahkan setiap orang dituntut untuk menjadi "polisi" bagi dirinya sendiri.

Dapatlah dikatakan bahwa yang pertama adalah "sekuriti fungsional" dan yang lainnya adalah "sekuriti swakarsa". Sekuriti swakarsa dapat dibedakan lagi (salah satu model pengelompokan dengan mengacu pada keadaan di Indonesia). Pertama, dilaksanakan secara bersama atas dasar tanggung jawab bersama, seperti ronda kampung dan patroli keamanan sekolah. Kedua, dilaksanakan oleh tenaga tertentu atas dasar tanggung jawab manajemen dari suatu badan/organisasi yang bersangkutan; ada badan/instansi pemerintah non-fungsional keamanan dan ada organisasi/badan usaha swasta. Yang terakhir ini juga disebut "private security" yang telah mengarah pada suatu profesi tersendiri; tercermin dari buku-buku yang dipublikasikan dan pendidikan yang diselenggarakan terutama di Amerika Serikat dan Australia. "Private Security" pada umumnya menyangkut "Business Security" dan "Industrial Security".

Tabel 8.

Perkembangan Jumlah Anggota Satpam di Seluruh Indonesia tahun 1988-1991

Tahun	Jumlah
1988	106052
1989	117501
1990	131045
1991	134668

Sumber : Dispullahta Polri (Polri dalam angkatan 1990/ 1991 & 1991/ 1992)

Di Indonesia, "private security" pada umumnya diperankan oleh Satuan Pengamanan (Satpam). Hampir setiap perusahaan termasuk instansi pemerintah non fungsional keamanan mengadakan Satpam dengan sifat tugas yang masih dititik beratkan pada tugas pengamanan fisik. Pada *tabel 8* tercantum data perkembangan jumlah Satpam di seluruh Indonesia. Di samping Satpam ada juga perusahaan yang mengadakan tenaga Chief Security. Sebagian di antaranya bahkan mengadakan jabatan Manajer Sekuriti.

Belajar Dari Pengalaman Amerika Serikat.

*In February 1972, the Bureau of Domestic Commerce published a preliminary staff report entitled The Economic Impact of Crimes Against Business, indicating that the 1971 national cost of crime to American business was conservatively estimated to \$ 15.7 billion. The estimate reached \$ 20.6 billion for 1974.*²⁷

Lebih lanjut Post mengemukakan bahwa pada akhirnya segala kerugian dibebankan kepada konsumen, baik dalam bentuk harga yang lebih tinggi maupun diperhitungkan ke dalam pos biaya, yang pada akhirnya berakibat merendahnya profit. Dari jumlah kerugian tersebut saja, biaya perkapita mencapai US \$ 137.

Kerugian tersebut berkenaan kejahatan biasa yang meliputi pencurian dengan pemberatan (burglary), pencurian dengan kekerasan (robbery), pengrusakan (vandalism), pencurian di toko/pasar swalayan (shoplifting), pencurian oleh karyawan (employee theft), check kosong (bad checks), kartu kredit palsu (credit card fraud), dan kebakaran (arson). Perusahaan yang menjadi korban adalah toko eceran/pasar swalayan (retailing), industri olahan (manufacturing), pedagang besar/grosir (wholesaling), pelayanan (services), dan transportasi. Data rinci tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9.

Estimated Costs of 'ordinary' Crime by sector of Business 1971, 1973&1974 (billions of dollars)

Sectors of Business	1971	1973	1974
Retailing	4.8	5.2	5.8
Manufacturing	1.8	2.6	2.8
Wholesaling	1.4	1.8	2.1
Services	2.7	3.2	3.5
Transportation	1.5	1.7	1.9
Arson	0.2	0.3	0.3
Preventive Measures	3.3	3.5	3.9
	15.7	18.3	20.3

²⁷ Richard S. Post dan Arthur A. Kingsbury, *Security Administration - An Introduction*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield Illinois, 1977, hal 230.

Sementara kejahatan lain seperti "organized crime", pembajakan pesawat, dan penggelapan/korupsi belum diperhitungkan. Belum lagi jika "biaya kejahatan" (cost of crime) tersebut ditambahkan dengan biaya penyelidikan dan penegakan hukum. Sayang, data semacam itu belum tersedia di negara kita.

Menyadari betapa besar risiko bisnis akibat kejahatan dan kerugian lainnya (crime and losses), di Amerika Serikat diselenggarakan berbagai macam bentuk pendidikan dan pengembangan sekuriti, mulai dari penataran/kursus sampai tingkat universitas (postgraduate). Pada tahun 1975 terdapat 1.245 program pada 664 lembaga pendidikan. Untuk jenjang pendidikan tinggi tercatat 113 program sementara pada tahun 1972 hanya ada 24 program.

Gambaran mengenai keadaan pendidikan tersebut nyatanya juga kurang menggembirakan. Dari hasil suatu penelitian (Rand Study) menyimpulkan bahwa 65 % "Satpam" yang diteliti ternyata tanpa pendidikan dasar, 7 % dengan kursus 8 jam atau lebih. Semula juga terdapat gejala yang melecehkan faktor pendidikan khusus kecuali melalui pendidikan kepolisian yang dipandang berkualitas rendah. Tetapi kemudian setelah adanya penelitian (Rand Report) tahun 1971 keadaan mulai berubah dengan terbentuknya berbagai macam lembaga pendidikan sekuriti swasta (private protective personnel).

5. TINJAUAN ASPEK LEGALITAS.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus bersandar pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya. Berkenaan dengan itu maka ada beberapa peraturan perlu diketahui yaitu Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Petikan atas beberapa ketentuan yang berkenaan dengan pembentukan lembaga pendidikan dari peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan pada *Lampiran III*.

Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan

pendidikan nasional, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan jalur sekolah yang lazim disebut perguruan swasta dilakukan oleh suatu badan yang bersifat sosial, sedangkan untuk jalur luar sekolah dapat pula oleh perorangan.

Persoalannya adalah bagaimana bentuk program pendidikan yang dipandang tepat dari sudut "vision" pemrakarsa dan "feasible" dalam penyelenggaraannya. Apakah berupa : kursus, diploma, gelar, atau ketiga-tiganya.

- 1) Kursus termasuk jalur luar sekolah; proses perizinannya ada yang dalam kewenangan Departemen Tenaga Kerja dengan persyaratan yang relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan yang dalam lingkup kewenangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Program diploma dan gelar termasuk jalur sekolah dalam satuan pendidikan yang disebut perguruan tinggi; dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 3) Bentuk lembaga pendidikan yang memungkinkan untuk menyelenggarakan ketiga program tersebut adalah sekolah tinggi, institut, atau universitas, sedangkan akademi dan politeknik hanya berupa program diploma dan kursus.

Untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut maka terlebih dahulu harus ditetapkan pangsa "pasar" dari jasa yang akan ditawarkan. Penentuan pangsa "pasar" tidak terlepas dari "vision" pemrakarsa.

- 1) Jika "vision" pemrakarsa dilandasi keinginan untuk ikut memecahkan masalah nasional dalam bidang pendidikan khususnya keterbatasan sarana pendidikan tinggi yang dikaitkan dengan masalah lapangan kerja maka pangsa "pasar"nya adalah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Dalam hal ini program yang dipandang lebih tepat adalah program diploma atau gelar, tanpa menutup kemungkinan membuka program kursus yang bersifat "pre service training".
- 2) Jika pemrakarsa hanya ingin ikut memecahkan masalah pengembangan

sumber daya manusia khususnya peningkatan produktivitas maka pangsa "pasar"nya adalah para karyawan. Dalam hal ini program yang dipandang lebih tepat adalah kursus yang bersifat "in-service training", karena nampaknya kecil kemungkinannya keikutsertaan karyawan dalam program diploma atau gelar.

Tetapi jika pemrakarsa ingin ikut serta memecahkan kedua masalah tersebut sekaligus maka pangsa "pasar"nya akan mencakup baik lulusan SMTA maupun karyawan. Dalam hal ini program yang dipandang tepat adalah ketiga-tiganya, yaitu kursus, diploma dan gelar. Dan satuan pendidikan yang dipandang lebih tepat adalah perguruan tinggi karena memungkinkan untuk menyelenggarakan ketiga program tersebut sekaligus.

Penelitian ini mengasumsikan kemungkinan yang ketiga dengan fokus pangsa "pasar" adalah lulusan SMTA, sedangkan karyawan -untuk sementara- ditempatkan sebagai "konsumen" marginal. Dengan demikian konsep satuan pendidikan yang ditawarkan adalah perguruan tinggi dengan program diploma/gelar sebagai program utama, tanpa menutup kemungkinan penyelenggaraan kursus sebagai program tambahan. Selanjutnya masalah bentuk perguruan tinggi yang dipandang lebih tepat akan ditelaah dalam bab berikutnya.

Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa. Aspek legalitas lain yang perlu dipertimbangkan pula adalah kebijakan keamanan mengingat bahwa gagasan ini menyangkut pendidikan dalam bidang keamanan. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya nomor : II/MPR/1988 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan arah dan strategi pembangunan bidang pertahanan keamanan antara lain sebagai berikut :

Pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Panglima Angkatan Bersenjata RI pada upacara Hari Bhayangkara ke-46 tanggal 1 Juli 1992, antara lain menegaskan :

Upaya pembinaan Kamtibmas, pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan masyarakat. Untuk itu, konsep pembinaan diarahkan dan dikembangkan dalam bentuk Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara swakarsa, yang menuntut partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan Siskamtibmas Swakarsa dalam lingkungan industri/perusahaan, maka sejak tahun 1980 telah diresmikan pembentukan Satpam pada setiap perusahaan (Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/126/XII/1980). Tetapi kemudian semakin dirasakan bahwa hanya dengan peranan Satpam saja pengelolaan sekuriti pada setiap perusahaan masih dipandang kurang memenuhi harapan. Karena itu garis pembinaan Polri lebih diarahkan pada peranan Manajer Sekuriti masing-masing perusahaan. Sehubungan dengan itu pula, atas prakarsa Kapolri, telah dibentuk Asosiasi Profesi Sekuriti Swakarsa Indonesia (APSSI).

Dengan keterbatasan kekuatan Polri, dengan rasio penduduk sekitar 1 : 1.100, maka pengembangan sekuriti swakarsa khususnya "private security" sudah barang tentu akan terus ditingkatkan. Untuk kepentingan penyediaan tenaga dimaksud maka peranan lembaga pendidikan dapat membantu memecahkan masalah dimaksud.

BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

DAN KONSEP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian prediktif. Maksudnya adalah mencari pengetahuan atau informasi mengenai sesuatu masalah pada masa mendatang berdasarkan data masa sekarang dan masa lalu. Dalam hal ini adalah masalah prospek usaha pelayanan jasa sekuriti khususnya kelaikan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti.

Sebagaimana telah diutarakan pada bab pendahuluan bahwa untuk memecahkan pokok permasalahan tersebut terlebih dahulu perlu menjawab beberapa pokok persoalan. Pertama mengenai gambaran keadaan pasar dewasa ini, baik dilihat dari sudut "demand" calon pemakai/konsumen "produk" maupun "supply" atau minat calon peserta. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Di antara berbagai teknik pengumpulan data, maka untuk keperluan ini digunakan dengan teknik angket.

Penelitian "Demand". Penelitian "demand" pada dasarnya ditujukan kepada perusahaan sebagai calon "user", karena misinya yang mengejar profit dan sekaligus mencegah kerugian. Tetapi nampaknya tidak semua perusahaan memerlukan perangkat manajemen tersendiri bagi pengelolaan sekuriti; kecuali perusahaan menengah ke atas. Karena itu, pangsa "pasar" (konsumen) hasil didik yang sekaligus sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan menengah ke atas yang dalam hal ini sementara dibatasi pada perusahaan industri (pengolahan) yang berjumlah -lihat bab II- sekitar 30.000 perusahaan. Termasuk pula di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan -pembiayaan- serta perusahaan jasa (perhotelan) dan perusahaan perdagangan khususnya "retailer" di Indonesia.

Dari segi lokasi, populasi dibatasi pada perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Namun tidak berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sah untuk

memberikan gambaran mengenai keadaan seluruh Indonesia karena pada dasarnya tidak ada perbedaan pengolahan sekuriti antara perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan di luar Jakarta. Terhadap perusahaan tersebut dipilih secara random sebanyak 50 perusahaan sebagai "sample" penelitian, yang terdiri atas perusahaan manufaktur (25), perbankan/pembiayaan (10), perhotelan (10), dan perdagangan/retailer (5).

Angket terhadap perusahaan (model M-1) disusun sebagaimana contoh pada lampiran IV yang diawali dengan pemberian penjelasan baik mengenai maksud maupun substansi penelitian. Di samping pertanyaan-pertanyaan mengenai minat untuk mengkonsumsi hasil pendidikan juga diajukan pertanyaan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sekuriti yang berjalan serta data umum mengenai identitas perusahaan. Beberapa informasi yang ingin dijangkau melalui angket tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan manajemen sekuriti yang meliputi :
 - a) gambaran mengenai gangguan atau kerugian yang pernah dialami (pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3);
 - b) gambaran mengenai penerapan sistem sekuriti (pertanyaan nomor 4 sampai dengan 11);
 - c) keadaan mengenai perangkat manajemen sekuriti (pertanyaan nomor 12 sampai dengan 13);
 - d) kemampuan serta latar belakang pendidikan dan pengalaman manajer sekuriti (pertanyaan nomor 15 sampai dengan nomor 22);
- 2) keinginan (want) dan kebutuhan (need) atau minat responden untuk meng"konsumsi" hasil didik yang direncanakan :
 - a) tanggapan responden terhadap gagasan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti (pertanyaan nomor 24 sampai dengan 25 b);
 - b) kemampuan/ketrampilan yang diharapkan dari hasil didik (pertanyaan nomor 14, 23, dan 26 sampai dengan 27);
 - c) minat responden untuk mempertimbangkan penerimaan (seleksi) hasil didik, baik untuk keperluan tenaga sekuriti maupun karyawan lain yang berwawasan sekuriti (pertanyaan nomor 25 c dan 28).

Informasi yang diperoleh dari data empiris di atas - secara induktif- akan dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan dalam bab II. Dalam hal ini dikaitkan dengan tinjauan filosofis/psikologis dari aspek teoritis secara deduktif yakni yang berkenaan dengan teori kebutuhan sekuriti.

Penelitian "Supply". Penelitian "Supply" atau Minat Calon Peserta ditujukan terhadap para anggota Satpam lulusan SMTA (model M-2) serta para siswa kelas III SMTA dan pencari kerja lulusan SMTA (model M-3). Dengan demikian pangsa "pasar" pemasok pendidikan adalah para pemuda termasuk anggota Satpam lulusan SMTA yang sekaligus merupakan populasi dalam penelitian ini. Seperti halnya calon "konsumen" maka populasi sementara dibatasi di wilayah DKI Jakarta.

Pemilihan responden, sebagai "sample" penelitian, diatur sebagai berikut :

- 1) 15 SMTA masing-masing 9 SMA, 3 SMEA, dan 3 STM, campuran negeri dan swasta, serta dengan memperhatikan aspek kredibilitas masing-masing sekolah; campuran antara yang dipandang tergolong bermutu baik dan kurang baik;
- 2) kepada setiap sekolah diberikan 20 angket untuk diisi oleh siswa kelas III yang dipilih secara acak oleh masing-masing sekolah, dengan catatan jumlah responden wanita maksimal 5 orang;
- 3) 20 responden di antara pencari kerja lulusan SMTA yang terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta. Pemilihannya juga dilakukan secara acak;
- 4) 100 responden anggota Satpam lulusan SMTA, yaitu masing-masing dua orang dari setiap perusahaan responden penelitian "demand"; pemilihan dilakukan secara acak oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian jumlah responden adalah 420 orang.

Contoh angket tercantum pada lampiran IV yang terdiri atas model M-2 untuk anggota Satpam dan M-3 untuk siswa III SMTA dan pencari kerja lulusan SMTA.

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

- 1) tanggapan responden atas gagasan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti (pertanyaan nomor 1);
- 2) minat calon peserta untuk mengikuti pendidikan (pertanyaan nomor 2);
- 3) bentuk program pendidikan yang disarankan (pertanyaan nomor 3 dan 4).

Penelitian Prospek. Untuk menjawab persoalan mengenai prospek "marketing" di masa mendatang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Gambaran mengenai prospek pemasaran di masa mendatang berkaitan dengan informasi mengenai kecenderungan perkembangan kejahatan atau gangguan keamanan lainnya. Dalam hal ini dikaitkan pula dengan proyeksi pertumbuhan industri/ekonomi khususnya bisnis termasuk sebagai akibat pengaruh pemberlakuan kebijakan AFTA, sebagaimana datanya pada bab II Pemecahan persoalan tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Studi Kelaikan. Selanjutnya, untuk membuktikan hipotesa kerja yang terakhir yaitu mengenai kelaikan pembentukan lembaga pendidikan, maka penelaahan akan dilakukan dari aspek legalitas, aspek keuangan dan aspek sosial - ekonomi. Telaahan aspek legalitas dilakukan melalui penelitian kepustakaan/dokumentasi, sebagaimana datanya telah disajikan pada bab II. Di samping itu juga dilakukan wawancara dengan pejabat yang berkompeten.

Telaahan dari aspek keuangan dan sosial-ekonomi (cost and benefit analysis) terlebih dahulu membutuhkan konsep kelembagaan, manajemen dan operasi penyelenggaraan pendidikan; konsep dimaksud akan diuji "profitabilitas" dan benfiditas. Telaahan dari berbagai aspek tersebut di atas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Untuk keperluan penelaahan dari aspek keuangan dibutuhkan sejumlah data mengenai harga sesuatu material atau fasilitas, biaya, upah, dan lain lain. Data dimaksud dikumpulkan dengan teknik wawancara atau pemeriksaan brosur mengenai penawaran barang atau pekerjaan. Di samping itu, guna penyusunan konsep penyelenggaraan pendidikan diperlukan data, baik berupa prinsip- prinsip teoritis maupun pengalaman praktek lembaga pendidikan serupa. Data demikian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan.

2. HASIL PENELITIAN LAPANGAN ASPEK PASAR.

Jumlah angket yang terisi dan diterima kembali dari responden adalah sebagai berikut :

- 1) 36 angket (90%) penelitian "demand" dari perusahaan, yang terdiri atas 18 manufaktur, 8 perhotelan, 6 perbankan/keuangan, 4 perdagangan/jasa;
- 2) 351 angket (83,6%) penelitian minat yang terdiri atas 291 dari siswa SMTA, 20 dari pencari kerja dan 40 dari anggota Satpam; kesemuanya meliputi 228 pria (65 %) dan 123 wanita.

Setelah direkapitulasi, keseluruhan jawaban responden dilaporkan berikut ini. Jawaban dimaksud dikelompokkan menjadi tiga topik yaitu kondisi awal penyelenggaraan sekuriti, tanggapan perusahaan, dan minat calon peserta.

Kondisi Awal Penyelenggaraan Sekuriti. Lebih dari 61 % Responden menyatakan pernah mengalami kerugian karena gangguan dari luar perusahaan dan dari karyawan sendiri serta karena kurang-tepatan dalam mempertimbangkan akibat/dampak suatu keputusan.

Lebih dari 55 % Responden menyatakan bahwa sistem sekuritinya belum terjamin sepenuhnya, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai seluk beluk asuransi. Tetapi berkenaan dengan konsep perlindungan informasi, instalasi komputer dan sekuriti personil pada umumnya sudah mengembangkannya; hanya sekitar 30 % yang belum menerapkannya.

Di samping kepala/komandan Satpam, 77 % perusahaan memiliki "Chief/Manager" sekuriti, bahkan yang lain akan mengembangkan/ mengadakan jabatan dimaksud.

Walaupun sebagian besar (83,3 %) pimpinan sekuriti hanya berlatar belakang pendidikan penataran/kursus (sebelum maupun setelah menjadi karyawan) tetapi lebih dari 55 % telah dipandang mampu mengelola sistem sekuriti masing-masing perusahaannya :

- 1) 72 % memahami tugas-tugas sekuriti dengan baik;
- 2) 55 % mampu mememanajemi sekuriti dengan baik;

3) 44 % memahami fungsi-fungsi bisnis dengan baik.

38,9 % di antara mereka berasal dari Polri, dan 11,1 % dari TNI.

Tanggapan Perusahaan. Pada umumnya, responden mendukung gagasan menyelenggarakan pendidikan manajemen sekuriti; 77,7 % menghendaki pendidikan sebelum menjadi karyawan dan berminat menyeleksi lulusannya jika lowongan tersedia. 50 % mendukung konsep dengan program diploma dan yang lainnya mengusulkan program kursus.

Kemampuan/ketrampilan sebagai "out put" pendidikan yang ditawarkan pada umumnya dapat di terima. Seluruh responden mengaitkan pekerjaan sekuriti dengan fungsi personalia, dan 50 % di antaranya juga mengaitkannya dengan fungsi R & D (Litbang). 83,3 % responden sependapat untuk mempertimbangkan kebutuhan karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas (pencegahan kerugian).

Minat Calon Peserta. 95,8 % responden pelajar/pencari kerja dan 85 % responden anggota Satpam mendukung gagasan penyelenggaraan pendidikan ini.

Dari kalangan pelajar/pencari kerja, 37 % menyatakan berminat dan 47,9 % menyatakan masih pikir-pikir dulu untuk mengikuti program ini. Sedangkan responden Satpam 90 % berminat; 65 % di antaranya jika ditugas-belajarkan dan 30 % asal diijinkan oleh perusahaan.

Jenis pendidikan yang disarankan responden adalah program diploma (42,9 %); 21,3 % pelajar mengusulkan program gelar dan sisanya menghendaki kursus.

Selanjutnya hasil penelitian wawancara dan studi kepustakaan lainnya disajikan dalam teks pada kesempatan pembahasan masalah yang berkaitan.

3. KONSEP KELEMBAGAAN.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa satuan pendidikan yang sebaiknya didirikan adalah perguruan tinggi. Persoalannya adalah mengenai bentuk kelembagaannya. Universitas, jelas tidak mungkin karena obyek studi yang akan diselenggarakan dibatasi pada salah satu disiplin ilmu pengetahuan, yaitu manajemen sekuriti. Demikian pula halnya dengan politeknik dan akademi karena tidak mungkin menyelenggarakan program gelar. Kemungkinannya tinggal institut

atau sekolah tinggi.

- 1) Institut, mempersyaratkan satu kelompok disiplin ilmu pengetahuan, di samping persyaratan sumber dana yang besar dan kualifikasi tenaga akademik yang tinggi. Belum lagi kalau pihak Depdikbud mempersoalkan disiplin ilmu; artinya manajemen sekuriti termasuk disiplin mana, apakah hukum, ekonomi, atau teknologi, dan bagaimana pengelompokkannya.²⁸
- 2) Sekolah Tinggi, nampaknya lebih memungkinkan karena obyek studi yang akan diajarkan berkenaan dengan satu disiplin ilmu tertentu, dan dapat menyelenggarakan program gelar dan/atau program diploma saja;

Dari hasil wawancara, pihak Depdikbud menyarankan dalam bentuk akademi, dengan kemungkinan :

- 1) bisa menyelenggarakan program D I saja dulu;
- 2) bisa juga menyelenggarakan kursus-kursus (perijinan tersendiri);
- 3) bisa dikembangkan/ ditingkatkan menjadi sekolah tinggi (kalau institut harus mengenai sekelompok disiplin ilmu tertentu).

Pemikiran demikian dapat dimaklumi karena biasanya Depdikbud mempersoalkan pengakuan sesuatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, seperti dialami Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).²⁹ Tetapi dengan memberikan penjelasan dan menunjukkan sejumlah referensi tentang substansi maupun penyelenggaraan pendidikan dan organisasi profesi terutama di negara-negara maju pada akhirnya juga dapat diterima.

Pemilihan alternatif tersebut tidak demikian penting untuk didiskusikan lebih mendalam karena pada akhirnya, jika gagasan ini sudah akan diwujudkan, sangat ditentukan oleh komitmen pihak Depdikbud sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan persetujuan pembentukan suatu lembaga pendidikan.

²⁸ Wawancara dengan Staf Direktur Perguruan Tinggi Swasta Ditjen Dikti Depdikbud, tanggal 1 Desember 1992.

²⁹ Pengalaman sebagai Sekretaris Tim Asistensi Panitia Bersama Depdikbud - Polri dalam rangka pengkajian status PTIK tahun 1980 dan mengikuti sarasehan pengkajian status PTIK tahun 1992.

Tetapi berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini menggunakan model sekolah tinggi. Selengkapnya dinamakan "Sekolah Tinggi Manajemen Sekuriti Indonesia" sementara disingkat "Stimsi"; tanpa menutup kemungkinan dengan nama lain, misalnya "Sekolah Tinggi Sekuriti".

Berdasarkan PP nomor 30/1990, yang beberapa kutipan ketentuannya dituangkan pada Lampiran III, maka, sebagai suatu sekolah tinggi, organisasi Stimsi seharusnya terdiri atas sebagai berikut :

- 1) unsur pimpinan : Ketua dan tiga orang Pembantu Ketua masing-masing untuk bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan;
- 2) Senat Sekolah Tinggi yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Stimsi;
- 3) unsur pelaksana akademik yang meliputi :
 - a) jurusan; sekurang-kurangnya dua jurusan yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Jurusan dan dibantu Sekretaris Jurusan;
 - b) Pusat Penelitian yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang staf;
 - c) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang staf;
 - d) Studio Peralatan Sekuriti yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang staf;
 - e) kelompok dosen.
- 4) unsur pelaksana administratif yang terdiri atas Bagian Administrasi Akademik, Bagian Pembinaan Kemahasiswaan, dan Bagian Administrasi Umum, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang staf;
- 5) unsur penunjang yang terdiri atas Perpustakaan, dan Pusat Komputer, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang staf.³⁰

³⁰ Bagian Ketiga, pasal 57 sampai dengan pasal 69, PP nomor : 30/ 1990.

Konsep struktur organisasi Stimsi tercantum pada Lampiran VI. Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Stimsi dituangkan dalam statuta yang ditetapkan oleh badan penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini, pemrakarsa harus terlebih dahulu membentuk suatu yayasan atau badan yang bersifat sosial, sebagai penyelenggara pendidikan.³¹

4. KONSEP PROGRAM DAN OPERASI PENDIDIKAN.

Dengan mempertimbangkan aspek pangsa "pasar" yang dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan, maka Stimsi disarankan menyelenggarakan program-program sebagai berikut :

- 1) program diploma dan program gelar, sebagai program utama;
- 2) program kursus yang dapat berupa kursus, penataran, loka karya dan/atau simposium, sebagai program tambahan.

Program Diploma dan Gelar. Program diploma dan program gelar dirancang sedemikian rupa sehingga merupakan proses yang bertahap dan berlanjut. Maksudnya bahwa pada tahap awal semua peserta mengikuti program diploma (D-I), kemudian yang berminat dapat mengikuti lagi program akademi (D-II sampai D-III), dan akhirnya melalui proses transfer akademik dapat mengikuti lagi program gelar (S-1).

Program D I diarahkan untuk menghasilkan keluaran dengan kemampuan sebagai tenaga pimpinan Satpam berkekuatan sekitar 10 orang, atau populer dengan istilah komandan regu. Peserta pendidikan adalah pemuda berusia sekitar 18 - 22 tahun termasuk karyawan/anggota Satpam berpengalaman dengan usia maksimal sekitar 25 tahun, lulusan SMTA. Lama pendidikan sekitar 1 (satu) tahun dengan persyaratan 40 - 50 SKS (Satuan Kredit Semester) atau sekitar 700 - 900 jam pelajaran tatap muka; masing-masing mata kuliah sekitar 18 - 20 kali pertemuan tiap semester.

³¹ Pasal 116 PP nomor : 30/ 1990

Sesuai dengan tuntutan keluaran maka seyogyanya pendidikan ini bersifat semi militer dengan penekanan pada faktor disiplin dan kepemimpinan lapis bawah (first line) sehingga metode pendidikan di samping kuliah teoritis juga melalui latihan praktek/ketrampilan. Mata kuliah/ketrampilan yang diberikan antara lain pengetahuan sekuriti, ketrampilan melaksanakan fungsi sekuriti termasuk penggunaan peralatan (security devices), pengetahuan hukum/perundang-undangan, kepemimpinan, mental kepribadian, pembinaan jasmani/fisik, dan lain lain.

Program akademi diarahkan untuk menghasilkan keluaran dengan kemampuan sebagai :

- 1) tenaga pimpinan Satpam berkekuatan sekitar 30 orang atau populer dengan istilah komandan peleton;
- 2) pimpinan sekuriti (chief security) pada perusahaan menengah atau divisi/bagian/cabang perusahaan besar;
- 3) pimpinan sekuriti pada lembaga-lembaga seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, kampus pendidikan, dan lain lain;
- 4) asisten manajer sekuriti pada perusahaan menengah.

Pada tahap ini diberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu sosial yang penad (pengantar), administrasi/manajemen, pengantar ilmu hukum, ilmu ekonomi (pengantar), pengetahuan bisnis (pengantar), dan lain lain. Pada tahun terakhir diadakan jurusan misalnya pariwisata, keuangan/perbankan, dan industri (manufaktur). Pada semester terakhir dilaksanakan latihan praktek (on the job training) pada perusahaan yang sesuai.

Program gelar diarahkan untuk menghasilkan keluaran dengan kemampuan sebagai tenaga manajer (security manager) pada perusahaan menengah atau asisten manajer sekuriti pada perusahaan besar. Pada tahap ini diberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu sosial lanjutan, pengetahuan hukum lanjutan, pengetahuan bisnis lanjutan, strategi, teknologi, statistik, pemecahan masalah, baik bagi keperluan "crime prevention" maupun "loss prevention". Penjurusan disesuaikan dengan tingkat akademi dan latihan praktek dilaksanakan pada semester

terakhir. Di samping itu, sebagai mana lazimnya dipersyaratkan pula penulisan skripsi dan penyelenggaraan forum-forum ilmiah.

Operasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun untuk setiap tingkat pendidikan sebagai penjabaran dari masing-masing sasaran kemampuannya. Untuk itu perlu dikaji tersendiri.

Program Kursus. Program ini terdiri atas kursus singkat dan kursus kilat. Kursus singkat diperuntukan bagi komuniti sekuriti dan disusun dalam tiga tingkat, sebagai berikut :

- 1) tingkat dasar, setara D III;
- 2) tingkat lanjutan, setara S 1;
- 3) tingkat atas/ahli, untuk pendalaman aspek tertentu.

Kurikulum dan bahan ajaran untuk masing-masing tingkat perlu disusun tersendiri melalui proses pengkajian yang mendalam. Peserta kursus singkat adalah manajer/staf sekuriti pada perusahaan swasta/BUMN maupun instansi pemerintah; tidak tertutup kemungkinan bagi anggota ABRI/Polri (persiapan pensiun) atau purnawirawan. Lama pendidikan sekitar 1 (satu) bulan yang diberikan dalam 5 (lima) hari seminggu, 3 (tiga) jam pelajaran sehari (mengacu pada pola Universitas Pancasila).

Kursus Kilat dilaksanakan dalam bentuk penataran, lokakarya, bahkan simposium, dengan materi berupa topik atau modul-modul tertentu. Misalnya : sekuriti personil, sekuriti materiel, sekuriti informasi, intelijen bisnis, kebakaran, persaingan curang, pemalsuan merk, kejahatan komputer, kejahatan perbankan/pembobolan bank, dan lain lain. Modul-modul untuk penataran/lokakarya perlu disusun secara rinci sehingga merupakan bahan ajaran yang dibagikan kepada peserta. Peserta kursus adalah manajer/staf personalia, logistik, produksi, maupun direksi, serta karyawan yang pekerjaannya berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan. Lama kursus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antara satu sampai tiga hari.

Konsep Sumber Daya. Tenaga pendidik diusahakan dari berbagai sumber terutama dari unsur Polri yang dipandang ahli dalam masing-masing pengetahuan dan ketrampilan yang bersangkutan. Sebagai pendidikan semi militer maka diperlukan pula tenaga-tenaga pelatih/pembina yang seyogyanya bersumber dari unsur Polri/ABRI.

Penyelenggaraan program pendidikan ini membutuhkan prasarana berupa ruang kuliah, ruang penunjang, ruang kantor, fasilitas latihan dan kegiatan lain yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dari Mendikbud maka luas tanah dan bangunan yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah tinggi masing-masing 5.000 m² dan 700 m². Prasarana pendidikan juga menuntut tersedianya fasilitas listrik, air dan telepon serta fasilitas umum. Fasilitas latihan seyogyanya dibangun dalam lokasi tersendiri di luar kota karena berkenaan dengan kepentingan keamanan lingkungan dan dukungan sumber daya alam.

Untuk menunjang terselenggaranya fungsi pendidikan dibutuhkan beberapa sarana/peralatan, antara lain :

- 1) meubeler;
- 2) mesin/alat tulis/hitung;
- 3) sarana perpustakaan;
- 4) sarana komputer;
- 5) sound system;
- 6) studio peralatan (security devices);
- 7) Kendaraan operasional, dan lain-lain.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. KEHADIRAN AFTA DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI.

Sebagaimana diuraikan pada bab II, perkembangan pertumbuhan industri menunjukkan peningkatan yang terus menerus terutama selama pembangunan jangka panjang pertama. Dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan industri (olahan) rata-rata 11 % setiap tahun, mengiringi pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 6,7 % setiap tahun. Apabila perkembangan semua indikatornya bergerak secara konstan, maka pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi dan industri dapat diestimasikan akan terus meningkat.

Dengan menggunakan rumus regresi linier ($Y = a + bX$) maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dengan model persamaan $Y = 5.15 + 0.73X$ (dalam hal ini data tahun kelima dilengkapi dengan metode "Time Series Forecasting dengan $a = 0.10$ sampai 0.99 sehingga menjadi 7,82). Untuk pertumbuhan industri $Y = 10,8 + 0.1X$.

Permasalahannya, bagaimana pengaruh kehadiran AFTA khususnya melalui skema CEPT terhadap perkembangan ekonomi dan industri Indonesia. Secara riil, jawabannya jelas belum bisa dikemukakan, karena kebijakan tersebut baru mulai dilaksanakan pada awal bulan ini. Tetapi secara teoritis dapat dikemukakan bahwa konsep perdagangan bebas akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan kesejahteraan seluruh rakyat. Rasionalitasnya, seperti diuraikan pada bab II, bahwa kebijakan tarif dan kuota serta hambatan non tarif lainnya menimbulkan berbagai efek ekonomi. Dengan demikian, perdagangan bebas termasuk AFTA akan menimbulkan efek yang sebaliknya, yang akan diuraikan berikut ini.

- 1) Terjadi penurunan harga yang semula terkena tambahan biaya tarif. (Lihat gambar 1 : dari P_t ke P_f).
- 2) Pemerintah akan kehilangan penerimaan dari pajak impor. (Lihat segi empat "klmn" pada gambar Pada tahun 1990/1991 tercatat penerimaan pemerintah dari pajak impor sebesar Rp. 2.486 milyar atau 6,3 % dari seluruh penerimaan

dalam negeri (Rp. 39.546 milyar), dan pada tahun 1991/1992 sebesar Rp. 2.574 milyar atau 6.4 % dari seluruh penerimaan dalam negeri (Rp. 40.184 milyar).³² Pajak impor yang bersumber dari perdagangan intra ASEAN sudah barang tentu jauh lebih kecil, karena impor Indonesia dari negara ASEAN hanya sekitar 8,7 % dari seluruh volume impor Indonesia (Data tahun 1989 sampai dengan September 1991).³³ Jumlah tersebut akan jauh lebih kecil lagi karena kebijakan penghapusan tarif yang dilakukan secara bertahap.

- 3) Kehilangan "Dead weight loss" dalam arti peluang berbelanja bagi konsumen Indonesia menjadi lebih besar. (Lihat segitiga "Inp" pada Gambar 1). Peluang tersebut timbul karena menurunnya harga barang. Sudah barang tentu yang dimaksud adalah barang dengan "elastic demand".
- 4) Bagi pengusaha domestik (Indonesia), penurunan harga berarti kehilangan pendapatan lebih yang biasanya diperoleh dari "protective effect". (Gambar 1 : P_{Pf-om}).
- 5) Di samping itu, para pengusaha juga kehilangan "efficiency effect" dalam arti tidak mungkin lagi "menikmati" kebijakan dan tindakan-tindakan in-efisiensi seperti pada masa penerapan tarif. (Segitiga "kmo" pada Gambar 1).

Secara sepintas, kondisi demikian dapat mengakibatkan produksi domestik akan kembali pada posisi seperti sebelum kebijakan tarif, yaitu dalam jumlah yang lebih kecil (garis OA pada Gambar 1) dari pada ketika berlakunya kebijakan tarif (garis OK). Sebaliknya, produksi impor semakin meningkat (dari KL menjadi AB pada Gambar 1). Karena itu nampaknya kehadiran AFTA hanya akan melemahkan bahkan mungkin mematikan industri domestik yang produknya terkena skema CEPT.

Lalu bagaimana rasionalitasnya agar produksi domestik minimal tetap sejumlah pada waktu penerapan tarif. Kembali pada gambar 1, jawabannya adalah efisiensi, minimal sebesar segitiga "kmo". Tetapi kebijakan AFTA tidak hanya sekadar membuka kran dalam negeri Indonesia melainkan juga di semua negara ASEAN yang populasinya menjadi sekitar dua kali lipat dari Indonesia. Di mata pengusaha, jumlah

³² Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi : Buletin Statistik Bulanan, Oktober 1992, hal. 40.

³³ Menteri Perindustrian RI., Sambutan Pada Acara Wisuda Institut Bisnis & Manajemen Jayakarta, Jakarta, 1 Oktober 1992, hal. 9.

penduduk sekitar 320 juta merupakan peluang pasar yang sangat potensial.

Dengan asumsi bahwa faktor selera dan "demand" relatif sama, maka berarti pangsa pasar juga dapat meningkat sampai dua kali lipat. Kondisi demikian merupakan peluang untuk memperbesar skala produksi dan dengan pembesaran skala yang demikian berarti biaya akan menjadi lebih murah (teori "economy of scale). Dengan demikian, kekhawatiran akan kemerosotan industri menjadi tidak beralasan karena dibalik kebijakan AFTA terbuka peluang untuk memperbesar skala produksi. Hanya saja tantangannya adalah berupaya merebut pasar ASEAN.

Di lain pihak, para pengusaha asing juga melakukan hal yang sama. Di samping berupaya mengamankan pasar domestiknya juga berupaya memasuki pasar Indonesia dengan populasi yang berlipat ganda dibandingkan dengan negaranya. Walhasil apa yang terjadi. Persaingan !

Perang Persaingan. Untuk memenangkan persaingan, melalui strategi "perang" harga ? Nampaknya tidak mungkin karena tindakan efisiensi yang mau tidak mau harus optimal. Porter ³⁴ menawarkan segitiga strategi bersaing. Di samping keunggulan biaya menyeluruh (efisiensi), ia menganjurkan diferensiasi produk/jasa dengan sasaran agar memiliki keunggulan dalam hal-hal tertentu. Ketiga, strategi fokus dengan maksud untuk mempersempit atau memusatkan perhatian pada pangsa pasar tertentu, baik dari segi geografis, kelompok pembeli atau segmen produk.

Oleh karena itu, persyaratan yang dituntut dari kalangan bisnis adalah kemampuan memiliki keunggulan kompetitif. Masyarakat modern yang berorientasi teknologi biasanya membutuhkan produk yang dihasilkan melalui proses "Research and Development (R & D)"; dalam hal ini mencakup pula kegiatan survei pasar (market research) terutama yang berkenaan dengan informasi pasar luar negeri. Melalui kegiatan R & D, industri diharapkan menghasilkan produk yang inovatif (memberi nilai manfaat baru) maupun inventif (produk baru) yang selalu harus disesuaikan dengan "demand" dan selera konsumen atau "need", "want", dan "demand".

Keberhasilan memenangkan persaingan sudah barang tentu akan membawa industri dalam posisi unggul (excellence). Keunggulan itu pulalah yang

³⁴ Michael E. Porter, *Competitive Strategy*, The Free Press, New York, 1988, Chapter 2.

menghantarkan industri untuk berkembang menjadi minimal berskala regional. Dengan perkataan lain, kehadiran AFTA memungkinkan pertumbuhan industri yaitu dengan skala usaha yang semakin besar dan mutu produk yang kian berkualitas.

Namun perlu dicatat pula bahwa peluang pasar ASEAN yang demikian besar (hampir sama dengan Jepang, Masyarakat Eropah dan Amerika bagian utara) dengan sistem perdagangan bebas, sudah barang tentu merupakan daya tarik bagi investor asing untuk menanam modal di ASEAN. Dan karena sekitar 50 % dari populasi ASEAN ada di Indonesia maka ditinjau dari segi strategi geografi investor asing akan lebih tertarik untuk menanam modal di Indonesia. Walaupun potensi pasar Indonesia berada pada posisi yang lemah karena pendapatan perkapita yang tergolong rendah, tetapi dengan strategi pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah maka peluang untuk investasi di Indonesia masih dipandang cukup potensial. Melalui kebijakan deregulasi khususnya kemudahan-kemudahan bagi PMA, nampaknya pertumbuhan industri Indonesia tetap akan terus meningkat.

Oleh karena itu, sebagai temuan pertama dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa, jika pengusaha Indonesia mampu memenangkan persaingan melalui keunggulan kompetitif maka kehadiran AFTA akan semakin mendorong pertumbuhan industri Indonesia. Seiring dengan itu pula, pertumbuhan industri akan semakin didorong oleh peranan investor asing yang diduga akan meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia karena daya tarik perdagangan bebas melalui AFTA, kemudahan-kemudahan melalui langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, serta potensi pasar dan sumber daya (resources) yang tersedia.

Dampak Sekuriti. Pada sisi lain, kegagalan dalam memenangkan persaingan akan dapat menghantarkan perusahaan pada kondisi "gulung tikar" atau minimal "status quo". Jika hal demikian terjadi maka risiko yang akan ditanggung bukan saja yang bernilai ekonomi tetapi juga dampak sosial. Kemungkinan terjadi pemogokan atau unjuk-rasa bukan suatu hal yang mustahil. Lebih dari itu, dampak sosial yang cukup berat yang mungkin dihadapi adalah pengangguran.

Sementara itu, perusahaan PMA dan pemasaran produk luar negeri akan terus meningkat. Peningkatan aktivitas orang asing akan membawa konsekuensi semakin terbukanya Indonesia bagi kehadiran kepentingan orang asing. Dalam keadaan

demikian memungkinkan masuknya nilai-nilai baru yang apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dapat menimbulkan problem sosial yang jika tersulut oleh faktor pencetus akan dengan mudah berkembang menjadi berwujud gangguan yang dapat merugikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehadiran AFTA -di samping akan mendorong percepatan pertumbuhan industri-, jika tidak dikendalikan secara tepat, juga dapat membawa serta perbenturan nilai, persaingan curang bahkan gejolak sosial, dan lain lain dampak sekuriti yang merugikan.

2. PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN.

Berbeda dengan kebanyakan gejala sosial lainnya, kejahatan sebagai salah satu produk masyarakat memiliki karakteristik tersendiri sehingga sampai dewasa ini belum juga dapat diungkapkan, faktor utama apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Semula orang-orang mencari sebab kejahatan dari dunia gaib (pendekatan demonologis). Mereka percaya bahwa seseorang berbuat jahat karena kemasukan setan atau roh halus. Tetapi kemudian orang-orang mulai bernalar, mencari sebab kejahatan pada realita dunia fisik (pendekatan naturalistik).

Dalam garis besarnya, ada tiga mazhab yang menerangkan mengenai kausa kejahatan dalam arti luas. Mazhab Klasik atau Neo Klasik, yang dipelopori C. Beccaria (1738 - 1794) memandang bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan dari kebebasan memilih perilaku (free will) yang ada pada setiap individu; individu itulah yang secara bebas menentukan pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat.

Mazhab Positivis, yang pada awalnya dipelopori Caesar Lombroso (1835 -1909), memandang bahwa kejahatan timbul karena faktor-faktor tertentu (determinant) yang bersumber dari pengaruh biologis, sosial dan kultural. Terakhir, berkembang Mazhab Kritis yang mengarahkan pandangannya secara lebih khusus pada proses sosial; antara lain karena pengaruh penyalah-gunaan kekuasaan (abuse of power) baik politik maupun ekonomi, dan keterbatasan sarana (means) untuk mencapai tujuan (goal) menurut cara-cara tertentu (teori anomie).

Kesemua teori dalam mazhab tersebut juga belum dapat mengungkapkan secara memuaskan mengenai faktor penyebab timbulnya kejahatan karena memang

kejahatan bersifat sangat individual. Umpamakanlah, dua orang yang betul-betul hidup dalam keadaan yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, dan juga sama-sama tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya, belum tentu sama-sama akan melakukan kejahatan. Yang satu mungkin berani yang lain takut. Tetapi tidak mungkin dapat dikatakan bahwa keberanian adalah unsur kejahatan dan ketakutan adalah unsur kebaikan.³⁵

Oleh karena itu, ada pula yang mengelompokkan kejahatan ditinjau dari segi motivasinya. Ada kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan agresif, kejahatan politik, dan lain lain. Dari sudut ekonomi, dengan mengkaji hasil penelitian dari beberapa pakar sekitar abad ke 19 terutama yang berkenaan dengan hubungan antara pencurian dengan kesukaran hidup, antara pencurian dengan harga gandum, penjahat ekonomi dengan pengangguran, dan lain lain, Bonger sampai pada kesimpulan bahwa:

*Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah terbukti sangat besar - asal saja, yang dimaksud dengan kesengsaraan bukan hanya 'hampir mati karena kelaparan. ... gerak umum (trend) dari kejahatan ekonomi yang paling banyak disebabkan karena kesengsaraan, yaitu pencurian biasa yang berkurang sejak penghabisan abad ke-19, sesuai dengan berkurangnya kemiskinan di kalangan rakyat jelata.*³⁶

Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk mencari sebab-sebab kejahatan. Dengan menyadari kelemahan statistik kriminal seperti dikemukakan terdahulu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan fakta perkembangan pertumbuhan ekonomi dan industri yang dipersandingkan dengan fakta perkembangan kejahatan, baik total maupun jenis tertentu, secara statistik. Dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana/berganda, hubungan antara variabel-variabel tersebut tergambar seperti pada tabel 10. Dengan Koefisien yang mendekati angka satu (dicetak tebal) mencerminkan korelasi positif antara variabel-variabel tersebut.

³⁵ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen dan B.M. Reksodipoetro, P.T. Pembangunan/ Ghalia Indonesia, Cetakan keenam, Jakarta, 1982, hal. 134.

³⁶ Ibid, halaman 106.

Tabel 10
Korelasi Antara Perkembangan Kejahatan
Dengan Pertumbuhan Ekonomi/ Industri, Tahun 1987 - 1991

Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Persamaan Regresi	Koefisien Korelasi
Jumlah Kejahatan (Crime Total)	Ekonomi	$Y = 163829 + 6313 x$	0,85
Jumlah Kejahatan (Crime Total)	Industri	$Y = 225669 + 2261 x$	0,25
Jumlah Kejahatan (Crime Total)	X1 = Ekonomi, X2 = Industri	$Y = 198900 + 6758 x_1 - 3560 x_2$	0,93
Jumlah Kejahatan bidang Ekonomi	Ekonomi	$Y = - 98 + 82 x$	0,97
Jumlah Kejahatan Pemalsuan Merk	Pertumbuhan Industri	$Y = 2,2 + 4,4 x$	0,36
Jumlah Kejahatan Tertentu di bidang Ekonomi	Jumlah Proyek PMA/ PMDN yang disetujui	$Y = 23,14 + 0,15 x$	0,80
Jumlah kerugian Bank karena kejahatan	Jumlah Permodalan Bank	$Y = 4,9 + 0,4 x$	0,76

- Keterangan :
1. Data observasi sebagaimana diutarakan sebelumnya
 2. Rumus : $Y = a + bx_1 + cx_2$ (Berganda)
 $Y = a + bx$ (Linier Sederhana)

Gambaran mengenai persamaan regresi antara pemogokan dan kebakaran dengan variabel lain belum dapat disajikan, karena kesulitan memperoleh data yang penad. Seharusnya perkembangan pemogokan dikaitkan dengan perkembangan jumlah industri terutama olahan (manufaktur) padat karya, sedangkan kebakaran dikaitkan dengan perkembangan jumlah tempat usaha seperti pabrik, gudang dan pusat pertokoan/perbelanjaan.

Berdasarkan uraian di atas, tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa pertumbuhan industri berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lain khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Berapa besar korelasi antara kedua gejala sosial tersebut tidak dipersoalkan, karena sekali lagi di sini bukan berbicara mengenai sebab - akibat, melainkan dampak yang satu terhadap

sini bukan berbicara mengenai sebab - akibat, melainkan dampak yang satu terhadap yang lainnya. Senada dengan itu, Kongres ke-6 PBB mengenai "Crime Trend and Crime Prevention Strategies" antara lain menyatakan :

*... the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as a principle ... development was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies.*³⁷

Dari Seminar Analisa Dampak Sekuriti ke-2 tahun 1990 yang diselenggarakan oleh PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), antara lain dikemukakan bahwa pada dasarnya dampak industri terhadap sekuriti dapat berupa dampak fisik dan dampak sosial. Keduanya dapat berpotensi untuk menghasilkan baik suatu bencana (kecelakaan), kerusuhan ataupun suatu tindak kejahatan.

*Proses industrialisasi mempunyai potensi untuk mengakibatkan suatu ketegangan (tension). Ketegangan didefinisikan sebagai suatu kesenjangan (gap) antara pengharapan (expectation) dengan pencapaian (achievement). ... makin tinggi tingkat (index) industrialisasi makin besar ketegangan yang akan muncul. Peningkatan ketegangan ini akan mencapai puncaknya pada momentum khusus misalnya pada saat tinggal landas atau pada saat genjotan besar ("big push").*³⁸

Dari sudut pandang sosiologi, industri :

merupakan sebuah faktor yang penting dalam membentuk masalah-masalah sosial yang kompleks pada zaman kita. Hubungan buruh manajemen walaupun tidak seperti pada masa lampau, permusuhannya masih membentuk suatu bidang permasalahan dalam kehidupan Amerika. ... Akhirnya, industrialisme menciptakan masalah-masalah etis dan bahkan filosofis berkenaan dengan hubungan manusia dengan pekerjaan, dengan organisasi dan bahkan dengan seluruh masyarakat. Keprihatinan zaman kita akan "pengasingan diri" mencerminkan sifat dan masalah-

³⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Penataran Kriminologi, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1991, halaman 9.

³⁸ Farid Ruskanda, Analisa Mengenai Dampak Sekuriti (Amdas) Terhadap Pelita Lima : Sudut Pandang Iptek dan Industri, Makalah Pada Seminar Analisa Dampak Sekuriti II, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 27 Desember 1989, halaman 4.

*masalah masyarakat industri.*³⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, sebagai temuan kedua, dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan industri dan ekonomi pada umumnya memberikan dampak bagi perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lain khususnya yang berkenaan dengan aktivitas bisnis.

Berkenaan dengan dalil yang menyatakan korelasi negatif antara kejahatan (ekonomi) dengan kesejahteraan/pertumbuhan ekonomi nampaknya memang perlu diteliti lagi. Dahulu pelaku kejahatan bermotif ekonomi adalah mereka yang sengsara, tetapi pada masa sekarang ternyata tidak selalu demikian. Pelaku kejahatan adalah orang berdasari, terpendang, berkedudukan, berpendidikan, berpekerjaan tetap, dan lain lain. Keserakahan nampaknya dapat dipandang sebagai motif yang penting dalam banyak kasus yang dijumpai, mulai dari pelaku kelas bawah sampai tingkat tinggi. "White collar crime", persaingan curang, kejahatan korporasi, dan lain lain merupakan bukti bahwa kesengsaraan bukan lagi faktor yang banyak mendorong orang melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan pergeseran korelasi antara kejahatan dengan pertumbuhan ekonomi dari yang negatif menjadi korelasi positif.

3. PROSPEK USAHA PELAYANAN JASA SEKURITI.

Berbicara mengenai prospek usaha, di samping berbicara mengenai "supply", yang terpenting adalah berbicara tentang "demand". Berbicara tentang "demand" berarti harus terlebih dahulu mengkaji "marketing". Konsep "marketing" tidak hanya mencakup "demand" yang sudah dikaitkan dengan "purchasing power" tetapi juga mencakup latar belakang pendorongnya yaitu "want" dan "need". Untuk memperoleh gambaran mengenai "need" dari suatu pangsa pasar, maka terlebih dahulu harus diketahui kepentingan yang mendorong seseorang atau sekelompok orang membutuhkan sesuatu. Seseorang butuh makan karena lapar atau akan kelaparan jika tidak makan. Jadi kepentingannya adalah tidak lapar atau kelaparan.

Kepentingan dari para pengusaha adalah profit. Walaupun ada dua konsep

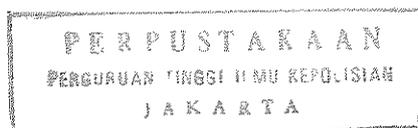
³⁹ Eugene. B. Schneider, *Sosiologi Industri*, Alih Bahasa : J.L. Ginting, Aksara Persada, Edisi kedua, Jakarta, 1986, halaman 3.

mengenai profit, yaitu "profit maximization" (old concept) dan "customer creation" (Peter F. Drucker), tetapi bagaimanapun setiap korporasi yang "economically motivated" harus "profitable" atau minimal tidak merugi. Kerugian perusahaan dapat disebabkan karena berbagai faktor; salah satu di antaranya adalah karena kejahatan termasuk gangguan keamanan lainnya yang menimpa perusahaan. Dan kenyataannya tidak ada perusahaan yang bebas dari ancaman kejahatan.

Pada paragraf di atas telah diulas mengenai perkembangan kejahatan, yang merupakan obyek dari sistem sekuriti. Timbul pertanyaan, apakah dengan metode dan kekuatan (subyek) sekuriti yang dimiliki saat ini kalangan bisnis memandang sudah mampu mengatasi obyek? Jawabannya dapat disimak dari hasil angket penelitian.

Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Dewasa ini. Dari jawaban angket ternyata 55 % responden "mengaku" telah mampu mememanajementi pengelolaan sekuriti dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi jawaban sehingga perlu diperhitungkan dalam menilai data dimaksud. Bahwa sebenarnya jawaban angket diharapkan diisi oleh pimpinan perusahaan/atasan dari manajer sekuriti yang sekaligus memberikan penilaian atas kemampuan manajer sekuritinya. Tetapi diduga kebanyakan angket diisi oleh manajer sendiri (terlihat dari beberapa disposisi dan laporan peneliti lapangan). Karena itu faktor subyektivitas diduga ikut menyusup dalam jawaban tersebut. Dugaan tersebut diperkuat lagi oleh data 55 % yang menyatakan bahwa sistem sekuriti belum terjamin sepenuhnya.

Demikian pula halnya dengan jawaban mengenai penerapan konsep perlindungan informasi, instalasi komputer dan personil, yang diduga karena kurang-pahaman yang mendalam mengenai konsep dimaksud. Sekitar 70 % responden menyatakan telah mengembangkan konsep pengamanan obyek-obyek tersebut. Sampai di mana kemampuan konsep tersebut belum teruji atau teruji lagi oleh kejahatan atau setidaknya tidaknya belum dapat diketahui melalui penelitian ini. Tetapi dari hasil survei mahasiswa PTIK angkatan XXVI tahun 1990 terhadap beberapa Hotel di Jakarta menjelang "Tahun Kunjungan Indonesia 1991" ternyata sebagian besar (75 %) masih



mengandung berbagai kelemahan; itupun baru dari segi pengamanan fisik.⁴⁰

Dari segi obyek, terungkap bahwa lebih dari 61 % responden menyatakan "pernah" mengalami kerugian karena masalah sekuriti termasuk pelecehan dampak sekuriti dari suatu keputusan. Memang dari jawaban angket jarang yang menyatakan "seringkali" atau "kadang-kadang". Hal tersebut dapat dimaklumi karena jarang orang yang terbuka dengan problemnya. Hambatan demikian pada umumnya dihadapi dalam penelitian kriminologi (lihat paragraf 1 bab II). Karenanya, dari jawaban demikian sebenarnya telah mencerminkan indikasi mengenai problem sekuriti pada banyak perusahaan.

Ulasan di atas menggambarkan kondisi dewasa ini. Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan masa-masa mendatang, termasuk dampak percepatan pertumbuhan industri yang kemungkinan semakin dipacu oleh kehadiran AFTA.

Tabel 11.
Kecenderungan Perkembangan Kejahatan/ Gangguan Lain

No	Observasi	Variabel Dependen (Y)	Persamaan Regresi
1	1987 - 1991	Jumlah Kejahatan (Crime Total)	$Y = 193,858 + 3,930 x$
2	1983 - 1991	Tindak Pidana di bid Ekonomi	$Y = 34,1 + 59,6 x$
3	1983 - 1991	Kejahatan di bidang Perbankan	$Y = 35,5 + 3,3 x$
4	1983 - 1991	Kejahatan Pemalsuan Merk	$Y = 0,8 + 7,3 x$
5	1983 - 1991	Kejahatan Hak Cipta	$Y = -13,98 + 10,13 x$
6	1983 - 1991	Kejahatan Lain-lain (ekonomi)	$Y = -1,13 + 8,12 x$
7	1983 - 1991	Jumlah Kejahatan tertentu di bidang Ekonomi	$Y = 18,11 + 29,3 x$
8	1987 - 1992	Kebakaran tempat usaha di daerah Polda Metro Jaya	$Y = 17,95 + 12,5 x$
9	1990 - 1992	Pemogokan di Tangerang, Bekasi dan Jakarta Barat	$Y = 4 + 78 x$

- Keterangan :
1. Data Observasi sebagaimana diutarakan sebelumnya
 2. Variabel independen (X) adalah periode waktu
 3. Rumus : $Y = a + bx$

⁴⁰ Perwira Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Angkatan XXVIII, Laporan Hasil Survei Terhadap Hotel dan Obyek Wisata Menyongsong Tahun Kunjungan Indonesia 1991, Jakarta, 1990.

Kecenderungan Perkembangan Kejahatan. Dari tabel 10 di atas memberikan gambaran mengenai hubungan positif antara perkembangan industri dan kejahatan. Dengan menggunakan rumus regresi linier sebagaimana hasilnya tertera pada tabel 11, maka pada masa mendatang, kecenderungan perkembangan kejahatan diperkirakan terus mengikuti arah grafik yang menaik; sudah barang tentu jika semua faktor yang mempengaruhinya -baik pendukung maupun penghambat- bergerak secara konstan seperti pada masa-masa sebelumnya. Catatan tersebut perlu diberikan mengingat kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sukar diidentifikasi secara pasti. Berbeda dengan pembangunan yang dihasilkan melalui proses perubahan yang direncanakan maka kejahatan bukan saja tidak direncanakan tetapi juga tidak diinginkan.

Kemungkinan semakin melajunya perkembangan kejahatan dikuatkan pula oleh dampak pembangunan dan industri sebagaimana dikemukakan di atas. Tetapi nampaknya, perkembangan kejahatan tidak hanya meningkat secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif di samping perkembangan jenis-jenis kejahatan baru.

Dari segi kualitas, perkembangan kejahatan menyangkut pengelompokan pelaku (menjurus ke "organized crime") dan penerapan konsep manajemen (rata-rata 36,25 % setahun dengan peningkatan 0,27 % tiap tahun); semakin meningkatnya jumlah pelaku wanita, pelajar/mahasiswa (5,26 %), pengusaha (13,22 %), dan pegawai negeri/anggota ABRI (1,08 %). Penggunaan sarana berkembang ke arah penerapan teknologi antara lain penggunaan sarana komunikasi, komputer, transportasi, senjata api, bahan peledak, dan bahan kimia. Dari segi modus, kualitas kejahatan berkembang dengan penggunaan alat kekerasan -bukan sekadar untuk membela diri- dan taktik yang jitu, serta penggunaan nama, gaya, dokumen, dan pejabat palsu.⁴¹

Dari segi jenis, berkembang kejahatan baru atau berdimensi baru terutama yang berkenaan dengan aktivitas bisnis. Dalam hal ini, Kongres ke-5 PBB tentang Penanggulangan Kejahatan pada tahun 1975 di Jenewa meminta perhatian antara lain terhadap :

⁴¹ Kepala Kepolisian RI., Kecenderungan Perkembangan Kriminalitas dan Konsep Penanggulangannya dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, makalah pada Seminar Lustrum VII Jurusan Ilmu Sosiarti Fisipol - UGM Yogyakarta, 1992, halaman 7.

"crime as business" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis dan industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat; termasuk dalam kejahatan ini a.l. yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "organized crime" "white collar crime" dan korupsi.⁴²

Berkenaan dengan kejahatan perbankan, sebuah seminar menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan orang dalam, sehingga dunia perbankan nasional diminta waspada terhadap kemajuan teknologi dan perekrutan tenaga profesional. Di samping itu dikemukakan pula bahwa :

... problema paling besar yang dihadapi Indonesia di masa depan, adalah kehadiran organisasi kriminal yang memiliki reputasi internasional seperti Mafia dari Amerika Serikat dan Yakuza dari Jepang. Menurut Barry A.K. Rider, pengamat dari Cambridge University, Inggris, organisasi kriminal tersebut mempunyai jaringan kerja sangat rapi dan memiliki hubungan dengan sekitar 98 % perusahaan publik yang tercatat di Tokyo, Nagoya dan Osaka.⁴³

Mengenai kejahatan yang memanfaatkan komputer, Kongres ke-8 PBB mengemukakan berbagai pertimbangan antara lain :

the growing utilization of computer technology and world-wide computer and telecommunication networks as an integral part of contemporary international financial and banking operations can also create conditions that greatly facilitate criminal operations within and between countries.⁴⁴

Praktek terorisme nampaknya tidak hanya sekedar sebagai alat politis tetapi juga merasuki aktivitas dan kepentingan bisnis. Perkembangan demikian memungkinkan berkembangnya "the business of counter terrorism" di negara-negara maju. Pada masa-masa mendatang, kejahatan terorisme bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia yang dapat mengancam para miliuner dalam kaitannya dengan persaingan bisnis.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 16.

⁴³ Bisnis Indonesia (Ed), *Kejahatan Bank Libatkan Orang Dalam*, 16 September 1992.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 20.

Pencurian di pasar-pasar swalayan ternyata menyedot kerugian yang tidak kecil di Amerika Serikat; sistem pendataan kejahatan di Indonesia belum memungkinkan mengungkapkan tabir kejahatan dimaksud. Peluang bagi timbulnya kejahatan pencurian barang di toko/pasar swalayan nampaknya semakin terbuka. Untuk masa-masa mendatang jenis kejahatan tersebut bukan tidak mungkin terjadi dan bahkan mungkin sudah sering terjadi tetapi tidak dilaporkan kepada polisi di Indonesia.

Pemogokan merupakan taktik serikat buruh untuk menekan majikan. Tidak ada taktik lain yang dapat membuat kerugian yang begitu besar bagi manajemen dalam waktu begitu cepat, selain pemogokan. Pemogokan langsung menghentikan produksi dan penciptaan laba, memutuskan majikan dari pasar dan sumber bahan mentahnya, bahkan acapkali dapat mengancam eksistensi suatu perusahaan.⁴⁵ Lebih parah lagi risikonya, jika diikuti dengan tindakan kekerasan seperti yang terjadi beberapa kali di Tangerang dengan kerugian milyaran rupiah (bab II). Dengan hembusan angin kebebasan, demokrasi dan hak azasi yang dipancarkan dari negara-negara liberal, maka pemogokan atau ancaman pemogokan akan tetap merupakan taktik yang sewaktu-waktu digunakan oleh serikat pekerja di masa-masa mendatang.

Kecenderungan perkembangan beberapa jenis kejahatan tersebut di atas merupakan "sample" yang dapat mencerminkan gambaran perkembangan kejahatan secara menyeluruh. Prediksi demikian dikuatkan lagi oleh kemungkinan, baik dampak kebijakan AFTA termasuk PMA maupun, akibat transparansi dunia karena pengaruh globalisasi. Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan:

Dipacu oleh berbagai faktor, terutama penambahan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, maka perkembangan kejahatan yang akan kita hadapi dalam pembangunan jangka panjang kedua akan semakin besar jumlahnya, semakin canggih dan kompleks kualitasnya serta dilakukan secara profesional.⁴⁶

Lebih dari itu, dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, maka praktek spionase pada waktunya diduga bisa hadir pula di Indonesia, seperti yang terjadi atas Mitsui

⁴⁵ Eugene V. Schneider, *Op.Cit.*, halaman 338.

⁴⁶ Kepala Kepolisian RI., *Op.Cit.*, halaman 23.

kontra Nomura selama Perang Dunia II, dan Motorola Inc. kontra perusahaan-perusahaan elektronik Jepang pada tahun 1987. Bahkan polisi Jepang menggerebek kantor Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Toyo Umpanki C. Ltd. untuk mencari dokumen yang dituduh dicuri oleh Kiyoshi Ohta (1991).⁴⁷ Demikian pula halnya dengan taktik pengecohkan dalam kerangka intelijen bisnis juga diduga akan semakin meningkat. Peranan organisasi-organisasi kejahatan yang berpraktek di Amerika dan Jepang bukan mustahil merambat ke dalam dunia bisnis Indonesia.

Walaupun perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas cenderung meningkat tetapi sebelum sampai pada kesimpulan mengenai prospek usaha perlu diwaspadai bahwa persoalan kejahatan bukan persoalan bisnis. Kejahatan akan merupakan permasalahan bisnis jika akibatnya dapat membawa kerugian bagi perusahaan.

Kerugian Perusahaan. Setiap perusahaan akan menghadapi ancaman baik berupa kejahatan maupun gangguan dan kelalaian yang merugikan. Jenis kejahatan yang biasanya menimpa perusahaan adalah penipuan dan penggelapan, termasuk "white collar crime", pemalsuan merk, pencurian mulai dari yang dengan kekerasan (robbery) sampai "shoplifting", hak cipta, dan lain lain, baik yang dilakukan oleh orang luar maupun karyawan sendiri. Belum lagi akibat gangguan keamanan lainnya seperti kebakaran dan pemogokan. Semua itu akan membawa kerugian yang tidak kecil bagi perusahaan.

Kerugian lain yang mengancam perusahaan juga dapat bersumber dari pelecehan dampak sekuriti dari setiap kebijakan pimpinan perusahaan, seperti kebocoran informasi, pembajakan karyawan, kredit macet, komputer sampai pada spionase bisnis. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perkembangan ekonomi khususnya industri membawa serta dampak bagi timbulnya kejahatan dan gangguan keamanan lainnya.

Sistem perekaman data kepolisian nampaknya belum memungkinkan untuk mengetahui berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan/gangguan keamanan khususnya yang berkenaan dengan aktivitas bisnis di Indonesia. Tetapi di

⁴⁷ John Ihalauw, Business Intelligence : Suatu Alat Manajerial Untuk Keunggulan Kompetitif, (Bahan Kuliah), halaman 36

Amerika, seseorang yang membeli selembar baju seharga \$ 20 pada toko pengecer pakaian harus membayar lebih \$ 3, untuk menutupi kerugian akibat pencurian sebelumnya. Karena itu "the cost of economic crime" sangat besar (astronomical). Pengusaha Amerika kehilangan sampai lebih dari \$ 114 milyar setiap tahun, atau sama dengan pengeluaran perusahaan Amerika dalam usaha biro perjalanan (travel) dan hiburan (entertainment).⁴⁸ Atau seperti dikemukakan Post (bab II), bahwa "cost of crimes" mencapai US \$ 137 perkapita.

Berkenaan dengan konsep pembebanan risiko kejahatan kepada pelanggan, nampaknya dipraktekkan pula oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari selisih bunga kredit dengan bunga deposito, yang menurut Kamardiy⁴⁹ minimal harus 5 % yaitu untuk menutupi "overhead cost" dan jaminan risiko (kredit).

Sebagaimana dikemukakan dalam bab II, jumlah kerugian bank akibat kejahatan rata-rata Rp 210 milyar setiap tahun.

Terhadap fakta dan pertimbangan di atas, pangsa "pasar" yang kritis sudah barang tentu akan berkomentar bahwa sistem sekuriti yang diterapkan dewasa ini ternyata "ampuh" untuk menghadapi dan "mencegah" segala gangguan. Tetapi bagaimana sebenarnya ?

Kemampuan Pengelolaan Sekuriti. Sistem sekuriti yang diterapkan dewasa ini mungkin saja dapat dipandang "mampu" menghadapi segala ancaman masa lalu dan dewasa ini karena problematikanya yang belum begitu kompleks; itupun kemungkinan karena diambil alih instansi berkompeten. Sedangkan untuk "mencegah" kejahatan mungkin saja karena belum teruji kemampuannya, atau karena memang belum pernah terjadi gangguan. Tetapi untuk menghadapi kejahatan seperti digambarkan di atas pada masa-masa mendatang, kemampuannya masih diragukan.

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ternyata juga menemukan hal yang sama dengan hasil survei mahasiswa PTIK seperti diutarakan di atas, yaitu meragukan sistem pengamanan hotel, setelah sistem Hotel Bali Beach teruji "kemampuannya" khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Karena itu Menteri

⁴⁸ William C. Cunningham, dengan kawan-kawan, Private Security Trends 1970-2000, Butterworth-Heinemann, Stoneham, 1990, halaman 17.

⁴⁹ Dikemukakan dalam forum "Dialog Ekonomi" RCTI, tanggal 2 Januari 1993.

menginstruksikan kepada semua pengusaha hotel agar memeriksa kembali sistem pengamanannya masing-masing.⁵⁰

Dewasa ini posisi manajer atau "chief" sekuriti pada umumnya diisi oleh purnawirawan bahkan anggota organik ABRI (50 % responden). Seorang purnawirawan perwira tinggi ABRI yang menjadi konsultan pada sebuah perusahaan bahan pakaian dan garmen di Tangerang yang mempekerjakan sekitar 20 purnawirawan ABRI yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa kemampuan tenaga dimaksud sangat rendah. Penggunaan "power" sangat menonjol sedangkan kendali lemah; jika membuat laporan cenderung berisi "aman TKA (Tidak ada Kejadian Apa-apa) dan "sense of security" lemah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah seorang direktur pada suatu perusahaan konstruksi dan sekaligus konsultan untuk pemasangan peralatan sekuriti.

Kasus pemogokan yang menimpa PT. Timur Kencana menguatkan penilaian penggunaan "power" yang berlebihan oleh anggota/purnawirawan ABRI.

Menurut mereka, saat meninggalkan tempat kerja menuju kamar kecil, mereka selalu diawasi dan dijaga oknum ABRI yang merangkap kerja di perusahaan. ... bahkan ada yang dipaksa 'push up' ... karena terlalu lama di WC. general affair manager mengatakan ..."saya minta bantuan mereka karena pernah terjadi pencurian hasil produksi yang dilakukan karyawan."⁵¹

Berdasarkan ulasan di atas, maka pada masa-masa mendatang, yang dibutuhkan adalah tenaga sekuriti yang profesional; bukan berdasarkan kekuasaan. Di Amerika, pemberian kelengkapan senjata -di Indonesia kebijaksanaan demikian sangat selektif- untuk personel sekuriti semakin berkurang secara dramatis dalam 20 tahun terakhir. Dengan estimasi sekitar 50 % personel sekuriti yang dipersenjatai pada tahun 1970 turun menjadi sekitar 10 % pada tahun 1980 dan mungkin hanya sekitar 5 % pada tahun 2000.⁵²

⁵⁰ Suara Pembaruan (Ed), Semua Hotel Diinstruksikan Periksa Sistem Pengamanannya, 23 Januari 1993.

⁵¹ Kompas (Ed), ke WC pun diawasi, 1500 Pekerja Mogok, 30 Desember 1992.

⁵² William C. Cunningham, Op.Cit., halaman 321.

Dari segi kekuatan, jumlah anggota Satpam seluruh Indonesia 134.668 orang (1991/1992) ditambah tenaga manajer/pimpinan sekuriti pada semua perusahaan menengah sekitar 30.000 orang, berarti berjumlah sekitar 165.000 orang; hampir sama dengan kekuatan Polri (1 : 1). Di Amerika Serikat jumlah kekuatan "private security" sekitar 1,5 juta orang (1990) atau sama dengan 3,4 : 1 dengan kekuatan "public security". Dibandingkan dengan populasi, maka kekuatan "private security" di sana 6 orang di antara 1000 penduduk atau 12 orang di antara 1000 tenaga kerja.⁵³ Sedangkan di Indonesia sama dengan 9 di antara 10.000 penduduk atau 2 di antara 1000 tenaga kerja.

Mengenai kebutuhan tenaga manajer sekuriti di Amerika cenderung semakin meningkat. Pada tahun 1982 perbandingan manajer dengan anggota "Satpam" adalah 17 : 100 sedangkan tahun 1990 adalah 25 : 100. (Composition of proprietary security organization).⁵⁴

Prospek. Dari rangkaian telaahan yang diutarakan di atas, dapat dipetik beberapa sari yaitu :

- 1) perkembangan kejahatan/gangguan yang menimpa perusahaan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir;
- 2) walaupun para pengusaha cenderung "mengaku" mampu menangani pengelolaan sekuriti dewasa ini, tetapi kemampuan dimaksud diragukan keampuannya untuk menghadapi ancaman pada masa-masa mendatang;
- 3) kecenderungan perkembangan kejahatan akan terus meningkat, baik dari segi kuantitas terutama kualitas dan jenis-jenisnya, jika perkembangan faktor-faktor penghambat dan pendukung bergerak secara konstan seperti pada tahun-tahun sebelumnya;
- 4) dampak pertumbuhan industri termasuk kebijakan AFTA diduga akan terus meningkatkan perkembangan kejahatan;
- 5) "cost of economic crimes" cukup tinggi sehingga jika menimpa sesuatu perusahaan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar;

⁵³ *Ibid.*, halaman 32.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 210.

- 6) pekerjaan sekuriti (private) pada masa-masa mendatang lebih membutuhkan tenaga profesional dari pada yang berdasarkan "power".

Oleh karena itu, jika telaahan di atas dikaitkan lagi dengan teori Maslow tentang hirarkhie kebutuhan yang diutarakan dalam bab II, maka sebagai temuan ketiga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian "marketing" khususnya dari aspek kepentingan dan "need" yang ditinjau dari segi obyek, metode dan subyek sekuriti, prospek usaha pelayanan jasa sekuriti secara potensial cukup cerah untuk dikembangkan.

4. KELAIKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKURITI.

Dalam konteks "marketing", uraian di atas telah memberikan gambaran mengenai "need" dan kepentingan yang melatar belakanginya, sehingga sampai pada temuan mengenai prospek usaha yang cukup cerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai "demand" pangsa pasar maka selanjutnya perlu ditelaah mengenai "want" atau minat calon konsumen. Dari sudut "supply" perlu dibahas mengenai minat calon peserta sekaligus sebagai pemasok.

Dengan memperhatikan data "demand" dari calon konsumen maka dapat dikatakan bahwa jasa yang ditawarkan cukup "feasible" untuk dipasarkan; tercermin dari jawaban mengenai minat untuk menseleksi hasil didik, baik tenaga sekuriti (77,7 %) maupun karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas (83,3 %). Dari jawaban angket bahkan diperoleh masukan baik mengenai bentuk program pendidikan maupun materi dan kemampuan yang diharapkan dari hasil didik sebagai bahan penyusunan kurikulum.

Ditinjau dari sudut "supply", walaupun hanya sekitar sepertiga responden yang menyatakan berminat, tetapi separuh yang lainnya juga dapat dipandang sebagai "simpatisan" yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan minatnya; mereka menempatkan peluang pendidikan ini pada prioritas yang lebih rendah. Responden dari kalangan pelajar/pencari kerja dan anggota Satpam juga memberikan masukan mengenai bentuk program pendidikan yang disarankan. Dalam hal ini para pelajar/pencari kerja justru mendukung program diploma bahkan program gelar. Mereka yang mampu membaca situasi dan memprediksi masa depan sudah barang tentu mempersoalkan profesionalitas dalam pengelolaan sekuriti.

Berdasarkan gambaran minat (want) baik dari aspek "demand" calon "user" maupun dari aspek "supply" calon peserta (pemasok) tersebut di atas, maka sebagai temuan keempat dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek "marketing" gagasan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti cukup laik (feasible) untuk dikembangkan.

Sisi lain yang perlu dipertimbangkan berkenaan dengan gagasan ini adalah mengenai kemungkinan mengadakan sinergi dengan instansi yang berkompeten khususnya Polri.

5. SINERGI.

Walaupun sesungguhnya konsep sinergi sebagai wujud kerja sama saling menguntungkan antara dua pihak telah lama dikenal, tetapi menjadi populer setelah dipublikasikan oleh Kenichi Ohmae. Ohmae menggambarkan konsep sinergi dengan rumus "cross fertilization of strength". Contoh : $2 + 3 = 5$ Plus. Penggabungan ini memberikan "synergistic effect". Sinergi dapat dilakukan pada tahap pendahuluan (start up) maupun pelaksanaan (operating) dan dapat memberikan "sinergistic effect" dalam fungsi manajemen, penjualan, pembiayaan maupun investasi.

Selama hampir 20 tahun Polri menghadapi permasalahan mendasar dalam mendidik (pre-service training) calon personil, khususnya untuk bintangara dan perwira yang berasal dari sarjana. Pada periode Pelita kedua -pembangunan ABRI yang pertama atau disebut periode perencanaan strategi (Renstra) I- alokasi anggaran pembangunan khususnya pendidikan pembentukan bintangara dan perwira (sarjana) Polri disamakan dengan TNI yaitu masing-masing empat bulan. Keterbatasan masa pendidikan tersebut antara lain mengakibatkan merosotnya sikap dan tindakan anggota Polri di lapangan yang populer dengan masalah "citra" pada sekitar akhir tahun 70-an. Untuk mengatasi masalah tersebut Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI antara lain menegaskan :

*..... menuntut agar setiap anggota Polri mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan Polri tidak boleh sepenuhnya dilaksanakan seperti dalam TNI."*⁵⁵

⁵⁵ Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI, Kata Sembutan Pada Rapat Pimpinan ABRI, di Dilly, 27 Maret 1979.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka sistem pendidikan Polri ditata kembali, antara lain dengan memperpanjang masa pendidikan bintangara dari 4 (empat) bulan menjadi 9 (sembilan) bulan kemudian 11 bulan dan pendidikan perwira (sarjana) dari 4 (empat) bulan menjadi 9 (sembilan) bulan. Tetapi permasalahannya, sumber anggaran tidak memungkinkan untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, biaya pendidikan setelah masa 4 (empat) bulan diatasi dengan gaji peserta didik sendiri -secara formal diangkat sebagai anggota Polri setelah 4 (empat) bulan masa pendidikan.

Kebijakan tersebut masih berjalan hingga dewasa ini, karena kendala anggaran masih juga belum terpecahkan. Di samping para anggota Polri tersebut mendapat perlakuan yang berbeda dengan rekan-rekannya dari angkatan/TNI, kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen personil dan pengembangan sumber daya manusia karena biaya pendidikan seharusnya dianggarkan oleh organisasi.

Kendala yang dihadapi Polri tersebut dapat dirubah sebagai peluang dalam gagasan ini dengan jalan mengadakan sinergi. Dalam hal ini Polri dapat merekrut personil dimaksud dari keluaran pendidikan ini. Lulusan program D I diarahkan untuk mengikuti seleksi bintangara sehingga dengan masa pendidikan selama 4 (empat) bulan sesuai alokasi anggaran yang tersedia dipandang cukup untuk mendapat bintangara yang diharapkan. Kurikulum program D I dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasikan "requirement" yang dituntut Polri.

Untuk lulusan program akademi (D III) dan program gelar (S- 1) nampaknya tidak dapat diatasi dengan konsep tersebut di atas, karena masukan bagi pendidikan perwira (sarjana) direkrut dari berbagai disiplin ilmu. Tetapi apabila dibicarakan dengan pimpinan Polri, bukan tidak mungkin lembaga pendidikan ini merancang program khusus untuk kepentingan dimaksud. Artinya, lembaga pendidikan ini menyelenggarakan program khusus pra pendidikan Sekolah Perwira Polri, selama enam sampai sembilan bulan. Lulusan program inilah yang diseleksi oleh Polri untuk dididik lanjut selama 4 (empat) bulan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

Di samping itu, masih ada kemungkinan lain, yaitu dengan mengusahakan agar lulusan program D III dan program S 1 juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Dengan demikian selain bersumber dari disiplin hukum, psikologi, kedokteran, fisika, dan lain lain, "in take" perwira Polri juga dapat bersumber dari disiplin manajemen khususnya sekuriti. Perwira dimaksud dapat diarahkan untuk fungsi Bimbingan Masyarakat khususnya pembinaan Kamtibmas dalam lingkungan usaha.

Sinergi tersebut sudah barang tentu akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Polri, manfaat yang dapat dipetik antara lain :

- 1) pelurusan kembali kebijakan pendidikan sehingga tidak lagi "mengalihkan" gaji personilnya untuk keperluan pendidikan, tanpa harus "mendambakan" lagi penambahan anggaran negara; secara psikologik hal tersebut tidak lagi membebani perasaan personil dimaksud dengan perlakuan yang "tidak adil" yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan tugas mereka;
- 2) perangkat pendidikan yang selama ini dioperasikan secara penuh selama hampir satu tahun dapat dikurangi menjadi 4 (empat) bulan; kekosongan waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan-pendidikan kejuruan (in-service training) yang selama ini seringkali sukar dilaksanakan karena kendala daya tampung fasilitas pendidikan;
- 3) personil dan purnawirawan Polri dapat diikut sertakan dalam "usaha" ini baik untuk tenaga-tenaga manajemen maupun pendidik.

Dari pihak penyelenggara pendidikan, sinergi tersebut jelas akan memberikan manfaat yang cukup besar. Dengan teori "economy of scale" maka perluasan pangsa "pasar" tersebut akan menekan biaya sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan "revenue".

Ditinjau dari pihak ketiga, sinergi tersebut tidak lalu merugikan peserta didik. Mereka yang berhasil lulus seleksi -sudah barang tentu harus diperketat- mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengabdikan diri dalam pekerjaan kepolisian.

Tetapi walaupun gagal, mereka masih memiliki peluang untuk melamar sebagai pekerja/pejabat sekuriti pada perusahaan, lembaga pemerintah non fungsional

keamanan, dan lembaga-lembaga lain seperti rumah sakit, kampus pendidikan, dan lain lain.

Berkenaan dengan "purchasing power" (tingkat daya beli) calon peserta nampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, sebagaimana ulasannya yang disajikan pada paragraf berikut ini, sub-paragraf analisis titik impas khususnya mengenai rencana "harga jual".

Sebagai gambaran bahwa jumlah penerimaan personil (in take) Polri setiap tahun sekitar 5.900 bintara dan 100 perwira (sarjana). Dengan demikian tingkat kelaikan pembentukan lembaga pendidikan ini akan semakin tinggi jika sinergi antara pemrakarsa/penyelenggara dengan Polri berhasil dibangun.

6. TELAAHAN ASPEK KEUANGAN.

Telaahan aspek keuangan akan meliputi analisis mengenai biaya investasi, biaya tetap (fix cost), biaya tidak tetap (variable cost), titik impas (break event point), laporan rugi laba (income statement), penilaian investasi, dan penanggulangan risiko. Pemikiran untuk mengadakan sinergi dengan Polri belum diperhitungkan secara kuantitatif dalam telaahan ini.

Biaya Investasi. Luas lahan yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah tinggi minimal 5.000 M2. Dengan pertimbangan arah pengembangan kota khususnya bagi fasilitas pendidikan beserta daya dukung seperti tenaga pendidik maka lokasi yang dipandang tepat adalah di wilayah Depok. Di wilayah Depok harga tanah relatif masih lebih murah, yaitu rata-rata sekitar Rp. 100.000,- perM2. Dengan demikian biaya investasi untuk lahan mencapai sekitar Rp. 0,5 milyar.

Sehubungan dengan kebutuhan fasilitas latihan maka luas lahan untuk kampus induk dapat dibatasi menjadi sekitar 3.000 M2. Untuk fasilitas latihan dibutuhkan sekitar 2,5 ha di luar kota sekitar Jakarta dengan perkiraan harga tanah masih sekitar Rp 20.000 perM2. Dengan demikian biaya pengadaan lahan = $3.000 \times \text{Rp. } 100.000,-$ + $25.000 \times \text{Rp. } 20.000,-$ = Rp. 0,8 Milyar. Ditambah biaya pembebasan, perataan, administrasi pengalihan hak, dan lain lain dibulatkan menjadi Rp. 1 milyar.

Luas bangunan yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah tinggi minimal 700 m2. Fasilitas bangunan di tempat latihan yaitu untuk kantor, ruang kelas, dan asrama sekitar 300 M2, sehingga luas bangunan seluruhnya menjadi 1.000 M2. Index biaya

bangunan sekitar Rp. 350.000,- perM2. Dengan demikian biaya investasi untuk bangunan berkisar antara Rp. 350 juta.

Di samping itu masih dibutuhkan prasarana lain seperti listrik, telepon, air, pagar, jalan, halaman upacara/parkir, selokan, dan prasarana latihan. Biaya yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut, secara sederhana, diperkirakan sekitar Rp. 350 juta. Dengan demikian total biaya investasi prasarana minimal mencapai sekitar Rp. 1, 7 milyar.

Kebutuhan sarana untuk suatu fasilitas pendidikan yang memadai dapat mencapai sekitar Rp. 280 juta, termasuk untuk fasilitas penunjang seperti perpustakaan, komputer, contoh peralatan sekuriti, dan lain lain. (Rincian pada Lampiran VII).

Di samping untuk aktiva tetap berwujud, biaya investasi juga perlu dianggarkan untuk aktiva tetap tak berwujud. Biaya persiapan untuk aktiva tetap tak berwujud meliputi :

- 1) studi kelayakan (lanjutan) serta penyusunan rencana terinci, dan piranti lunak lainnya sekitar Rp. 3 juta;
- 2) proses peridzinan sekitar Rp. 4 juta yang meliputi persetujuan pembentukan perguruan tinggi (Ditjen Dikti) dan izin kursus (Ditjen Luar Sekolah);
- 3) penyusunan kurikulum, silabi dan bahan ajaran untuk program diploma/gelar Rp 4 juta;
- 4) penyusunan modul-modul bahan ajaran untuk program kursus Rp. 6 juta;
- 5) Penyiapan lembaga yang meliputi rekrut/pelatihan tenaga, pencarian peralatan, koordinasi dan lain lain sekitar Rp. 3 juta.

Jumlah biaya persiapan sekitar Rp. 20 juta.

Dengan demikian keseluruhan biaya investasi untuk suatu sekolah tinggi dapat mencapai sekitar Rp 2 milyar.

Program Jangka Pendek. Ditinjau dari ketersediaan modal dan proses pembangunan, biasanya investasi untuk prasarana belum mungkin dilakukan pada tahap awal pembentukan suatu lembaga pendidikan. Karena itu dalam praktek pada umumnya, operasionalisasi suatu lembaga pendidikan tidak menunggu tersedianya prasarana maupun sarana secara lengkap, tetapi dipenuhi sambil berjalan. Suatu

lembaga pendidikan sudah dapat dioperasikan dengan prasarana dan sarana -minimal untuk tahap awal- yang memadai. Dengan perkataan lain konsep pembangunan suatu lembaga pendidikan harus disusun dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.

Konsep investasi yang diuraikan di atas merupakan rencana jangka panjang, kecuali mengenai aktiva tetap tak berwujud. Untuk jangka pendek, prasarana diadakan dengan sistem sewa kontrak yang dalam konsep ini dianggarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperhitungkan dalam biaya tetap. Pada tahun ketiga pembangunan jangka panjang seyogyanya telah mulai direalisasikan sehingga pada tahun keenam seluruh perangkat pendidikan sudah dapat dipindahkan ke lokasi dengan prasarana dan sarana tetap.

Kebutuhan sarana pada tahap awal, dengan prasarana sewaan, tercantum pada Lampiran VIII. Jumlah biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 50 juta. Dengan demikian total biaya investasi jangka pendek mencapai Rp. 70 juta. Dengan estimasi bahwa usia pakai (usefull life) sarana sekitar 5 (lima) tahun, maka biaya penyusutan aktiva tetap berwujud adalah 20 % atau Rp. 10 juta setiap tahun. Sementara itu untuk aktiva tetap tak berwujud diperhitungkan dengan penyusutan 10 % atau Rp. 2 juta setiap tahun karena adanya kemungkinan pembaharuan perijinan atau penyesuaian piranti lunak lainnya.

Biaya Tetap (Fixed Cost). Fasilitas gedung yang dibutuhkan pada tahap awal adalah dengan luas sekitar 250 M2. Lokasi seyogyanya tidak di pusat keramaian/perbelanjaan, karena di samping nilai komersialnya yang tinggi juga dapat mempengaruhi ketenangan belajar. Di lokasi demikian, indeks biaya sewa sekitar Rp 120.000,- perM2 pertahun, atau sekitar Rp. 30 juta termasuk fasilitas pekarangan. Dengan demikian, biaya sewa untuk jangka waktu lima tahun adalah Rp. 150 juta,-. Prasarana dimaksud sudah barang tentu harus direnovasi sesuai kebutuhan pendidikan dengan biaya sekitar Rp 10 juta. Dengan demikian keseluruhan biaya sewa dan renovasi adalah sekitar Rp. 160 juta untuk selama lima tahun, atau Rp.32 juta pertahun.

Biaya tetap lainnya adalah :

- 1) gaji tenaga tetap (lihat Lampiran IX) Rp.49,8 juta;
- 2) biaya daya (listrik, air dan telepon) diperkirakan sekitar Rp. 1 juta x 12 bulan =

Rp. 12 juta;

- 3) alat tulis kantor diperkirakan sekitar Rp 100.000,- x 12 bulan = Rp 1,2 juta.
- 4) biaya pemeliharaan prasarana/sarana sekitar Rp. 2 juta.
- 5) biaya asuransi kerugian atas sarana sekitar 1,5 permil sementara dikesampingkan.

Jumlah biaya tetap diperkirakan sekitar Rp. 97 juta pertahun, untuk tahun pertama. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perlu diadakan penambahan biaya karena pertambahan jumlah program dan peserta pendidikan; kecuali untuk gaji, diperhitungkan dengan kenaikan 10 % tiap tahun. Sedangkan untuk biaya gaji diperhitungkan dengan pengisian jabatan terutama tenaga staf sesuai standar upah.

Biaya Tidak Tetap (Variable Cost).

Biaya tidak tetap meliputi:

- 1) administrasi/persiapan, seperti registrasi, pembukaan, penutupan, ijazah/sertifikat, dan lain lain;
- 2) publikasi;
- 3) honorarium pengajar/pembicara dan kepanitiaan;
- 4) latihan fisik (fasilitas dan tenaga pelatih);
- 5) operasi pendidikan dan bahan ajaran;
- 6) konsumsi selama latihan fisik dan praktek lapangan, termasuk bagi peserta kursus;
- 7) pakaian seragam;
- 8) transportasi ke dan dari tempat latihan/praktek.

Nomor 5 sampai dengan 8 diperhitungkan dengan indeks perpeserta. Rincian biaya tercantum pada Lampiran X.

Biaya listrik, air dan telepon untuk operasi pendidikan telah diperhitungkan sekaligus dalam biaya tetap.

Jumlah biaya tidak tetap :

- 1) program D-I sekitar Rp. 20 juta ditambah Rp. 475.000,- kali jumlah mahasiswa;
- 2) program D-II/D-III dan S-1 sekitar Rp. 15,3 juta ditambah Rp. 225.000,- kali

jumlah mahasiswa;

- 3) program kursus singkat sekitar Rp. 4.550.000,- ditambah Rp. 60.000,- kali jumlah peserta;
- 4) program kursus kilat sekitar Rp. 4.300.000,- ditambah Rp. 130.000,- kali jumlah peserta.

Pajak dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis Titik Impas (Break Event Point).

Untuk perhitungan titik impas maka perlu ditetapkan terlebih dahulu biaya pendidikan ("Harga Jual").

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa lembaga pendidikan setingkat (D I), biaya pendidikan yang dibebankan kepada masing-masing siswa berkisar antara Rp. 1.250.000,- sampai Rp. 2.000.000,- tanpa pakaian seragam. Dalam konsep ini biaya pendidikan diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000,- termasuk untuk pakaian seragam, biaya pendaftaran/administrasi, bahan ajaran (diktat), biaya latihan/praktek lapangan, dan lain lain. Berkenaan dengan "purchasing power" (tingkat daya beli) calon peserta nampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebagai gambaran bahwa penghasilan orang tua responden pelajar/pencari kerja pada umumnya di atas Rp. 250.000,- (55,3 %) bahkan 14,7 % di atas Rp. 500.000,- Hanya sekitar 44,7 % yang di bawah Rp. 250.000,-; itupun biasanya ada saja jalan keluar yang diupayakan untuk mengatasi masalah biaya pendidikan anak bagi kebanyakan orang tua di Indonesia. Estimasi tersebut dikuatkan dengan fakta mengenai besarnya minat para pelajar yang melanjutkan pendidikan pada program diploma sebagaimana dapat disaksikan pada hampir semua lembaga pendidikan tinggi di Jakarta dewasa ini.
- 2) Biaya pendidikan pendidikan untuk program D-II/D-III dan S-1 (tahun kedua dan seterusnya) sudah barang tentu lebih rendah dari tahun pertama karena beberapa item biaya tidak tetap tidak diperlukan lagi. Di samping itu, dalam konsep ini seluruh biaya tetap dibebankan pada program D-I. Dengan mengacu pada biaya beberapa lembaga pendidikan yang berkisar antara Rp. 750.000 sampai Rp. 1.250.000,- maka ditentukan biaya tahun kedua dan

seterusnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- termasuk tambahan pakaian seragam dan lain-lain seperti pada tahun pertama.

- 3) Biaya kursus singkat Rp. 750.000,- termasuk "snack", bahan ajaran dan sertifikat (sama dengan indeks Fakultas Hukum Universitas Pancasila) untuk selama sebulan.
- 4) Biaya kursus kilat Rp. 600.000,- termasuk "snack"/makan, bahan ajaran dan sertifikat (relatif lebih murah dibandingkan dengan yang dilaksanakan beberapa lembaga) untuk selama tiga hari bertempat di hotel atau tempat representatif lainnya.

Dengan rumus : Jumlah biaya = Harga "Jual" x Jumlah Peserta (X) maka, berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran XI, BEP untuk program D-I adalah 86 peserta, program DII/DIII dan S-1 20 peserta, program kursus singkat 7 peserta dan program kursus kilat 10 peserta.

Perkiraan Laporan "Rugi/Laba". Untuk keperluan membuat perhitungan laporan "rugi/laba" terlebih dahulu harus diestimasi rencana "penjualan".

- 1) Dengan memperhatikan minat para para pelajar/pencari kerja yang dihadapkan dengan keterbatasan daya tampung pendidikan tinggi di satu pihak, dan dengan memperhatikan "demand" dari "user" dan yang dikaitkan dengan pertumbuhan industri dan dukungan kebijakan pimpinan Polri di lain pihak, maka dengan pendekatan yang optimistik penawaran program ini akan mendapat sambutan yang cukup besar dari "pasar". Sebaliknya, dengan memperhatikan berbagai kendala yang mungkin dihadapi terutama pada tahap awal pengoperasiannya, termasuk keterbatasan daya tampung fasilitas sewaan, maka rencana "penjualan" disusun dengan pendekatan yang moderat. Dalam hal ini jumlah mahasiswa yang direncanakan diterima untuk program D I adalah 100 peserta; untuk tahun-tahun berikutnya sementara dihitung sama dengan tahun pertama. Tetapi untuk program jangka panjang dengan fasilitas yang lebih memadai, serta dengan semakin solidnya lembaga pendidikan dan memasyarakatnya "private security", maka rencana penerimaan dapat ditingkatkan.

- 2) Rencana penerimaan untuk program D II dan seterusnya ditentukan 50 peserta untuk setiap tingkat. Estimasi tersebut didasarkan atas perhitungan bahwa program D III dan S-1 memiliki daya tarik yaitu peluang mengikuti seleksi masuk Sekolah Perwira Polri, bahkan mungkin saja Sekolah Perwira Militer Wajib Angkatan Darat. Di samping itu, dengan Sistem Kredit Semester (SKS) jumlah peserta tetap diperhitungkan sama yaitu masing-masing 50 orang. Dengan demikian jumlah seluruh mahasiswa sampai tahun keempat maksimal 250 orang. Sudah barang tentu pelaksanaan kuliah diatur pagi sore karena fasilitas dan sarana yang tersedia dianggarkan untuk 200 peserta.
- 3) Penyelenggaraan kursus singkat bagi komuniti sekuriti merupakan hal yang baru. Karena itu penerimaan peserta direncanakan 20 orang setiap kali kursus sekali setahun.
- 4) Penyelenggaraan loka karya, di samping seminar, nampaknya cukup intensif dewasa ini. Bahkan, lembaga amatiran-pun "ikut-ikut" menyelenggarakan loka karya sekuriti; tetapi nyatanya mampu menarik peserta sampai 40 - 50 orang. Dengan pendekatan yang moderat, penerimaan peserta direncanakan 30 orang. Pada tahun pertama dilaksanakan 1 (satu) kali sedangkan tahun berikutnya 4 (empat) kali.

Biaya investasi dan modal kerja dapat bersumber dari dana sendiri atau pihak ketiga. Dalam konsep ini disusun dengan perhitungan modal dari bank dengan bunga sebesar 20 % pertahun. Pinjaman dilakukan dengan sistem "plafond" sehingga bunga diperhitungkan berdasarkan jumlah pinjaman perperiode.

Berdasarkan "Perkiraan Aliran Kas" (cash flow) dari rencana anggaran (cash budget) pada Lampiran XII, seluruh biaya investasi dan modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 225 juta (plafond). Memasuki tahun ketiga seluruh pinjaman sudah dapat dikembalikan bahkan terjadi surplus yang dapat didepositokan sehingga memungkinkan penyelenggara memperoleh bunga sebagai pendapatan lain-lain.

Gambaran terinci mengenai "Perkiraan Laporan Rugi/Laba" dapat dilihat pada Lampiran berikutnya (XIII). Berdasarkan perhitungan tersebut maka pada tahun kedua penyelenggaraan program ini diperkirakan sudah dapat diperoleh penghasilan bersih setelah pajak sekitar Rp. 66 juta lebih; walaupun dari sudut aliran kas masih terjadi

defisit. Pada tahun-tahun berikutnya aliran kas menunjukkan surplus dan penghasilan bersih terus meningkat sampai pada akhir tahun ke lima mencapai Rp. 127 juta lebih, tanpa beban pinjaman lagi.

Penilaian Investasi. Pertama, penilaian investasi dilakukan dengan Metode "Average Rate of Return" atau "Accounting (Simple) Rate of Return (ARR)".

- 1) Berdasarkan laporan rugi/laba di atas, maka rata-rata laba pertahun adalah sebesar Rp. 75,6 juta.
- 2) Jika dibandingkan dengan biaya modal, baik untuk investasi maupun modal kerja, sebesar Rp. 225 juta, maka "rate of return" setiap tahun adalah sekitar 33,6 %.
- 3) Dengan menggunakan metode ARR juga diperoleh hasil yang hampir sama. Rata-rata aliran kas masuk (lihat Lampiran XIV) Rp 98.847.900,- dikurangi penyusutan Rp. 12.000.000,- = Rp. 86.847.900,- dibagi investasi dan biaya modal Rp 225.000.000,- sama dengan 38,6 %.

Metode "Net Present Value (NPV)".

- 1) Sehubungan adanya nilai waktu uang (time value of money), maka metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi (I) dengan nilai sekarang aliran kas masuk (cash inflow) di masa masa mendatang (PV - present value). Rumus : $NPV = PV - I$.
- 2) Berdasarkan perhitungan pada Lampiran XIV maka $NPV = 268.995.713,- - 225.000.000,- = + 43.995.713,-$ yaitu dengan tingkat bunga 20 % selama 5 (lima) tahun.

Dengan penggunaan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa **investasi dapat diterima karena tingkat pengembalian modal mencapai sekitar 35 % dan ditinjau dari nilai waktu uang adalah positif.**

Investasi Jangka Panjang. Investasi jangka panjang sudah barang tentu tidak mungkin dilakukan dengan modal pihak ketiga -bunga belasan sampai 20 %- karena tidak ada keseimbangan antara modal dan bunga dengan penghasilan bersih. Dalam hal ini "cash flow" akan selalu dalam keadaan defisit.

Sebagaimana diutarakan terdahulu, proyek ini menuntut keikutsertaan investor dalam yayasan. Alternatif lain adalah dengan jalan pembangunan secara bertahap. Prioritas pertama adalah mengadakan lahan untuk kampus, kemudian pembangunan sebagian prasarana, sehingga secara bertahap fasilitas dipindahkan ke kampus baru. Pembangunan selanjutnya disesuaikan perkembangan penghasilan. Dalam hal ini pula yayasan dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada instansi yang berwenang. Pola semacam ini dipergunakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan (tinggi) seperti Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, dan lain-lain, setelah berusia belasan tahun.

Analisis Risiko. Kemungkinan risiko bisa terjadi jika jumlah peserta tidak mencapai tingkat BEP. Jika jumlah peserta program D-I tidak mencapai BEP maka untuk mengatasinya adalah dengan memperbanyak penyelenggaraan kursus. Dengan mengamati animo peserta pada pelaksanaan berbagai seminar/lokakarya dalam beberapa tahun terakhir, kecil kemungkinan tidak mencapai BEP yang hanya sekita 10 orang. Walau demikian, pengalaman berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa biasanya pada tahap-tahap awal pengoperasiannya menghadapi keadaan demikian. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang berpengalaman atau mengetahui menyatakan bahkan dalam lima tahun awal operasinya, lembaga pendidikan biasanya menderita kerugian.

Karena dapat mengurangi biaya terutama sewa dan pengadaan sarana, maka kerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan yang sudah memiliki fasilitas merupakan langkah yang tepat. Di samping secara psikologis dapat mempengaruhi "pasar" sinergi dengan Polri merupakan salah satu kiat untuk mengurangi kemungkinan risiko. Di samping itu, untuk mengendalikan biaya direkomendasikan penggunaan pola "organisasi tumbuh"; artinya bahwa rekrut karyawan dilaksanakan secara bertahap sesuai tingkat kemajuan "usaha".

Keberhasilan setiap usaha terletak pada kualitas "produk" dan pelayanan. Di samping itu, faktor-faktor lain yang juga tidak kalah pengaruhnya terhadap keberhasilan adalah masalah publikasi, penampilan, pendekatan dan lain lain.

Kunci keberhasilan "usaha" ini terletak pada kemampuan "after sale service" yaitu tingkat peluang untuk memperoleh kesempatan kerja. Semakin besar peluang yang

tersedia maka akan semakin tinggi pula minat calon peserta. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan dan kerja sama dengan badan-badan usaha sebagai calon "user" atau melalui APSSI (Asosiasi Profesi Sekuriti Swakarsa Indonesia) dan instansi terkait.

Pengaruh pesaing hampir tidak begitu berarti karena lembaga pendidikan ini menawarkan program baru. Kecuali dalam penyelenggaraan kursus karena sudah ada lembaga yang bergerak dalam bidang yang serupa yaitu manajemen proteksi. Tetapi nampaknya program-program lembaga tersebut lebih dititik beratkan pada aspek material. Karena itu untuk menghindari persaingan frontal disarankan agar program-program pendidikan ini difokuskan pada aspek "human resources".

7. TELAHAH ASPEK SOSIAL - EKONOMI.

Proyek ini jelas dapat membantu mengatasi masalah nasional di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dengan obyek studi manajemen sekuriti, pendidikan ini secara konkrit menjawab kebutuhan atas program pendidikan yang berorientasi pasar dalam arti secara nyata diperlukan untuk salah satu lapangan pekerjaan. Pada masa-masa mendatang kebutuhan terhadap hasil didik ini akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri yang membawa serta berbagai permasalahan sekuriti yang semakin kompleks.

Karena itu, dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, program ini sekaligus membuka peluang bagi lapangan kerja yang biasanya kurang begitu diabaikan oleh pengusaha. Bagi para anggota Satpam, pendidikan ini merupakan peluang untuk pengembangan diri dalam peningkatan karier mereka. Di samping itu, program ini juga berfungsi sebagai wahana pengembangan kemampuan sumber daya manusia khususnya bagi para karyawan yang karena sifat tugasnya membutuhkan wawasan sekuriti.

Hasil didik lembaga ini memungkinkan persebaran tenaga-tenaga terdidik dalam bidang sekuriti pada berbagai segi kehidupan khususnya dalam dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja berwawasan sekuriti diharapkan akan semakin melicinkan jalan bagi upaya pembinaan Kamtibmas menuju masyarakat yang "tata tentram kerta raharja".

Dari segi manajemen, proyek ini dapat menampung tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN.

Kata akhir dari kehadiran AFTA pada dasarnya adalah persaingan. Jika pengusaha Indonesia mampu memenangkan persaingan melalui keunggulan kompetitif maka kehadiran AFTA akan semakin mendorong kemajuan perusahaan melalui pembesaran skala produksi dan peningkatan kualitas produk sehingga secara keseluruhan semakin menunjang percepatan pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia. Seiring dengan itu pula, pertumbuhan industri akan semakin didorong oleh peranan investor asing yang diduga akan meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia karena daya tarik perdagangan bebas melalui AFTA, kemudahan-kemudahan melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, serta potensi pasar dan sumber daya yang tersedia.

Sebaliknya, kegagalan dalam persaingan akan dapat mengantarkan perusahaan pada kondisi yang tidak menguntungkan bahkan bisa "gulung tikar". Jika hal demikian terjadi maka risiko yang akan dihadapi bukan saja bernilai ekonomi tetapi juga berdampak sosial, mulai dari masalah kesejahteraan karyawan sampai pada gejolak sosial. Kehadiran AFTA juga membawa konsekuensi merasuknya nilai-nilai budaya yang tidak selalu menguntungkan. Oleh karena itu, jika tidak dikendalikan secara tepat, kehadiran AFTA juga dapat membawa serta perbenturan nilai, persaingan curang bahkan gejolak sosial dan lain lain dampak sekuriti yang merugikan.

Baik melalui pengukuran statistik maupun secara deduktif berdasarkan teori-teori ilmu-ilmu sosial tercermin adanya korelasi positif antara pertumbuhan industri dan bisnis dengan perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lainnya. Karenanya, pertumbuhan industri dan ekonomi umumnya memberikan dampak bagi perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lain khususnya yang berkenaan dengan aktivitas bisnis.

Jika semua faktor penghambat dan pendukung bergerak konstan maka pada masa-masa mendatang, perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan yang menelan

kerugian dan biaya yang tidak kecil cenderung meningkat dan bahkan akan semakin meningkat sebagai akibat pengaruh pertumbuhan industri dan kehadiran AFTA. Sementara itu, kemampuan pengelolaan sekuriti pada banyak perusahaan masih belum dapat diandalkan sepenuhnya apalagi untuk menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks dan profesional. Karena itu, dikaitkan dengan teori kebutuhan Maslow maka berdasarkan telaahan "marketing" khususnya aspek kepentingan dan "need" yang ditinjau dari segi obyek, metode dan subyek sekuriti, prospek usaha pelayanan jasa sekuriti secara potensial cukup cerah untuk dikembangkan.

Karena kecerahan prospek usaha yang dipadukan dengan hasil penelitian lapangan mengenai minat calon pemakai/konsumen (sisi "demand") dan minat calon peserta/pemasok (sisi "supply"), maka ditinjau dari aspek "marketing", gagasan pembentukan lembaga pendidikan manajemen sekuriti cukup laik untuk dikembangkan. Dari aspek legalitas, konsepsi tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pendidikan bahkan terdukung oleh kebijakan pengembangan Siskamtibmas swakarsa sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Tingkat kelaikannya akan semakin tinggi jika sinergi antara pemrakarsa/penyelenggara dengan Polri berhasil dibangun.

Model lembaga pendidikan yang dikonsepsikan adalah suatu sekolah tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DI) sampai akademi (DIII) dan gelar (S-1) bagi para lulusan SMTA, sebagai program utama. Di samping itu juga dapat menyelenggarakan program kursus/penataran/lokakarya bagi komuniti sekuriti maupun karyawan lain yang membutuhkan wawasan sekuriti, sebagai program tambahan.

Ditinjau dari aspek keuangan, gagasan ini sangat laik. Untuk jangka pendek (lima tahun pertama), dengan modal investasi dan modal kerja sekitar Rp. 225 juta (plafond) program ini dapat menghasilkan "laba" rata-rata Rp. 75,6 juta setiap tahun; tingkat pengembalian modal (rate of return) sekitar 35 % dengan perhitungan nilai waktu uang (time value of money) yang positif. Dengan gambaran penghasilan tersebut maka investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan membangun suatu fasilitas pendidikan yang memadai.

Dari sudut sosial - ekonomi proyek ini juga dapat membantu mengatasi masalah nasional di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Di samping itu, melalui program ini diharapkan akan semakin banyak tenaga-tenaga terdidik yang berwawasan sekuriti yang menyebar pada berbagai segi kehidupan khususnya dalam dunia bisnis. Semoga dengan jalan demikian akan semakin melicinkan upaya besar bangsa dan negara mewujudkan masa depan masyarakat Indonesia yang "tata tentram kerta raharja".

2. SARAN.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan disarankan untuk juga membentuk lembaga "konsultasi manajemen sekuriti" sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan. Lembaga ini berfungsi memberikan koreksi dan saran dalam rangka pemecahan masalah sekuriti atas permintaan sesuatu perusahaan. Usaha ini "consentric" dengan "Product Market (PM) Scope" karena berangkat dari landasan yang sama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sekuriti.

Untuk menjamin keberhasilan usaha ini khususnya atas kemungkinan tidak tercapainya BEP (Break Event Point) maka dalam segala hal "sinergi" merupakan kata kunci. Pertama dengan pihak Polri, sebagai penanggung jawab pembinaan Kamtibmas swakarsa, baik dalam hal dukungan atas kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan "penciptaan" peluang "pasar" maupun terhadap kemungkinan penyesuaian kebijakan "in take" dan pendidikan bintangara dan perwira (sarjana) sehingga keluaran pendidikan ini juga bisa tertampung; selama ini, karena kendala anggaran ABRI, pendidikan tersebut sebagian dibiayai dengan gaji para siswa sendiri.

Kedua, sinergi perlu dilakukan dengan konsumen terutama perusahaan-perusahaan besar atau melalui APSSI baik dalam rangka penyaluran hasil didik maupun penawaran program khusus pendidikan karyawan. Berkenaan dengan itu pula, masalah penyaluran hasil didik merupakan tolok ukur keberhasilan lembaga ini. Kendala yang dihadapi dewasa ini adalah kecenderungan "pasar" yang lebih berorientasi pada penggunaan tenaga purnawirawan ABRI. Kendala dimaksud seyogyanya dimanfaatkan sebagai peluang dengan kiat penawaran program kursus bagi anggota/purnawirawan ABRI sebelum terjun ke dunia sekuriti bisnis. Hal itu semua menuntut penyelenggara pendidikan untuk terus memasyarakatkan konsep

"privat security" dengan tuntutan profesionalitasnya.

Kiat lain untuk mencegah kemungkinan risiko antara lain dengan menerapkan organisasi "tumbuh" dan menekan biaya sewa melalui kerja sama dengan penyelenggara pendidikan yang sudah memiliki fasilitas. Di samping itu, jika untuk membiayai proyek ini menggunakan sumber dana pihak ketiga (bank), seyogyanya dilakukan dengan sistem "plafond". dan sebaliknya, kelebihan kas agar senantiasa didepositokan -jika tidak digunakan untuk investasi jangka panjang- karena aliran kas yang relatif konstan dan terkendali. Walaupun demikian, berdasarkan pengalaman beberapa lembaga pendidikan yang biasanya merugi dalam tiga sampai lima tahun pertama, pada akhirnya "usaha" di bidang pendidikan akan cukup "provitabel".

Upaya lain yang perlu dirintis oleh penyelenggara adalah mengadakan pendekatan dengan instansi perpajakan dalam rangka permohonan pembebasan pajak. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena badan hukum ini bergerak dalam bidang pendidikan, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan investasi jangka panjang. Jika langkah tersebut berhasil berarti sekitar Rp 35 juta dana seliap tahun dapat dihimpun untuk keperluan investasi dan kegiatan sosial.

Untuk investasi jangka panjang -modal sampai Rp 2 milyar- seyogyanya tidak lagi menggunakan modal pihak ketiga (bank) karena penghasilan bersih tidak seimbang dengan besarnya modal dan bunga, tetapi mengusahakan keikutsertaan investor dalam yayasan. Alternatif lain adalah dengan menerapkan pola "kampus tumbuh"; artinya pembangunan dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan lembaga pendidikan tinggi.

Berkenaan dengan hasil penelitian, khususnya yang menyangkut korelasi antara perkembangan kejahatan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri terutama atas variabel-variabel yang diduga saling mempengaruhi, kiranya dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Makalah/Karya Ilmiah Lainnya.

Adnanputra, Ahmad S., M.A., M.S., D.B.A., Bisnis & Kewaspadaan, Makalah pada Seminar IMC (Indonesia Managers Club) di Hotel Hilton, Jakarta, 30 April 1992.

Etika Bisnis : Uraian tentang Kriminalitas Korporat, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia, Makalah pada "Global Theme Programme - Panel Discussion" AIESEC Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Nopember 1991.

Awaloedin, DR., Keterampilan Management dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah "Organization Strategy & Human Resources Development" Pada Program Studi MBA - IBMJ, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arief, S.H., DR., Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Penataran Kriminologi, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 27 Desember 1991.

Basuki, J.D. Soediono, S.H., S.E., Partisipasi Investor Asing dan Perusahaan PMA dalam Perusahaan PMDN dan Perusahaan Nasional lain, Makalah pada Seminar PP No. 17 Tahun 1992, Keppres No. 32, 33, 34 Tahun 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19 - 20 Agustus 1992.

Billy Tunas, Drs., M.Sc., Management Science, Bahan Kuliah Program Studi MBA - IBMJ, Jakarta, 1991.

Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi : Buletin Statistik Bulanan, Oktober 1992, Jakarta, 1992.

Indikator Kesejahteraan Rakyat 1991, Jakarta, 1992.

Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen dan B.M. Reksodipoetro, PT. Pembangunan/Ghalia Indonesia, Cetakan Keenam, Jakarta, 1982.

Cunningham, William C., Strautchs, John J., Van Meter, Clifford W., Private Security Trends 1970 -2000, Butterworth-Heinemann, Stoneham, 1990.

Dispullahta Polri, Polri Dalam Angka 1991/1992, Jakarta, 1992.

Fahey, Liam, The Strategic Planning - Management Reader, Prentice Hall, New Jersey, 1989.

- Fennelly, Lawrence J., (Editor), Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention, Second Edition, Butterworths Publishers, Stoneham, 1989.
- Gillad, Benyamin, dan Gillad, Tamar, The Business Intelligence System, Amacom, New York, 1988.
- Harkristuti, S.H., DR., Indikator-Indikator Pengukuran Perkembangan Kejahatan di Indonesia, Makalah pada Seminar Kriminologi VI, Universitas Diponegoro Semarang, 16 - 18 September 1991, hal. 8.
- Ihalauw, John, Ph.D., Business Intellience : Suatu Alat Manajerial Untuk Keunggulan Kompetitif, Bahan Kuliah Pada Program Studi MBA IBMJ, Jakarta, 1991.
- Kepala Kepolisian RI., Kecenderungan Perkembangan Kriminalitas dan Konsep Penanggulangannya dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Makalah pada Seminar Lustrum VII Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol - UGM, Yogyakarta, 1992.
- Mardjono Reksodiputro, Metode Penelitian dalam Kriminologi, Makalah pada Penataran Kriminologi, Universitas Andalas Padang, 30 Oktober 1989, hal. 2.
- Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI., Globalisasi dan Prospek Pariwisata Indonesia dalam Dasawarsa Mendatang, Naskah Ceramah pada Mahasiswa Program MBA-ekskutif IBMJ, Jakarta, 23 Oktober 1991, hal. 6-7.
- Menteri Perindustrian RI., Kebijaksanaan dan Perkembangan Pembangunan Industri Nasional, Naskah Ceramah pada Kra XXV Lemhannas Jakarta, 28 Juli 1992, lampiran 2-a.
- Ohmae, Kenichie, Ph.D., The Mind of The Strategist, Penguin Books, New York, 1988.
- Perwira Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Angkatan XXVIII, Laporan Hasil Survei Terhadap Hotel dan Obyek Wisata Menyongsong Tahun Kunjungan Indonesia 1991, Jakarta, 1990.
- Polak, J.B.A.F. Major, Drs., Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1976.
- Porter, Michael E., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1988.
- Post, Richard S., Ph.D., dan Kingsbury, Arthur A., Ph.D., Security Administration : An Introduction, Edisi ketiga, Charles C. Thomas - Publisher, Springfield Illinois, 1977.
- Ries, AL, dan Trout, Jack, Marketing Walfare, McGraw-Hill Book Company, New York, 1986.

Ruskanda, S. Farid, M.Sc., Ir., DR., Analisa Mengenai Dampak Sekuriti (Amdas) terhadap Pelita Lima : Sudut Pandang Iptek dan Industri, Makalah Pada Seminar Analisa Dampak Sekuriti II, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 27 Desember 1989.

Sadono Sukirno, Drs., M.Sc., Pengantar Teori Makroekonomi, Bina Grafika, Jakarta, 1981.

Sanyoto Sastrowardoyo, Ir., Kepala BKPM, Deregulasi Penanaman Modal Asing Melalui PP No. 17 Tahun 1992 dan Paket Deregulasi Juli (Pakjul) 1992, Makalah pada seminar PP No. 17 Tahun 1992, Keppres No. 32, 33, 34 Tahun 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19 - 20 Agustus 1992.

Schneider, Eugene V., Sosiologi Industri, Alih Bahasa : J.L. Ginting, Aksara Persada, Edisi Kedua, Jakarta, 1986.

Shim, Jae K., dan Siegel, Joel G., Ph.D., CPA , Schaum's Outline of Theory and Problems of Managerial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York USA, 1984.

Soerjono Soekanto, S.H., M.A., DR., Sosiologi - Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Edisi Baru Keempat, Jakarta, 1990.

Suad Husnan, Drs., M.B.A., dan Suwarsono, Drs., Studi Kelayakan Proyek, BPFE - LMP2M AMP, Yogyakarta, 1984.

Supranto, J., M.A., Statistik : Teori dan Aplikasi, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.

Ulbrich, Holley, International Trade & Finance : Theory and Policy, Prentice-Hall, Inc., New Jersey USA, 1983.

Artikel/Kata Sambutan.

Bisnis Indonesia (Ed), Kejahatan Bank Libatkan Orang Dalam, 16 September 1992.

Kompas (Ed), Ke WC pun diawasi, 1.500 pekerja Mogok, 30 Desember 1992.

Menteri Perdagangan RI., Sambutan Pada Pemasyarakatan Hasil KTT ASEAN IV Tingkat Eselon I Pusat, Jakarta, 17 Juni 1992.

Menteri Perindustrian RI., Sambutan Pada Acara Wisuda Institut Bisnis & Manajemen Jayakarta, Jakarta, 1 Oktober 1992.

Menteri Pertahanan Keamanan RI/ Panglima ABRI, Kata Sambutan Pada Rapat Pimpinan ABRI, di Dilly, 27 Maret 1979.

Pria Takari Utama, Antara Premi, Laba dan Pasar, Majalah InfoBank nomor 155, Jakarta, Nopember 1992, hal.64.

Suara Pembaruan (Ed), Semua Hotel diinstruksikan Periksa Sistem Pengamanannya, 23 Januari 1993.

Dokumen.

Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang RI. Nomor : 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Undang-Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 17 Tahun 1992 tentang Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Singapore Declaration 1992.

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.

BATASAN PENGERTIAN

1. SEKURITI.

Sekuriti merupakan peng"indonesia"an istilah "security" dalam bahasa Inggris. Ada yang mengartikan sekuriti secara sempit, yaitu hanya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan (pencegahan dan penindakan) kejahatan dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi aman (secure). Post dan Kingsbury (Security Administration, 1977) mengemukakan bahwa "security" mempunyai banyak pengertian, tergantung dalam konteks apa term tersebut dipergunakan. Variasi tipe dan tingkatan sekuriti melahirkan pengertian tersendiri. Misalnya, "national security", "international security", "internal security", "private security", "retail security", "physical security", dan "industrial security", diartikan sendiri-sendiri dalam percakapan sehari-hari serta kadang-kadang tidak jelas dan digunakan secara bergantian. Dikeemukakannya bahwa "security" berasal dari bahasa Latin "securus" yang berarti "safe, free from danger". Terjemahan aslinya meliputi sembilan area pengertian :

- 1) safe,
- 2) free from danger,
- 3) feeling no care or apprehension,
- 4) protected from or not exposed to danger,
- 5) guardianship,
- 6) free from risk,
- 7) to satisfy,
- 8) to protect,
- 9) take effective precautions against.

Berangkat dari penjelasan Post, maka dalam penelitian ini istilah sekuriti mencakup pengertian pencegahan kejahatan (crime prevention) dan pencegahan kerugian (loss prevention), dalam rangka perlindungan materil/ fasilitas/ peralatan, personil, informasi dan pencegahan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan atau melawan hak dan mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini

terutama meliputi keperluan organisasi bisnis (business security), industri (industrial security) dan lembaga-lembaga lain (institutional protective services).

2. JASA SEKURITI.

Yang dimaksud dengan jasa sekuriti dalam penelitian ini adalah berupa penyiapan maupun pengembangan kemampuan tenaga kerja dalam bidang sekuriti, pengembangan wawasan sekuriti bagi tenaga kerja non-sekuriti, dan pemberian bantuan pemikiran dalam pemecahan masalah-masalah sekuriti.

3. USAHA.

Dalam konsep ekonomi, kegiatan usaha mencakup pengertian segala upaya yang mendatangkan profit. UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri mengartikan usaha sebagai setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Dalam penelitian ini, pengertian demikian tidak digunakan sepenuhnya, mengingat permasalahan yang digarap adalah lembaga pendidikan yang menyangkut misi sosial; lembaga yang nirlaba. Tetapi dalam banyak kasus biasanya suatu lembaga pendidikan tidak mungkin "exist" tanpa mengabaikan aspek ekonomi/ keuangan; artinya suatu lembaga pendidikan juga harus mempertimbangkan profitabilitas dari misi sosialnya.

4. PERTUMBUHAN INDUSTRI.

Industri pada hakekatnya adalah agregat perusahaan sejenis (John Ihalauw). Artinya sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang berkenaan dengan satu atau sekelompok jenis produk tertentu.

Industrialisasi pada hakekatnya merupakan proses pembangunan masyarakat

industri yang menyangkut peningkatan kualitas serta pendayagunaan potensi manusia Indonesia (Tap. MPR nomor : II/MPR/ 1988 tentang GBHN, bab IV D - Ekonomi, butir 2 huruf a).

Dengan demikian konsep "yang berkenaan dengan pertumbuhan industri" tidak hanya sekadar laju pertumbuhan sektor industri tetapi mencakup pengertian yang lebih luas yakni peranannya sebagai penggerak utama dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi -antara lain dunia usaha- yang merupakan titik berat pembangunan nasional.

5. MANAJEMEN.

Pengertian manajemen dapat merupakan proses, pengetahuan dan lembaga, yang pada dasarnya dan secara umum diterima adalah "getting thing done through other people". Sebagai suatu proses manajemen memiliki sejumlah fungsi (basic functions) yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actualization), dan pengendalian (control) oleh pejabat dalam suatu organisasi yang mengatur penyelenggaraan segala aktivitas (mentroling). Sedangkan sebagai suatu lembaga, manajemen terdiri atas sekelonju sasaran dan tujuan yang diinginkan.

6. PENDIDIKAN.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Pasal 1 UU No. 2/1989). Lembaga Pendidikan adalah wadah yang menyelenggarakan pendidikan yang terorganisasikan secara rasional.

7. AFTA

AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah salah satu bentuk blok perdagangan dunia yang meliputi suatu kawasan tertentu -dalam hal ini kawasan Asia Tenggara (South-East Asian)- yang menyepakati penghapusan tarif termasuk hambatan non-tarif lainnya antar sesama anggota bagi komoditi yang disepakati, tetapi masing-masing negara tetap mempertahankan tarifnya sendiri terhadap negara lain.

KONSEP PERDAGANGAN BEBAS

Alasan yang paling utama bagi terjadinya perdagangan internasional adalah karena tidak setiap negara mampu menghasilkan sendiri semua barang yang dibutuhkannya. Indonesia, misalnya, tidak mampu menghasilkan sendiri mesin-mesin industri sehingga harus mengimpor dari negara-negara maju. Sebaliknya, negara maju tidak mampu menghasilkan sendiri kayu lapis atau karet alam, misalnya, sehingga Indonesia berpeluang mengekspor.

Sebagaimana dijelaskan Adnanputra ⁵⁶, bahwa konsep perdagangan internasional pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith (1776), dengan teori "absolute advantage" (keunggulan absolut). Dikemukakannya bahwa untuk mencapai kemakmuran maka suatu negara harus melakukan spesialisasi dalam menghasilkan produk dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari pada negara lain. Melalui keunggulan absolut, kelebihan produksi suatu negara dapat diekspor ke negara lain yang membutuhkannya.

Teori Smith dikoreksi oleh David Ricardo (1817) dengan teori "comparative advantage" (keunggulan komparatif)-nya. Dalam hal ini suatu negara dapat memiliki keunggulan dengan melakukan spesialisasi dalam menghasilkan suatu produk dengan harga yang relatif lebih rendah dari pada di negara lain.

Contoh : suatu negara menghasilkan satu unit suatu produk dengan jumlah jam kerja (labour hours) sebagai berikut :

	Bahan Pakaian (Cloth)	Minuman (Wine)
Negara A :	100	120
Negara B :	90	80

⁵⁶ Adnanputra, Kuliah "Marketing Economic & Global Strategy" pada Peserta Program MBA - Eksekutif Batch IV D IMBJ.

Dengan teori Smith, maka negara B dipandang lebih efisien karena dapat menghasilkan satu unit kain dengan 90 jam kerja dan satu unit minuman dengan 80 jam kerja. Tetapi dengan teori Ricardo kedua negara dapat memiliki keunggulan komparatif. Jika seandainya A menukarkan satu unit bahan pakain dengan satu unit minuman B (jika seandainya B mau) maka berarti satu unit minuman bagi A menjadi lebih efisien 20 jam kerja (120 - 100). Sebaliknya juga menguntungkan B karena jika membuat sendiri satu unit bahan pakain membutuhkan 90 jam kerja tetapi dengan jalan penukaran hanya membutuhkan 80 jam kerja; menghemat 10 jam kerja.

Tetapi ternyata teori Ricardo yang hanya memperhitungkan nilai tenaga kerja (human resources) dipandang oleh Eli Heckschuer dan Bertil Ohlin belum sempurna karena belum memperhitungkan semua faktor produksi. Menurut Heckschuer - Ohlin bahwa keunggulan komparatif berdasarkan atas "factor intensities" antar komoditi dan "factor endowment" antar bangsa/negara. "Factor intensity refers to the relative proportion of capital to labor required to produce a particular commodity. Factor endowment is the relative amounts of the factors of production that a country has".⁵⁷

Misalnya, untuk produksi 1 (satu) unit baja membutuhkan modal (K) dan tenaga kerja (L) dengan rasio 4 K : 1 L sedangkan 1 (satu) unit bahan pakaian dengan rasio 1 K : 2 L. Ini berarti bahwa baja adalah intensif (padat) modal sedangkan pakaian intensif tenaga kerja (padat karya). Biaya tenaga kerja dapat dihitung berdasarkan gaji/upah sedangkan biaya modal berdasarkan tingkat bunga. Misalnya, pada negara A biaya tenaga kerja \$ 20 perhari dan biaya modal \$ 10 dari \$ 100 (10 %) atau 2 : 1. Di negara B masing-masing \$ 40 dan \$12 dari \$ 100 (12 %) atau 3 1/3 : 1. Berarti negara A relatif memiliki faktor endowment dalam hal tenaga kerja dan negara B dalam hal modal.

Preposisi dasar yang digunakan Heckschler - Ohlin bahwa ekspor adalah komoditas yang lebih intensif dalam faktor produksi yang berlimpah sedangkan import dalam faktor produksi yang langka. Sesuatu negara memiliki keunggulan komparatif atas sesuatu komoditas jika biaya produksi lebih murah dari negara lain.

⁵⁷ Holley Ulbrich, *Op.Cit.*, halaman 85.

Contoh : (currency umum)

Negara	Negara I		Negara II	
Komoditas	pakaian	baja	pakaian	baja
Modal/unit	2	4	2	4
T.Kerja/unit	5	2	5	2
Biaya modal	\$ 3		\$ 6	
Biaya T.Kerja	\$ 5		\$ 2	
Biaya/unit	\$ 31	\$ 22	\$ 22	\$ 28

Dari contoh di atas, pakaian -padat karya- lebih murah di negara II dengan tenaga kerja berlimpah sedangkan baja lebih murah di negara I dengan modal berlimpah.

Landasan berpikir dari teori Heckscher - Ohlin adalah "abondancy" (berlimpah) dan "scarcity" (kelangkaan) yang merupakan faktor "endowment". Teori ini disebut modern karena sudah dinamis, yaitu berpikir ke masa depan dengan memperhitungkan faktor "endowment". Tetapi kelemahannya masih dibatasi pada perbandingan antar dua-dua saja (two-ness); kalau banyak tentu sulit. Selain itu hanya melihat satu sisi saja yaitu "supply"; belum memperhitungkan aspek "demand".

Leontin, mengajukan konsep penyempurnaan atas preposisi Heckscher - Ohlin. Ada 5 (lima) hal yang dikemukakannya :

- 1) pola perdagangan sesuatu komoditas di samping ditentukan oleh faktor tenaga kerja dan modal, juga ditentukan oleh faktor ketiga yaitu tanah dan sumber alam atau resources;
- 2) modal tidak hanya pabrik, mesin, alat dan lain lain, tetapi juga pengetahuan, ketrampilan, dan lain lain;
- 3) faktor berlimpah mungkin saja tidak murah jika pasar tidak sempurna atau terjadi kemerosotan "demand";
- 4) kalau sesuatu barang menjadi padat modal pada suatu negara, maka juga berlaku di mana-mana;
- 5) pola perdagangan juga bisa diidekat dari beberapa hal seperti "economy of scale", kemajuan teknologi, "Product Life Cycle (PLC)", dan keanekaragaman kebutuhan.

Pemikiran Leontin mengawali lahirnya konsep "competitive advantage" (keunggulan kompetitif/daya saing).

GLOBALISASI - REGIONALISASI.

Meningkatnya volume perdagangan internasional dan makin pentingnya perdagangan internasional bagi bangsa-bangsa di dunia membuat kita percaya bahwa perdagangan bebas (free trade) adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan merupakan sesuatu yang didambakan bangsa-bangsa. Terlalu banyak risiko, seperti penciptaan kegiatan ekonomi, keresahan politik, bila perkembangan perdagangan bebas dibendung atau dikurangi".⁵⁸

Menyadari kelemahan sistem tarif, maka setelah Perang Dunia II timbul pemikiran untuk menghapuskan tarif. Pemikiran demikian melahirkan kesepakatan beberapa negara untuk mengadakan "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT).

Putaran Kennedy yang berlangsung antara 1963 - 1967 telah menghasilkan penurunan tarif sebesar 50 % atau lebih yang meliputi sekitar dua-pertiga produk-produk negara maju. Putaran Tokyo (1973 - 1979) menghasilkan pengurangan dampak hambatan non-tarif (non tariff barriers) terhadap perdagangan internasional".⁵⁹

Kepentingan untuk mewujudkan perdagangan dunia yang benar-benar bebas semakin populer dengan kehadiran konsep globalisasi. Seperti dijelaskan Adnanputra⁶⁰, globalisasi sebagai istilah ekonomi -walaupun sudah terjadi sejak hadirnya agama-mulai populer dengan adanya tulisan Theodore Levitt "The Globalization of Markets" (Harvard Business Review, May - June, 1983).

Levitt mengemukakan bahwa produk yang dibuat oleh suatu negara dapat dipasarkan di negara-negara lain tanpa perubahan yang berarti mengenai desain (global product), karena pada dasarnya selera atau kebutuhan manusia adalah sama (the global communality). Contoh, wolkman, sony, levis, sepatu bally, dan lain lain.

⁵⁸ Hadi Satyagraha, Berpacu dalam AFTA : Dari Keunggulan Komparatif ke Unggulan Kompetitif, Majalah Usahawan No, 12 th XXI Desember 1992, halaman 8.

⁵⁹ Loc.Cit.

⁶⁰ Adnanputra, Loc.Cit.

Globalisasi berlandaskan pada sikap berpikir "globalism". GATT pada dasarnya mengacu pada konsep globalisasi. Walaupun banyak kemajuan yang dicapai tetapi nyatanya GATT dipandang tidak berhasil menjalankan misinya mewujudkan perdagangan dunia yang benar-benar bebas. Hal demikian mudah difahami karena konsep pemecahan terhadap sesuatu masalah yang dilihat dari berbagai sudut yang berbeda kadangkala menimbulkan "conflicting opinion". Kondisi demikian melahirkan konsep "regionalization" yang berlandaskan pada sikap berpikir "regionalism" sebagai suatu "controversial issue". Konsep regionalisasi melahirkan "regional trading blocks".

"Regional trading blocs" mengacu pada konsep "economy integration". Ada 4 (empat) bentuk integrasi ekonomi yang didasarkan atas cepat/lambatnya proses integrasi, yaitu :

- 1) "free trade area" : bea masuk sesama anggota dihapuskan untuk komoditi yang disepakati, tetapi masing-masing negara tetap mempertahankan tarif terhadap negara lain;
- 2) "customs union" : di antara sesama anggota tidak ada tarif tetapi terhadap negara lain dikenakan tarif yang sama/seragam untuk komoditi yang sama (pada abad 19 terjadi di Jerman yang disebut Deutche Zollverein, dan abad modern lahir : Benelux yaitu Belgia, Nederland dan Luxemburg);
- 3) "common market" : kesepakatan mengenai ketentuan kompensasi terhadap pengangguran, "exchange rate", pasar tenaga kerja dan pasar modal, bahkan membentuk semacam parlemen bersama (dipraktekkan oleh Masyarakat Ekonomi Eropah - MEE);
- 4) "economic union" : mengatur semua masalah ekonomi (supranational governing) termasuk mata uang dan kebijakan- kebijakan yang bersifat global (dalam proses yang terjadi di Eropah Barat dewasa ini).

Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa :

Seperti dimaklumi, Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 belum berhasil menciptakan suatu sistim perdagangan internasional yang bebas dari terlalu banyak hambatan baik tarif maupun non tarif. Proteksionisme dalam berbagai bentuk masih banyak menghambat perdagangan internasional. Perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Rusia dan Eropa Timur pada umumnya, merosotnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah pengangguran di

*negara maju, serta perbedaan perkembangan ekonomi Utara - Selatan yang semakin besar, telah menambah rumitnya upaya penerapan sistim perdagangan internasional yang dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi dunia.*⁶¹

Hal itu semua nampaknya telah semakin memberikan angin bagi tumbuhnya blok-blok perdagangan. Di samping EC (European Community) yang dalam proses, lahir NAFTA (North America Free Trade Area) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area).



⁶¹ Menteri Perdagangan RI., Loc.Cit.

**PETIKAN DARI BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKENAAN
DENGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

I. UU. NOMOR 2/1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

- a. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 47).
- b. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (pasal 10).
- c. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan : umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademik dan profesional.
 - 1) Pendidikan akademik diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
 - 2) Pendidikan profesional diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu (pasal 11).
- d. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan : dasar, menengah dan tinggi (pasal 12).
- e. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas (pasal 16).
- f. Ketentuan pidana hanya mengatur mengenai masalah gelar dan kewajiban menjadi tenaga pendidik (pasal 55 dan 56).

II. PP. NOMOR 30/1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

- a. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana; dan pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma dan Program Spesialis (pasal 5).
- b. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu (pasal 6).
- c. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus (pasal 6).
- d. Sekolah Tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu (pasal 6).
- e. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian sejenis (pasal 6).
- f. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu (pasal 6).
- g. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan sasaran program studi (pasal 13).

III. PP. NOMOR 73/1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

- a. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar (pasal 1 ayat 1 dan 4).
- b. Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya (pasal 5).
- c. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke

- jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pasal 14).
- d. Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkat kemampuan yaitu, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas (pasal 15).

IV. KEPUTUSAN MENDIKBUD NOMOR : 0686/U/1991 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.

- a. Akademi terdiri atas satu jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program D I, D II, dan/atau D III.
- b. Politeknik terdiri atas tiga jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program D I, D II, D III, dan/atau D IV.
- c. Sekolah tinggi terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program D I, D II, D III, dan/atau D IV, dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program Sp I, Sp II, S 1, S 2, dan/atau S 3.
- d. Institut terdiri atas tiga fakultas atau lebih yang menyelenggarakan program S1 dan/atau program diploma dan terdiri atas dua jurusan atau lebih yang masing-masing menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S2, S3, Sp I dan Sp II.
- e. Universitas terdiri atas beberapa fakultas yang menyelenggarakan program S1 dan/atau diploma dan terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S2, S3, Sp I dan Sp II.
- f. Usul pendirian perguruan tinggi disampaikan kepada Dirjendikti melalui Kopertis bagi PTS dengan melampirkan persyaratan dan hasil studi kelayakan. Dalam waktu 6 (enam) bulan Dirjen memberi pertimbangan dan dalam waktu 3 (tiga) tahun pemrakarsa sudah harus mengajukan usul persetujuan pendirian kepada Mendikbud melalui Kopertis dan Dirjendikti bagi PTS.
- g. Lampiran Keputusan Mendikbud nomor : 0686/U/1991 mengenai persyaratan minimal unsur pelaksana akademik, sarana dan prasarana, jumlah dan kualifikasi dosen, serta tenaga administrasi dan penunjang akademik, dituangkan di belakang lampiran ini.

Catatan : Ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pembahasan tetapi belum dikutip dalam lampiran ini, dicantumkan dalam teks naskah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0686/U/1991 TANGGAL 30 DESEMBER 1991

1. PERSYARATAN MINIMAL UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Bentuk PT	Akademi	Politeknik	Sekolah tinggi	Institut	Universitas	
					Kelompok IPA	Kelompok IPS
Unsur pelaksana akademik						
Fakultas	-	-	-	3	3	2
Jurusan	1	3	2	6	6	4
Bagian	Jumlah didasarkan atas program studi					
Laboratorium/unit komputer	Jumlah didasarkan atas bidang ilmu					

2. PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PRASARANA

Bentuk PT	Akademi/ Politeknik		Sekolah Tinggi		Institut/ Universitas	
	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS
Prasarana dan sarana (M ²)						
1. Ruang Kuliah	100	100	100	100	200	200
2. Ruang Kantor	100		100		200	
3. Ruang Perpustakaan dan unit komputer						
4. Ruang Laboratorium	500		500		1000	
5. Tanah	5000		5000		10000	

3. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN KUALIFIKASI DOSEN

Bentuk PT	Akademi/ Politeknik		Sekolah tinggi		Institut/ Universitas	
	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS
1. Kualifikasi Pendidikan						
a. Program Pendidikan Profesional						
- S1, D IV	6	6	6	6	6	6
b. Program Pendidikan Akademik						
- S3	-	-	-(4)	-(4)	-(4)	-(4)
- S2	-	-	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
- S1	-	-	4(-)	4(-)	4(-)	4(-)
2. Kualifikasi jabatan :						
a. Guru Besar/ Lektor dengan Gelar Doktor	-	-	-(4)	-(4)	-(4)	-(4)
b. Lektor/Doktor	-	-	1(-)	1(-)	1(-)	1(-)
c. Lektor/Magister	1	1	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
d. Asisten	5	5	3(-)	3(-)	3(-)	3(-)

Catatan : Nilai dalam tanda kurung untuk Program S2/Program Sp I

4. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN KUALIFIKASI
TENAGA ADMINISTRASI DAN PENUNJANG AKADEMIK

Bentuk PT	Akademi		Politeknik/ Sekolah tinggi		Institut/ Universitas	
	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS	Kelom- pok IPA	Kelom- pok IPS
1. Tenaga administrasi :						
a. Jumlah	3		3		6	
b. Kualifikasi:						
S1	1		1		1	
D III	2		2		2	
SMTA						
2. Tenaga Penun- jang Akademik:						
a. Jumlah	3		10		20	
b. Kualifikasi:						
D III	1		6		12	
SMTA	2		4		8	

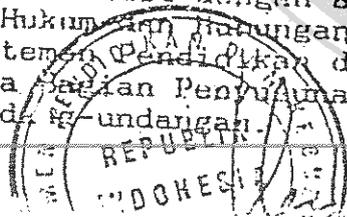
ILMU POLISIAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SHAKTI - DHARMA - WASPADA

ltd.

Fuad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.



Haruliyah,
STP 170 344 753

MODEL ANGKET KELAIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MANAJEMEN SEKURITI DI JAKARTA

Pengantar.

Mengingat permasalahan mengenai sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pendidikan yang dihadapi bangsa kita dewasa ini di satu pihak, dan tuntutan profesionalisme termasuk dalam pekerjaan sekuriti khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis di lain pihak, maka perlu dijajagi kemungkinan mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi swasta dalam bidang sekuriti. Untuk maksud tersebut dipandang perlu terlebih dahulu mengadakan suatu penelitian (feasibility study) guna memperoleh informasi sampai di mana kebutuhan perusahaan terhadap lulusan pendidikan tinggi dimaksud. Di lain pihak juga perlu diketahui sampai di mana minat para pemuda lulusan/calon lulusan SLTA termasuk mereka yang sudah bekerja seperti Satpam (Satuan Pengamanan) terhadap pendidikan tinggi sekuriti.

Hasil penelitian ini, setelah dikaitkan dengan berbagai faktor lain, akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik bagi badan-badan sosial yang berminat sebagai penyelenggara maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil keputusan mengenai penyelenggaraan pendidikan dimaksud.

Dalam proyek penelitian ini, bapak/sdr. telah dipilih sebagai salah seorang responden. Harapan kami kiranya, dengan kehormatan ini, bapak/sdr. berkenan ikut serta dalam proyek penelitian ini dengan memberikan jawaban yang sebenarnya atas pertanyaan yang diajukan pada lembar berikut ini.

Terima kasih atas kesediaan bapak/sdr. berperan serta dalam proyek penelitian ini.

Penjelasan (Substansi)

Istilah sekuriti dalam penelitian ini adalah peng"indonesia"an dari "security" dalam bahasa Inggris yang biasanya diterjemahkan dengan keamanan dan ketertiban;

sehingga karenanya seringkali hanya dikaitkan dengan angkatan bersenjata termasuk kepolisian. Sebenarnya tidaklah demikian.

Sekuriti ternyata tidak hanya sesempit yang digambarkan di atas. Abraham Maslow, pakar dalam ilmu-ilmu sosial/psikologi misalnya, menyusun hirarki kebutuhan manusia dalam beberapa kategori, antara lain adalah kebutuhan "security". Kebutuhan ini mencakup pula, misalnya jaminan hari tua atau "job security" yaitu jaminan tidak akan mendapat perlakuan tidak manusiawi atau diberhentikan semena-mena dalam pekerjaannya. Karena itu pengertian "security" menjadi lebih luas. Ada "international security", "national security", "social security", "internal security", "industrial security", "business security", dan lain lain.

Pada tingkat "social security", di samping "crime prevention", bahkan juga mencakup segenap hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerugian (loss prevention). Berkaitan dengan itu pula maka pendidikan sekuriti akan berkaitan dengan lebih banyak lagi bidang pekerjaan, baik dalam hal keamanan dan ketertiban perusahaan, masyarakat dan negara maupun analisis dan pencegahan kerugian pada umumnya.

Satpam sebenarnya hanyalah bagian kecil dari fungsi "industrial security" yang dipimpin oleh "chief security" atau "security manager" pada setiap perusahaan. Di negara-negara maju terdapat program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga dimaksud. Kecuali pendidikan Satpam, di Indonesia belum ada program studi demikian.

MODEL M-1

DIISI OLEH PIMPINAN/STAF YANG MEMBAWAHI
PIMPINAN (CHIEF/MANAGER) SEKURITI

Data Umum.

(Pilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan cara melingkari huruf di depannya, atau mengisi jawaban pada baris kosong yang tersedia (tanda), atau coret jawaban yang tidak tepat jika terdapat tanda *).

- a. Nomor : (dikosongkan).
- b. Tanggal Pengisian :
- c. Tempat Pengisian :
- d. Perusahaan
 - 1) status : Swasta/ BUMN/ Koperasi/ Patungan*
 - 2) modal : PMA/ PMDN/ Non-PMA-PMDN*
 - 3) bidang usaha/industri : pertanian/ manufaktur/ jasa*
 - 4) bidang kegiatan :

Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti.

- 1. Apakah perusahaan bapak/sdr. pernah mengalami kerugian karena gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari luar perusahaan ?
 - a. Seringkali. b. Kadang-kadang. c. Pernah.
 - d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.
- 2. Apakah perusahaan bapak/sdr. pernah mengalami kerugian karena gangguan akibat kelalaian karyawan sendiri ?
 - a. Seringkali. b. Kadang-kadang. c. Pernah.
 - d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.

3. Apakah perusahaan bapak/sdr. pernah mengalami kerugian karena kekurangan-
tepatan atau kekurangan-jelian dalam mempertimbangkan akibat/dampak dari suatu
keputusan ?
 - a. Seringkali. b. Kadang-kadang. c. Pernah.
 - d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.
4. Apakah pimpinan perusahaan sudah merasa yakin bahwa seluruh mekanisme
keluar masuknya barang terjamin dari penyelewengan dalam tubuh perusahaan ?
 - a. Yakin. b. Masih belum yakin benar.
 - c. Diragukan. d. Belum terjamin.
5. Apakah perusahaan bapak/sdr. sudah mengaplikasikan taktik pencegahan kerugian
yang mungkin bersumber dari mantan karyawan yang berhenti/diberhentikan ?
 - a. Sudah. b. Belum sepenuhnya.
 - c. Sama sekali belum tetapi sudah terpikirkan d. Belum terpikirkan.
6. Apakah biodata setiap karyawan sudah terhimpun dan senantiasa dimutakhirkan ?
 - a. Terhimpun dan senantiasa dimutakhirkan.
 - b. Terhimpun tetapi tidak senantiasa dimutakhirkan.
 - c. Belum terhimpun tetapi sudah terpikirkan.
 - d. Belum terpikirkan.
7. Apakah pejabat sekuriti atau karyawan lain yang ditunjuk benar-benar sudah
memahami mengenai seluk-beluk asuransi sehingga perusahaan dijamin tidak
dirugikan jika terjadi klaim ?
 - a. Sudah. b. Baru secara umum. c. Masih diragukan.
8. Apakah perusahaan bapak/sdr. telah merumuskan konsep perlindungan informasi
untuk mencegah kebocoran ?
 - a. Sudah. b. Belum ada tetapi sudah dipikirkan. c. Belum terpikirkan.
9. Apakah perusahaan bapak/sdr. telah membuat sistem perlindungan instalasi
komputer ?
 - a. Sudah. b. Belum ada tetapi sudah dipikirkan. c. Belum terpikirkan.

10. Manajemen sekuriti pada perusahaan bapak/sdr. mencakup bidang kegiatan apa saja ?
- a. Pengamanan fisik/material/fasilitas;
 - b. Pengamanan personil;
 - c. Pengamanan informasi dan kegiatan;
 - d. Sistem Intelijen Bisnis;
 - e. Analisis kerugian;
 - f. Analisis dampak lingkungan;
 - g.
 - h.
- (Bisa lebih dari satu jawaban).
11. Apakah perusahaan bapak/sdr. telah mengembangkan konsep sekuriti personil dalam kaitannya dengan produktivitas dan keberhasilan usaha ?
- a. Sudah.
 - b. Belum, tapi sudah dipikirkan.
 - c. Belum terpikirkan.

Pertanyaan Bidang Pendidikan.

12. Di samping anggota dan pimpinan (kepala/komandan) Satpam, apakah ada jabatan pimpinan (Chief/Manager) "Security" ?
- a. Ya.
 - b. Tidak.
13. Jika tidak, dalam perkembangan perusahaan di waktu mendatang, apakah ada kemungkinan pengembangan/pengadaan jabatan tsb.?
- a. Ya.
 - b. Tidak.
14. Persyaratan apakah yang ditetapkan atau sebaiknya untuk jabatan tersebut ?
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
15. Apakah pejabat sekarang telah memenuhi persyaratan tersebut ?
- a. Ya.
 - b. Belum, yaitu persyaratan nomor 14 : a / b / c / d / e *.
16. Pejabat sekarang berasal dari :
- a. TNI;
 - b. Polri;
 - c. Selain a dan b.

17. Apakah pejabat sekarang sudah pernah mengikuti pendidikan khusus tentang "Industrial Security" dalam bentuk seperti tersebut di bawah ini ?

- a. penataran;
- b. kursus;
- c. pendidikan diploma : I/II/III*
- d. pendidikan akademik/gelar.
- e. belum pernah.

(Bisa lebih dari satu jawaban, untuk a s/d d).

18. Jika sudah pernah, di mana personil tersebut mengikuti pendidikan ?

- a. Dalam negeri; b. Luar negeri.

19. Kapan pendidikan tersebut diikutinya ?

- a. Sebelum menjadi karyawan;
- b. Setelah menjadi karyawan.

20. Bagaimana pemahamannya mengenai tugas-tugas sekuriti ?

- a. Sangat baik; b. Baik; c. Cukup; d. Sedang; e. Kurang.

21. Bagaimana kemampuan/ketrampilannya memanejemeni sekuriti ?

- a. Sangat baik; b. Baik; c. Cukup; d. Sedang; e. Kurang.

22. Bagaimana pemahamannya mengenai fungsi-fungsi bisnis (produksi, pemasaran, finansial, dan lain lain) ?

- a. Sangat baik; b. Baik; c. Cukup; d. Sedang; e. Kurang.

23. Menurut bapak/sdr. apakah pemahaman umum mengenai fungsi- fungsi bisnis juga perlu dimiliki oleh pimpinan sekuriti ?

- a. Sangat diperlukan; b. Diperlukan; c. Kurang diperlukan.

24. Apakah bapak/sdr. sependapat jika pimpinan/pembantu pimpinan sekuriti harus memahami pengetahuan sekuriti dan mampu/trampil melaksanakannya, memahami pengetahuan manajemen dan mampu/trampil memanejemeni sekuriti, serta memahami pengetahuan bisnis ?

- a. Ya, sependapat; b. kurang sependapat; c. Tidak sependapat.

25. Untuk mendapatkan tenaga sebagaimana dimaksud butir 24 perlu mengikuti suatu pendidikan, yang memberikan pengetahuan teoritis dan latihan praktek.

a. Kapan sebaiknya pendidikan tersebut diikuti ?

- 1) Sebelum menjadi karyawan;
- 2) Setelah menjadi karyawan.

b. Bagaimana sebaiknya jenis pendidikan tersebut ?

- 1) Kursus (sekitar tiga bulan);
- 2) Pendidikan Diploma : I/II/III *
- 3) Pendidikan Gelar (S-1).

c. Jika lowongan untuk jabatan pimpinan/staf sekuriti tersedia di waktu mendatang, apakah perusahaan bapak/sdr. berminat menseleksi lulusan pendidikan tersebut ?

- 1) Ya;
- 2) Tidak;
- 3) Belum terpikirkan.

26. Kemampuan/ketrampilan apa saja yang sebaiknya dipahami/ dikuasai oleh lulusan pendidikan tersebut ?

- | | |
|--|--|
| a. Kepemimpinan; | b. Manajemen; |
| c. Administrasi Bisnis; | d. Pengetahuan hukum/peraturan. |
| e. Taktik/teknik Sekuriti; | f. Tindakan kepolisian; |
| g. Pengetahuan Sosial (psikologi, sosiologi, komunikasi/ hubungan masyarakat); | |
| h. Teknologi Sekuriti; | i. Bahasa Inggris; |
| j. Komputer (dasar); | k. Administrasi Umum (laporan, surat menyurat, dll). |
| l. | m. |

(Bisa lebih dari satu jawaban).

27. Promosi personil yang dipandang berhasil dalam manajemen sekuriti dapat diarahkan pada fungsi :

- a. Personalia;
- b. Litbang (R & D);
- c. Logistik;
- d.
- e.

(Bisa lebih dari satu jawaban).

28. Di samping untuk tenaga Manajer Sekuriti, apakah perusahaan bapak/sdr. juga mempertimbangkan kebutuhan karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas (pencegahan kerugian) ?

a. Ya. b. Tidak. c. Mungkin.



PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

DIISI OLEH ANGGOTA SATPAM
LULUSAN SMTA

Data Umum.

(* coret yang tidak sesuai atau isi dengan jawaban anda sendiri apabila ada tanda).

- a. Nomor : (dikosongkan).
- b. Tanggal pengisian :
- c. Jenis kelamin : Laki/ Perempuan *.
- d. Umur : tahun.
- e. Agama : Islam/ Katholik/ Protestan/ Budha/ Hindu*
- f. Rata-rata seluruh penghasilan sebulan : Rp 150.000,- ke bawah/
di atas Rp 150.000,-/ di atas Rp 250.000,-*
- g. Pendidikan (SLTA):
- 1) jenis : SMA/SMEA/STM/..... *.
 - 2) jurusan :
 - 3) hoby olahraga :
 - 4) hoby kesenian :
 - 5) aktivitas dalam organisasi di sekolah; pernah menjabat sebagai :
 - 6) peringkat kenaikan kelas/penilaian semester biasanya tergolong : di bawah rata-rata kelas/ rata-rata kelas/ di atas rata-rata kelas *.
 - 7) kelulusan SLTA : Lulus/tidak lulus/sedang sekolah *.

Pertanyaan.

(Pilih salah satu yang dianggap tepat di antara jawaban yang tersedia dan lingkari huruf di depannya).

1. Bagaimana pendapat anda terhadap rencana pembentukan lembaga pendidikan tinggi dimaksud ?
 - a. Perlu segera direalisasikan.
 - b. Bisa saja kalau cukup laik dan bermanfaat.
 - c. Belum waktunya.
 - d. Tidak perlu pendidikan.
 - e. Cukup lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada.

2. Bagaimana sebaiknya jenis pendidikan dimaksud ?
 - a. Kursus (sekitar tiga bulan).
 - b. Pendidikan diploma.
 - c. Pendidikan Gelar (S-1).

3. Jika telah terbentuk, apakah anda berminat mengikuti seleksi masuk pendidikan dimaksud ?
 - a. Sangat berminat.
 - b. Berminat.
 - c. Masih pikir-pikir dulu (bagaimana nanti).
 - d. Tidak berminat.

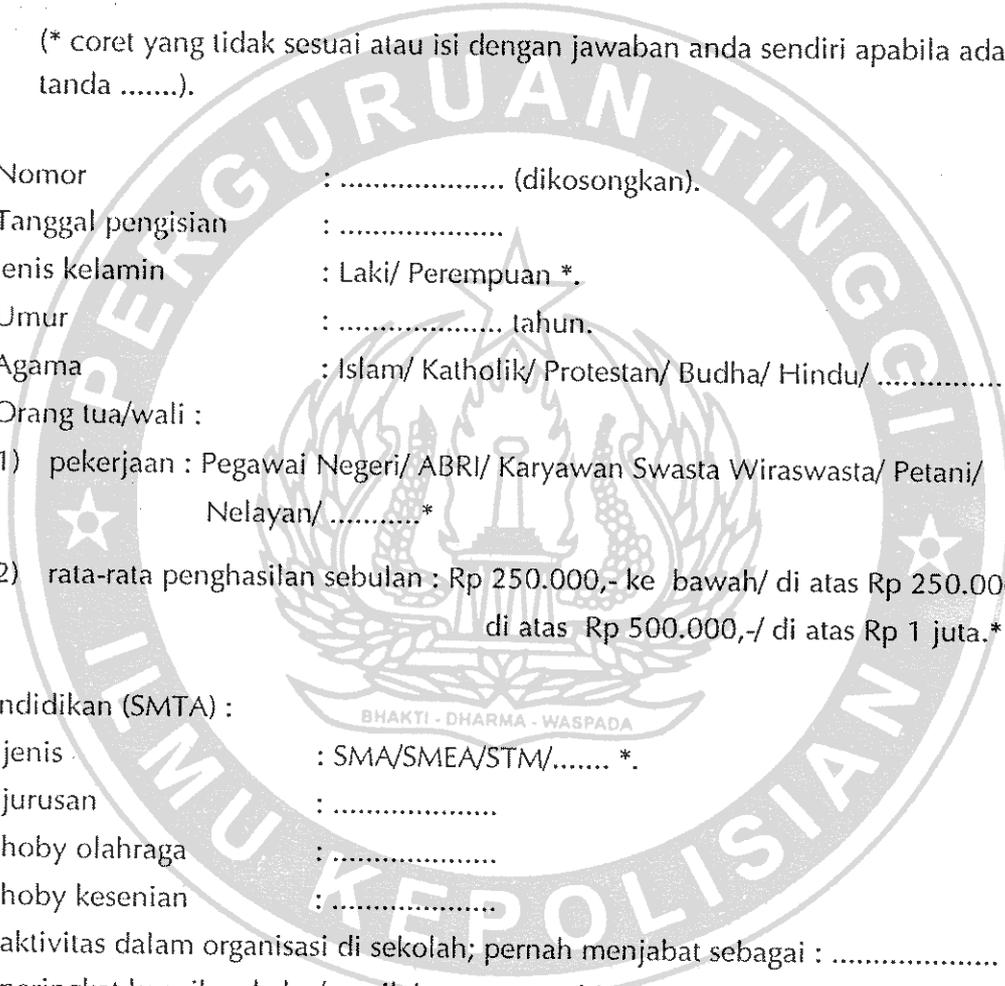
4. Bagaimana pendapat anda untuk mengikuti seleksi masuk pendidikan dimaksud ?
 - a. Harus ditugas-belajarkan oleh perusahaan.
 - b. Kalau tidak mungkin ditugas-belajarkan, yang penting diizinkan oleh perusahaan.
 - c. Kalaupun tidak memperoleh tugas-belajar atau izin, tetap perlu karena menyangkut kepentingan pengembangan diri.

MODEL M-3

DIISI OLEH SISWA KLAS III SMTA
ATAU PENCARI KERJA LULUSAN SMTA.

Data Umum.

(* coret yang tidak sesuai atau isi dengan jawaban anda sendiri apabila ada tanda).

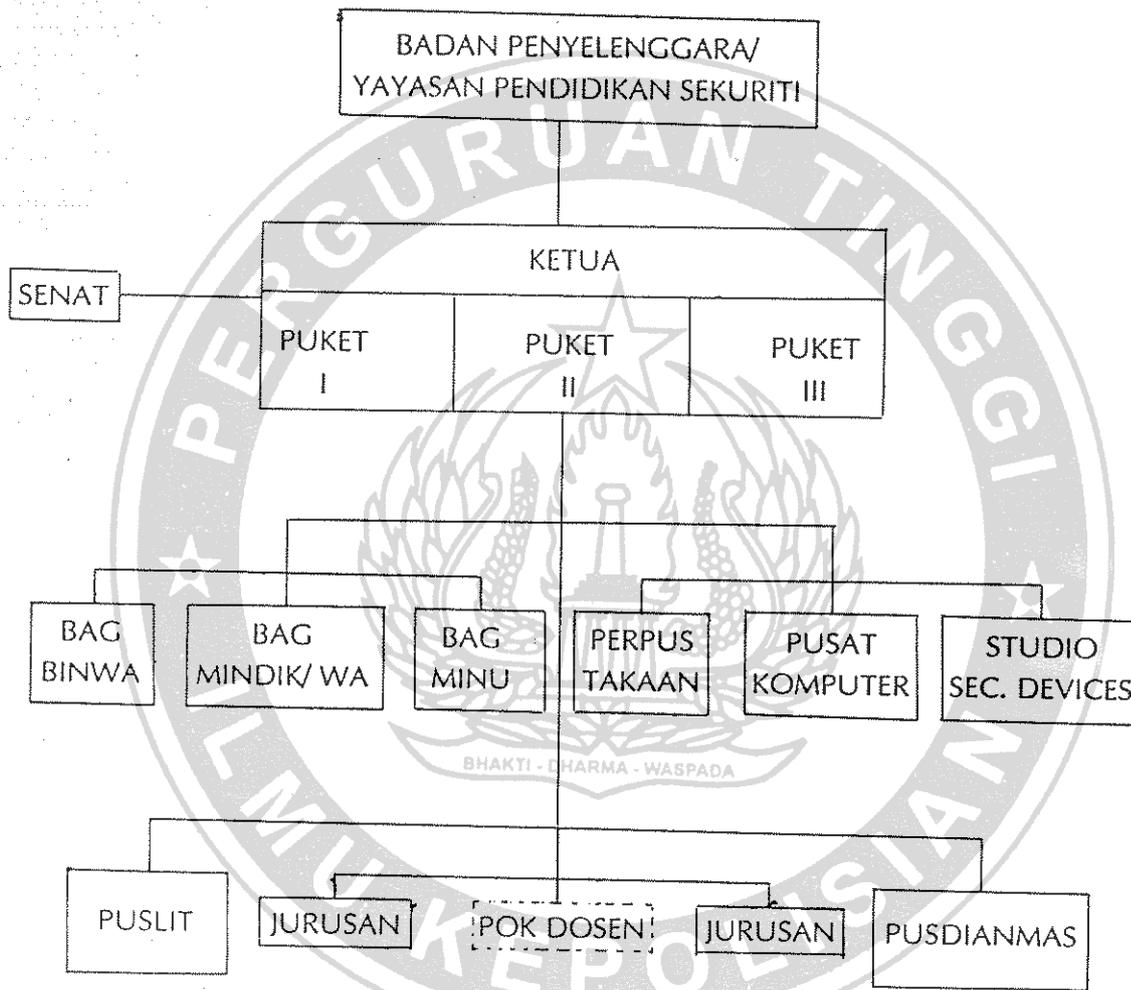
- 
- a. Nomor : (dikosongkan).
- b. Tanggal pengisian :
- c. Jenis kelamin : Laki/ Perempuan *.
- d. Umur : tahun.
- e. Agama : Islam/ Katholik/ Protestan/ Budha/ Hindu/*
- f. Orang tua/wali :
- 1) pekerjaan : Pegawai Negeri/ ABRI/ Karyawan Swasta Wiraswasta/ Petani/ Nelayan/*
 - 2) rata-rata penghasilan sebulan : Rp 250.000,- ke bawah/ di atas Rp 250.000,- di atas Rp 500.000,-/ di atas Rp 1 juta.*
- g. Pendidikan (SMTA) :
- 1) jenis : SMA/SMEA/STM/..... *.
 - 2) jurusan :
 - 3) hoby olahraga :
 - 4) hoby kesenian :
 - 5) aktivitas dalam organisasi di sekolah; pernah menjabat sebagai :
 - 6) peringkat kenaikan kelas/ penilaian semester biasanya tergolong : di bawah rata-rata kelas/ rata-rata kelas/ di atas rata-rata kelas *.
 - 7) kelulusan SLTA : Lulus/ tidak lulus/ sedang sekolah *.

Pertanyaan.

(Pilih salah satu yang dianggap tepat di antara jawaban yang tersedia dan lingkari huruf di depannya).

1. Bagaimana pendapat anda terhadap rencana pembentukan lembaga pendidikan tinggi dimaksud ?
 - a. Perlu segera direalisasikan.
 - b. Bisa saja kalau cukup laik dan bermanfaat.
 - c. Belum waktunya.
 - d. Tidak perlu pendidikan.
 - e. Cukup lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada.
2. Bagaimana sebaiknya jenis pendidikan dimaksud ?
 - a. Kursus (sekitar tiga bulan).
 - b. Pendidikan diploma.
 - c. Pendidikan Gelar (S-1).
3. Jika telah terbentuk, apakah anda berminat mengikuti seleksi masuk pendidikan dimaksud ?
 - a. Sangat berminat.
 - b. Berminat.
 - c. Masih pikir-pikir dulu (bagaimana nanti).
 - d. Tidak berminat.

KONSEP STRUKTUR ORGANISASI *
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SEKURITI INDUSTRI (STIMSI)



* Untuk Konsep Jangka Panjang

LAMPIRAN V

REKAPITULASI JAWABAN ANGGKET/KUISINAIR

MODEL M-1 (Responden = 36)

NO.	JAWABAN					
	A(1)	B(2)	C(3)	D	E	F
1.	-	4	22	8	2	-
2.	-	4	22	6	4	-
3.	-	14	8	8	6	-
4.	6	18	4	8	-	-
5.	14	10	10	2	-	-
6.	16	18	2	-	-	-
7.	16	18	2	-	-	-
8.	26	10	-	-	-	-
9.	21	14	-	-	-	-
10.	34	34	24	-	8	10
11.	24	10	2	-	-	-
12.	28	8	-	-	-	-
13.	6	2	-	-	-	-
15.	28	8	-	-	-	-
16.	4	14	18	-	-	-
17.	32	22	2	2	2	-
18.	34	6	-	-	-	-
19.	18	20	-	-	-	-
20.	4	22	10	-	-	-
21.	4	16	14	2	-	-
22.	2	14	16	4	-	-
23.	10	26	-	-	-	-
24.	34	2	-	-	-	-
25a.	28	10	-	-	-	-
25b.	20	18	-	-	-	-
25c.	28	-	8	-	-	-
27.	32	18	6	2	-	-
28.	30	-	4	-	-	-

NO. 14 :

1. Kepemimpinan
2. Pengetahuan Hukum
3. Wawasan Security
4. Komunikatif
5. Management Skill
6. Jiwa Litbang
7. Profesional dalam Bidang Safety & Security
8. Jiwa Kejuangan

NO. 26 :

- A : 14
 B : 12
 C : 8
 D : 11
 E : 14
 F : 9
 G : 13
 H : 11
 I : 9
 J : 8
 K : 12

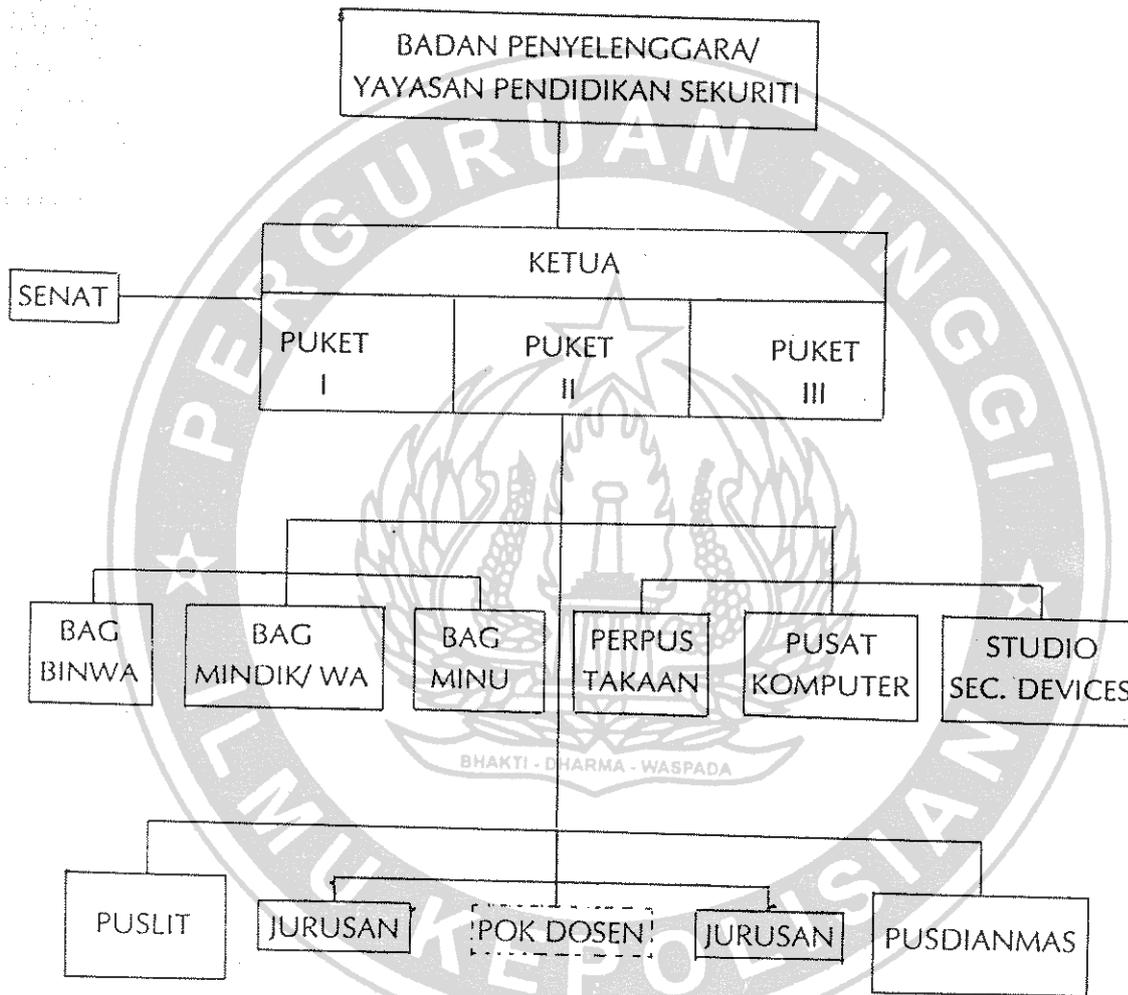
MODEL M-2 (Responden = 40)

NO.	a	b	c	d	e
1.	20	14	-	2	4
2.	20	20	-	-	-
3.	8	28	4	-	-
4.	26	12	2	-	-

MODEL M-3 (Responden = 311)

NO.	a	b	c	d	e
1.	96	202	4	3	6
2.	115	130	66	-	-
3.	17	106	147	47	-

KONSEP STRUKTUR ORGANISASI *
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SEKURITI INDUSTRI (STIMSI)



* Untuk Konsep Jangka Panjang

LAMPIRAN VII

DAFTAR KEBUTUHAN SARANA (PERALATAN) JANGKA PANJANG

1. Meubeler Kantor/Pendidikan	Rp. 40.000.000,-
2. Mesin Tulis/Hitung	Rp. 5.000.000,-
3. Alat Instruksi/Penolong Instruksi	Rp. 10.000.000,-
4. Air Condition (AC)	Rp. 50.000.000,-
5. Perpustakaan (Buku/Meubeler)	Rp. 25.000.000,-
6. Komputer (20 unit x 3.000.000,-)	Rp. 60.000.000,-
7. Peralatan Sekuriti (Contoh/alat instruksi)	Rp. 25.000.000,-
8. Kendaraan Operasional (Minibus)	Rp. 35.000.000,-
9. Lain-lain	Rp. 30.000.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.280.000.000,-

Keterangan : 1. Perhitungan perkiraan/ancer-ancer dengan mengacu pada perhitungan kebutuhan jangka pendek (Lampiran VIII).
2. Kebutuhan ini diperkirakan maksimal sehingga pengadaannya dapat dilakukan secara bertahap.

LAMPIRAN VIII

DAFTAR KEBUTUHAN PERALATAN (SARANA)
PROGRAM JANGKA PENDEK

NO	J E N I S	HARGA	FUNGSI / HARGA JUMLAH		KET
			KANTOR	PENDIDIKAN	
1.	MEJA TULIS				
	a. Biro	200.000	2x = 400.000		
	b. Setengah Biro	125.000	5x = 625.000		
	c. Biasa/rapat	75.000	4x = 300.000	4x = 300.000	
	d. Ketik (IBM)	100.000	1x = 100.000		
2.	KURSI				
	a. Pimpinan	135.000	2x = 270.000		
	b. Staf/Dosen	100.000	5x = 500.000	2x = 200.000	
	c. Biaya/Rapat	25.000	10x = 250.000	8x = 200.000	
	d. Kuliah	50.000		200x = 10.000.000	
3.	SOFA	500.000	1x = 500.000		
4.	FILING CABINET	567.000	1x = 567.000		
5.	LEMARI ARSIP	547.000	1x = 547.000		
6.	MESIN TIK				
	a. IBM (Elektrik)	1.017.500	1x = 1.017.500		
	b. Besar (Manual)	431.000	1x = 431.000		
	c. Sedang (Manual)	275.650	1x = 275.650		
7.	MESIN HITUNG				
	a. Biasa	311.300	1x = 311.300		
	b. Kalkulator	37.600	1x = 37.600		
8.	O H P	860.000		2x = 1.720.000	
9.	WHITE BOARD				
	a. Standard	160.000	1x = 160.000	3x = 480.000	
	b. Gantung	43.250	2x = 86.500		
10.	GAMBAR GARUDA/PRES/ WAPRES.	80.000	2x = 160.000		
11.	BENDERA/TIANG (Merah Putih/Lambang)	120.000	1x = 120.000		
12.	TAPE RECORDER	160.000		1x = 160.000	
13.	WIRE LESS/SOUND SYSTEM	800.000		2x = 1.600.000	
14.	BRANKAS	335.000	1x = 335.000		
15.	AIR CONDITIONER				
	a. Split 2 PK	2.500.000	1x = 2.500.000	2x = 5.000.000	
	b. Sedang 1,5 PK	2.100.000	1x = 2.100.000	1x = 2.100.000	
16.	KOMPUTER	3.500.000	1x = 3.500.000		
17.	PERANGKAT PERPUSTAKAAN MINI	5.000.000		1x = 5.000.000	
18.	PEMASANGAN TELEPON	1.250.000	1x = 1.250.000		
	J U M L A H		Rp 16.343.500	Rp 26.760.000	
19.	Lain-Lain (Pembulatan)		Rp 6.896.450		
	T O T A L		Rp 50.000.000,-		

LAMPIRAN IX

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA

No	Jabatan	Standar Gaji Perbulan	Jangka Pendek		Jangka Panjang	
			Tenaga	Biaya Pertahun	Tenaga	Biaya Pertahun
1	Ketua	1,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000
2	Pembantu Ketua	600,000	2	14,400,000	3	21,600,000
3	Kabag	400,000	2	9,600,000	3	14,400,000
4	Kapuslit/ Dianmas/ Studio	500,000	0	0	3	18,000,000
5	Ka Pustaka/ Ruang Komputer	400,000	0	0	2	9,600,000
6	Staf/ Pelaksana Administrasi	250,000	4	12,000,000	12	36,000,000
7	Pegawai Harian	150,000	1	1,800,000	3	5,400,000
8	Ketua Jurusan	500,000	0	0	2	12,000,000
9	Sekretaris Jurusan	350,000	0	0	2	8,400,000
10	Dosen Tetap	300,000	No : 1 & 2	0	4	14,400,000
	Jumlah	-	10	49,800,000	35	151,800,000

- Terhadap kemungkinan kenaikan gaji sudah barang tentu harus dikaitkan dengan perkembangan "usaha".
- Jumlah maksimal (Penambahan tenaga untuk jangka Panjang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan "usaha").

LAMPIRAN X

DAFTAR KEBUTUHAN BIAYA TIDAK TETAP

NO.	JENIS BIAYA	PROGRAM D-I (TAHUN I)	PROGRAM D.III/S-1 (TAHUN II/DSTNYA)	PROG. SUS SINGKAT (75 JAM PELAJARAN)	PROG. SUS KILAT (3 HARI/8 SESSI)
1.	Administrasi/persiapan	500.000	300.000	300.000	300.000
2.	Publikasi	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000
3.	Honorarium :				
	a. Pengajar/Pembicara	14.000.000 (700 jam x 20.000)*	14.000.000	2.250.000 (75 x 30.000)	2.000.000 (8 x 250.000)
	b. Kepanitiaan	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000
4.	Biaya Lat. fisik/praktek lapangan	1.500.000	1.000.000	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		20.000.000	15.300.000	4.550.000	4.300.000
5.	Biaya dihitung per peserta :				
	a. Operasi dik & bahan ajaran	100.000	100.000	10.000	10.000
	b. Konsumsi selama lat/praktek/sus	130.000 (20 hari x 6.500)	65.000	50.000 (25 hari x 2.000/snack)	120.000 (termasuk tempat di hotel).
	c. Pakaian seragam/perlengkapan**	225.000	40.000	-	-
	d. Trans latihan/praktek/lapangan	20.000	20.000	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		475.000	225.000	60.000	130.000

- * untuk perhitungan satu kelas (50 orang) Indeks honor pengajar pada perguruan tinggi swasta rata-rata Rp 15.000,-
- ** 3 pasang PDH/PDL (dan Atribut) Rp 120.000,-
- 2 pasang sepatu Rp 40.000,-
- 1 buah topi Rp 20.000,-
- 1 lembar jaket Rp 20.000,-
- Ransel, Kopelrim dan sabuk Rp 25.000,-
- Rp 225.000,-

**PERHITUNGAN TITIK IMPAS
(BREAK EVENT POINT)**

RUMUS : JUMLAH BIAYA = HARGA "JUAL" X JUMLAH PESERTA.

Jumlah Peserta = X.

1. Program D-I.

$$97.000.000,- + 20.000.000,- + 475.000,-X = 2.000.000,-X$$

$$17.000.000,- = 1.525.000,-X$$

$$X = 76,7$$

dibulatkan 77 peserta

Karena jumlahnya lebih dari 50 orang maka harus dijadikan dua kelas dengan konsekuensi penambahan biaya honorarium mengajar sebesar Rp. 14.000.000,-

$$117.000.000,- + 14.000.000,- = 1.525.000,-X$$

$$137.000.000,- = 1.525.000,-X$$

$$X = 85,9$$

dibulatkan 86 peserta

2. Program D-II/III dan S-1.

$$15.300.000,- + 225.000,-X = 1.000.000,-X$$

$$15.300.000,- = 775.000,-X$$

$$X = 19,7$$

dibulatkan 20 peserta

3. Program Kursus Singkat.

$$4.550.000,- + 60.000,-X = 750.000,-X$$

$$4.550.000,- = 690.000,-X$$

$$X = 6,6$$

LAMPIRAN XIV

PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG
(TIME VALUE OF MONEY)

TAHUN	ALIRAN KAS MASUK	"PV FACTOR" PADA 20 %	PV
I	35.875.000,-	0,833	29.883.875
II	91.989.500,-	0,694	63.840.713
III	101.575.000,-	0,579	58.811.925
IV	125.120.000,-	0,482	60.307.840
V	139.680.000,-	0,402	56.151.360
Total	494.239.500,-	-	268.995.713

Keterangan :

1. Aliran Kas masuk (Operasional) =
Laba setelah pajak + penyusutan + Bunga (I - Pajak)
2. PV (Present Value) adalah nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu dimasa mendatang, dengan rumus :
PV = PV. Factor x aliran kas masuk.
3. "PV Factor" adalah faktor tingkat bunga yang diperhitungkan dalam nilai sekarang dengan rumus :

$$\frac{1}{(1+i)^n}$$

n, dimana i = tingkat bunga (required rate of return) & n = periode waktu (tahun).

DAFTAR RIWAYAT SINGKAT KEHIDUPAN

1. Nama : FAROUK MS, Drs.
2. Tempat/ tanggal lahir : Bima, 17 Oktober 1949.
3. Alamat : Jl. Tirtayasa Raya no 6.
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
4. Pekerjaan : Anggota Polri (Let. Kol. Pol)
5. Jabatan : a. Kabag Binjuang PTIK
b. Dosen Kriminologi PTIK
6. Keluarga : Istri dan Tiga orang anak
7. Pendidikan (Penting) :
 - a. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1972
 - b. Sarjana Ilmu Kepolisian, lulus PTIK, 1981
 - c. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, 1986
8. Pengalaman Jabatan (Penting) :
 - a. Perwira Staf Polres Timor Tengah Selatan, 1973 - 1978
 - b. Perwira Staf Perencanaan & Anggaran Polri, 1981 - 1986
 - c. Kapolres Cilegon, 1986 - 1989
 - d. Kapolres Cianjur, 1989 - 1990
9. Pengalaman Organisasi :
 - a. Ketua KAPPI Bima, 1966 - 1968
 - b. Senat Akabri Kepolisian, PTIK dan Sespim Polri
 - c. Sekretaris II ISIK, 1991 - sekarang
 - d. Anggota Badan Pembina Pusat APSSI, 1992 - sekarang
10. Bidang yang ditekuni : Bisnis dan "Security"